

Menjawab Tantangan

2019 Laporan Tahunan



PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

STP DALAM ANGKA

Pendapatan

2019

1.767,0

2018

1.899,8

2017

1.908,5

(Dalam Miliar Rupiah)

EBITDA

2019

1.478,0

2018

1.637,7

2017

1.646,1

(Dalam Miliar Rupiah)

Jumlah Menara

2019

6.384

2018*

6.412

2017

6.895

Jumlah Penyewa Menara

2019

11.154

2018*

10.492

2017

11.774

*Per akhir 2018, menara dan penyewaan dimana PT Internux/First Media tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan.



FOKUS 2019

Melalui tema 'Menjawab Tantangan', PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (Perseroan) menunjukkan komitmennya dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan.

Di tahun 2019, perkembangan industri yang positif berhasil mendorong Perseroan untuk membukukan pertumbuhan sewa yang kuat dengan total hampir 1.800 order baru dan menjadi pencapaian order organik tertinggi yang Perseroan pernah capai. Hal ini mendorong pertumbuhan penyewaan bersih menjadi 11.154 pada tahun 2019, tumbuh 6,3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, di tahun 2019 Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1.767,0 miliar, laba tahun berjalan sebesar Rp228,4 miliar, aset sebesar Rp11.164,8 miliar, liabilitas sebesar Rp8.191,3 miliar, dan ekuitas sebesar Rp2.973,5 miliar.

Dengan serangkaian tantangan yang harus dihadapi oleh industri telekomunikasi, Perseroan sekali lagi telah membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi persaingan dan tantangan. Pencapaian ini tentunya akan menjadi landasan yang kuat bagi Perseroan dalam menghadapi tantangan di tahun mendatang.

Daftar Isi

01

Ikhtisar Kinerja Penting

08	Ikhtisar Kinerja Penting
10	Kinerja Saham

02

Laporan Kepada Pemegang Saham

14	Laporan Dewan Komisaris
17	Profil Dewan Komisaris
22	Laporan Direksi
25	Profil Dewan Direksi
28	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

03

Profil Perusahaan

32	Identitas Perusahaan
33	Tentang STP
34	Visi dan Misi
35	Nilai-Nilai Inti Perseroan
35	Kegiatan Usaha
36	Tonggak Sejarah
38	Struktur Organisasi
40	Struktur Grup Perusahaan
42	Sumber Daya Manusia

42	Prosedur Seleksi dan Rekrutmen Karyawan
43	Komposisi Karyawan
44	Budaya Kerja
44	STP Culture
45	Manajemen Kerja
46	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
47	Kesetaraan dan Keberagaman
47	Jalur Komunikasi Informasi Bagi Karyawan
48	Work-Life Balance di Lingkungan Kerja Perseroan
48	Teknologi Informasi
49	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
49	Kronologi Pencatatan Saham
49	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
50	Informasi Tentang Entitas Anak
51	Nama dan Alamat Entitas Anak serta Kantor Perwakilan
52	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
54	Penghargaan & Sertifikasi

04

Analisis & Pembahasan Manajemen

58	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
60	Kinerja Keuangan
66	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

67	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
67	Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
67	Investasi Barang Modal
68	Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya serta Proyeksi Tahun Mendatang
68	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
68	Prospek Usaha Perusahaan
69	Aspek Pemasaran
70	Kebijakan Dividen
70	Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum
71	Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
71	Perubahan Peraturan Perundang-undangan
72	Perubahan Kebijakan Akuntansi
72	Informasi Kelangsungan Usaha

05

Tata Kelola Perusahaan

76	Tata Kelola Perusahaan
78	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
81	Dewan Komisaris
85	Direksi
89	Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

90	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali
90	Komite Audit
94	Komite Remunerasi & Nominasi
95	Sekretaris Perusahaan
97	Audit Internal
99	Audit Eksternal
100	Manajemen Risiko
101	Sistem Pengendalian Internal
101	Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
101	Kode Etik Perusahaan
102	Benturan Kepentingan
102	<i>Whistleblowing System</i>
103	Akses Informasi dan Data Perseroan kepada Publik
104	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

108	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-----	----------------------------------

07

Laporan Keuangan Konsolidasian

112	Laporan Keuangan Konsolidasian
-----	--------------------------------



01

Ikhtisar Kinerja Penting



Ikhtisar Kinerja Penting

Ikhtisar Operasional

Portfolio Aset Strategis	2019	2018*	2017
Site Portofolio Tower			
Jumlah Site Menara	6.384	6.412	6.895
Site Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS**	38	37	38
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	3.382	3.000	2.847
Penyewaan Site Menara	11.154	10.492	11.774
Rasio Penyewaan Menara	1,75x	1,64x	1,71x
Penyewaan Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS	68	54	63

*) Per akhir 2018, menara dan penyewaan di mana PT First Media Tbk/PT Internux tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan

**) Dihitung berdasarkan jumlah bangunan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Miliar Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2019	2018	2017
Kas dan Setara Kas Ditambah Dana yang Dibatasi Penggunaannya	361,5	147,0	280,1
Aset Lancar Lainnya	1.403,1	1.926,5	1.758,8
Jumlah Aset Lancar	1.764,6	2.073,5	2.038,9
Aset Tidak Lancar	9.400,2	9.597,0	10.571,2
Jumlah Aset	11.164,8	11.670,5	12.610,1
Liabilitas Jangka Pendek	1.567,0	1.536,2	821,2
Liabilitas Jangka Panjang	6.624,3	7.164,3	7.695,5
Jumlah Liabilitas	8.191,3	8.700,5	8.516,7
Jumlah Ekuitas	2.973,5	2.970,0	4.093,4
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	11.164,8	11.670,5	12.610,1

(dalam Miliar Rupiah)

Laporan Laba Rugi Konsolidasian	2019	2018	2017
Pendapatan	1.767,0	1.899,8	1.908,5
Beban Pokok Pendapatan	492,1	478,7	438,8
Laba Bruto	1.274,9	1.421,1	1.470,0
Beban Usaha	189,1	166,8	160,0
Laba Usaha	1.085,8	1.254,3	1.309,6
Beban Lain-lain – Bersih	843,9	2.456,7	1.098,5
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	241,9	(1.202,4)	211,1
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(13,5)	(21,5)	119,8
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	228,4	(1.223,8)	331,0
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3,6	(1.123,5)	(589,6)
EBITDA*	1.478,0	1.637,7	1.646,1

*) EBITDA = Laba Usaha + Penyusutan dan Amortisasi

Rasio Keuangan	2019	2018	2017
Laba Bruto Terhadap Pendapatan Usaha	72,1%	74,8%	77,0%
Laba Usaha Terhadap Pendapatan Usaha	61,4%	66,0%	68,6%
EBITDA Terhadap Pendapatan Usaha	83,6%	86,2%	86,2%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Usaha	12,9%	(64,4%)	17,3%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Usaha	0,2%	(59,1%)	(30,9%)
Rasio Lancar (x)	1,1	1,3	2,5
Rasio Pinjaman* Terhadap Ekuitas (x)	2,4	2,6	1,8
Rasio Pinjaman* Terhadap Jumlah Aset (x)	0,6	0,7	0,6
Pinjaman Bersih** Terhadap LQA EBITDA*** (x)	4,3	4,6	4,4

*) Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman

**) Pinjaman Bersih = Pinjaman (Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman) - Kas dan Setara Kas serta dana yang dibatasi penggunaannya.

*** LQA EBITDA = EBITDA Kuartal terakhir yang disetahunkan EBITDA

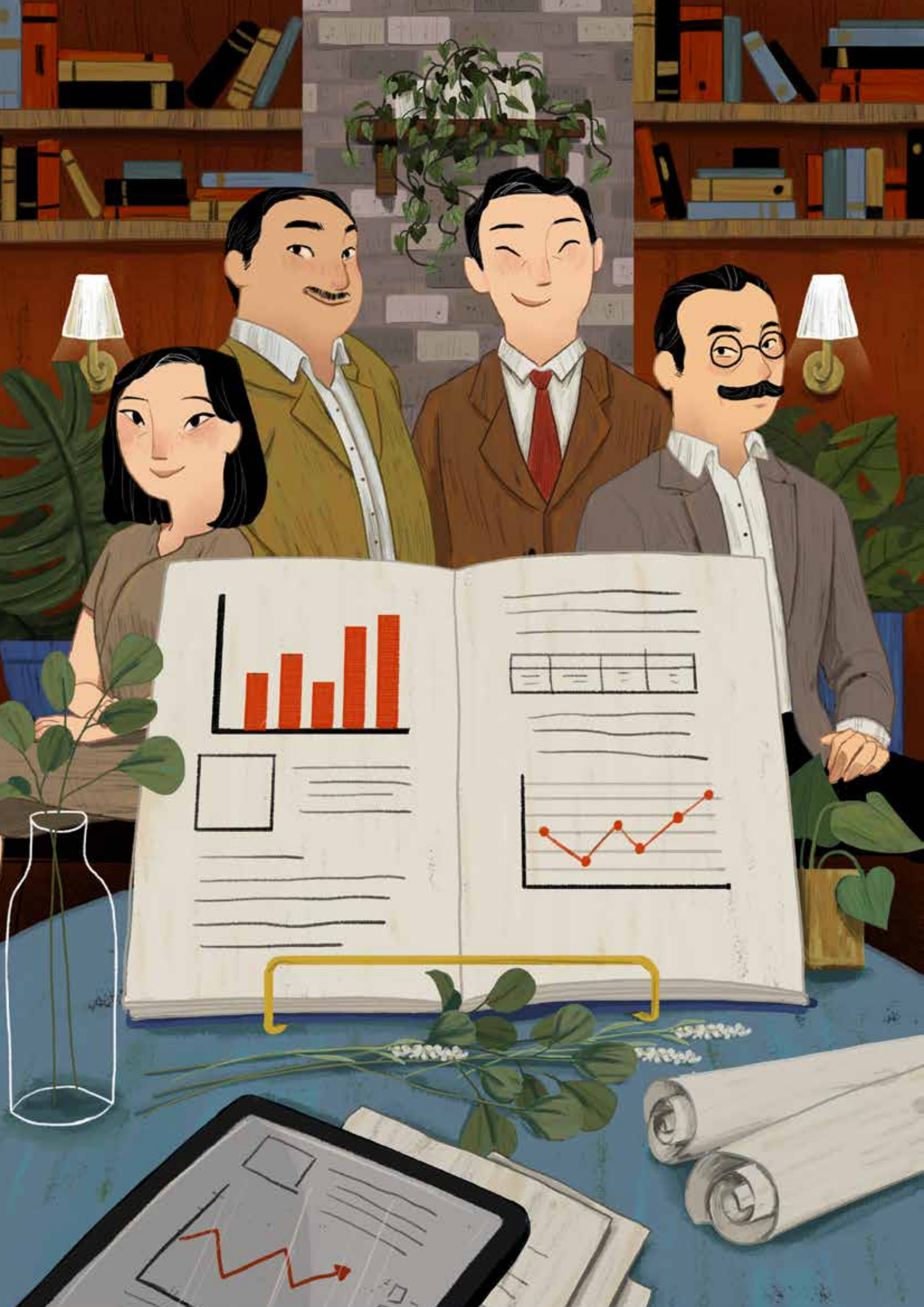


Kinerja Saham

2019						
Kuartal	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Kapitalisasi Pasar (Juta Rp)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)	Nilai Perdagangan (Juta Rp)
I	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-
II	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-
III	6.800	3.100	4.400	5.005.000	6	26
IV	4.280	1.270	3.280	3.731.000	20	59

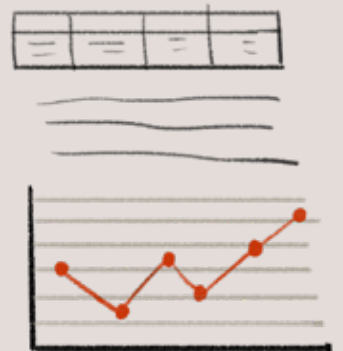
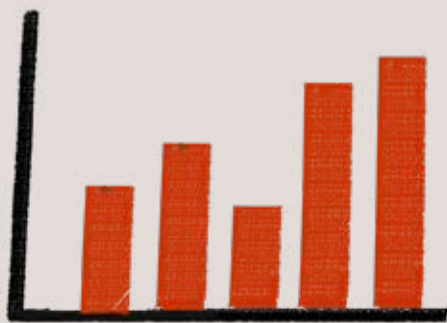
2018						
Kuartal	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Kapitalisasi Pasar (Juta Rp)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)	Nilai Perdagangan (Juta Rp)
I	6.800	6.800	6.800	7.735.000	4	24
II	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-
III	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-
IV	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-





02

Laporan Kepada Pemegang Saham





Laporan Dewan Komisaris



Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Semoga berkah dan rahmat-Nya selalu dilimpahkan untuk kita semua. Dewan Komisaris dengan berbangga hati menyampaikan kinerja operasional Perseroan yang kuat di tahun 2019. Merupakan kehormatan bagi saya, mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. untuk tahun buku 2019.

Kinerja Operasional yang Kuat Memposisikan Perseroan dengan Baik untuk Tahun 2020

Perseroan membukukan pertumbuhan sewa yang sehat pada tahun 2019 - total penyewaan tumbuh 6,3% menjadi 11.154 per Desember 2019 dari 10.492 per Desember 2018. Hubungan yang baik dengan operator telekomunikasi terkemuka terbukti sangat berarti seiring dengan kepercayaan yang diberikan para operator kepada Perseroan sebagai mitra pilihan untuk ikut serta dalam roll-out dan perluasan jaringan yang mereka miliki. Kami mengharapkan momentum dan dinamika yang menguntungkan ini dapat terus bergerak maju, membuka landasan yang sehat untuk pertumbuhan di masa depan.

Namun demikian, pencapaian pada penyewaan menara tidak serta-merta tercermin pada kinerja keuangan tahun 2019, meskipun pencapaian tersebut turut membentuk fondasi yang kuat untuk 2020. Sebagian besar order baru datang pada paruh kedua 2019 di mana industri mulai berani menggelontorkan pengeluaran signifikan usai surutnya ketidakpastian politik seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo. Berangkat dari hal tersebut, pendapatan Perseroan turun 7,0% menjadi Rp1.767 miliar pada 2019 dari Rp1.899 miliar pada tahun 2018 karena order baru yang didapatkan mulai berkontribusi pada kinerja Perseroan di akhir tahun. Namun demikian, pencapaian order baru tersebut menempatkan Perseroan pada awal yang kuat untuk tahun mendatang.

Untuk ke depannya, kami tetap optimis terhadap prospek Perseroan. Kami berharap industri telekomunikasi Indonesia akan melanjutkan arah pertumbuhannya sebagai landasan ekonomi yang kuat seiring dengan fokus Pemerintah yang memprioritaskan digitalisasi dan pembangunan infrastruktur nasional, perluasan jaringan yang berkelanjutan dan densifikasi oleh operator telekomunikasi, serta pertumbuhan konsumsi data yang sehat. Dengan didukung oleh Direksi yang berwawasan ke depan dan kompeten dalam memimpin Perseroan, kami yakin bahwa Perseroan akan meraih manfaat besar dari faktor-faktor pendorong tersebut.



Tata Kelola Perusahaan

Dengan dukungan Komite Audit, kami mengawasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di semua tingkatan manajemen Perseroan. Kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam hal transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan dalam kegiatan operasional harian kami untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kami juga menjalankan tanggung jawab kami untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan sepanjang tahun. Kami menyelenggarakan rapat bersama secara rutin dengan Direksi untuk memberikan rekomendasi tentang inisiatif strategis, risiko dan peluang, serta wawasan tentang pengembangan strategi untuk tahun 2020 dan seterusnya, serta memastikan bahwa Perseroan terus menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Perseroan memiliki kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) sebagai bagian dari mekanisme tata kelola. Pada kesempatan ini kami dengan senang hati mengungkapkan bahwa tidak ada laporan pelanggaran yang diterima selama 2019.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Direksi

Dewan Komisaris secara ketat mengawasi perumusan dan pelaksanaan strategi Perseroan oleh Direksi. Hal ini sejalan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar Perseroan, serta pedoman Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk penilaian berkala atas kinerja Perseroan sepanjang tahun.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh dua komite, yakni Komite Audit serta Komite Remunerasi & Nominasi. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa kedua komite telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan membangun pengendalian internal yang kuat. Pengendalian tersebut memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memantau kinerja Perseroan, serta untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal.

Komite Remunerasi & Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam penerapan kebijakan GCG, penyempurnaan struktur organisasi, dan nominasi untuk posisi-posisi kunci di dalam Perseroan. Komite Remunerasi & Nominasi juga mengusulkan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham, serta mengkaji strategi pengembangan bakat Perseroan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan peran komite-komite ini untuk memastikan penerapan standar tata kelola yang baik di seluruh operasional Perseroan.

Perubahan pada Komposisi Dewan Komisaris

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan pengunduran diri Bapak Jonathan Yuwono selaku Komisaris Utama. Kami berterima kasih atas kontribusi dan jasa beliau selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Kami juga ingin menyambut bergabungnya Bapak Jeffrey Yuwono sebagai Komisaris Utama yang baru.



Hingga 31 Desember 2019, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Jeffrey Yuwono sebagai Komisaris Utama
- Ludwig Indrawan sebagai Wakil Komisaris Utama
- Thong Thong Sennelius sebagai Komisaris
- Muhamad Senang Sembiring sebagai Komisaris Independen
- Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen

Apresiasi Kami

Kami ingin menyampaikan apresiasi terdalam kami kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaannya, serta kepada Direksi, karyawan, dan mitra bisnis atas dukungan yang sangat besar. Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan dukungan khusus dari para pemangku kepentingannya, Perseroan akan terus unggul.

Atas nama Dewan Komisaris,
Jakarta, 29 Juni 2020

Jeffrey Yuwono
Komisaris Utama

Profil Dewan Komisaris



1. **Jeffrey Yuwono**
Komisaris Utama

2. **Ludwig Indrawan**
Wakil Komisaris Utama

3. **Thong Thong Sennelius**
Komisaris

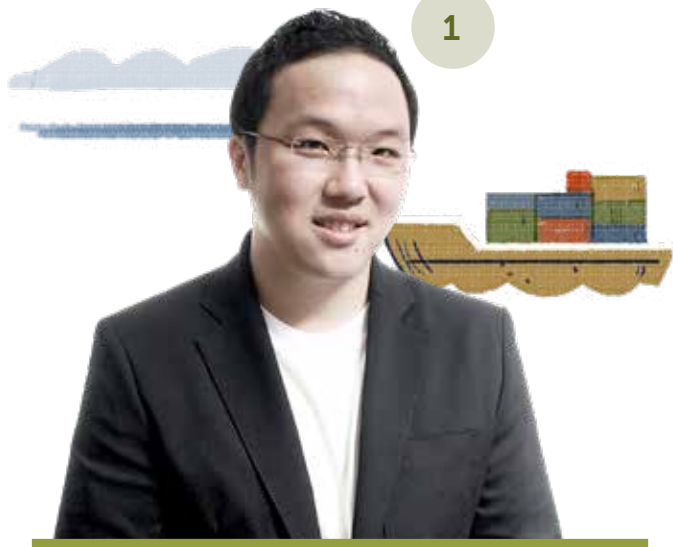
4. **Erry Firmansyah**
Komisaris Independen

5. **Muhamad Senang Sembiring**
Komisaris Independen





1



Jeffrey Yuwono

Komisaris Utama

Usia	39 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan	RUPS 15 Mei 2019

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Bachelor of Arts Economics dari Duke University (1998-2002)
- Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Stanford University (2005-2007)

Riwayat Jabatan

- Associate Consultant di Marakon Associates, Singapore (2002-2005)
- Product Manager, Windows di Microsoft, Redmond, Washington (2006)
- Founder dan CEO di Playtiva, Singapore (2007-2009)
- Co-Founder dan CEO di TCCG, Singapore (2009-2015)
- Co-Founder dan CEO di Sorabel by Sale Stock, Jakarta (2016-sekarang)

2



Ludwig Indrawan

Wakil Komisaris Utama

Usia	66 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar CAR dari Prahan (Victoria) College, Melbourne (1976)

Riwayat Jabatan

- Memulai karier di Challick Pte Ltd, Singapura (1978-1982)
- Menjalankan pengembangan bisnis properti di Selandia Baru dan Australia di bawah bendera Stags Leap dan Smart Homes Group (1992-2007)
- Managing Director di PT Smart Homes Anugrah, Surabaya (2007-sekarang)
- Wakil Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2013-sekarang)

3

Thong Thong Sennelius

Komisaris

Usia	48 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta (1994)
- Memperoleh gelar Master of Business dari Harvard University (1997)

Riwayat Jabatan

- Vice President Morgan Stanley, New York dan Singapura (1997-2002)
- Direktur Synnergy Capital Partners, Jakarta (2002-2005)
- Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2006-2011)
- Komisaris PT Sekawan Abadi Prima (2006-sekarang)
- Direktur PT Jaring Lintas Indonesia (2006-sekarang)
- Komisaris PT Ciptadana Multifinance (2009-2014)
- Direktur PT Ciptadana Capital (2009-sekarang)
- Komisaris PT Ciptadana Asset Management (2015-sekarang)
- Komisaris PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2011-sekarang)



4



Erry Firmansyah

Komisaris Independen

Usia	64 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

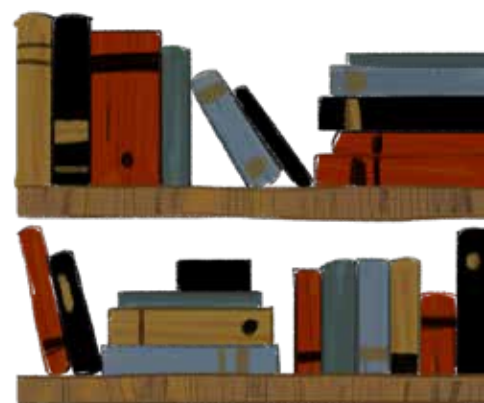
- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1981)

Riwayat Jabatan

- Auditor di Price Waterhouse Coopers Indonesia (1982-1984)
- Presiden Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2002)
- Presiden Direktur Bursa Efek Jakarta (2002-2007)
- Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia (2007-2009)
- Komisaris Independen PT Elnusa Tbk (2009-2013)
- Presiden Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Komisaris Independen PT Astra International Tbk (2009-2015)
- Komisaris Independen PT Berau Coal Energy Tbk (2010-2014)
- Komisaris Independen PT Unilever Tbk, PT Elang Mahkota Energy Tbk, PT Eagle Capital, dan PT Makmur Sejahtera Wisesa (2009-sekarang)
- Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2012-sekarang)
- Komisaris PT Indopremier, PT Bali Towerindo Tbk (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk (2017-2019)



5



Muhamad Senang Sembiring

Komisaris Independen

Usia	68 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan • RUPS 22 Mei 2014 • RUPS 29 Mei 2015 • RUPS 23 Mei 2017	
Riwayat Pendidikan • Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (1996) • Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (1999)	
Riwayat Jabatan • Camp-Field Manager PT Aqmar Services (1976-1986) • Direktur Marketing PT Indotrin Hung Yuang Securities (1988-1990) • Manajer bidang Pasar Modal PT Bank Pelita (1990-1991) • Direktur Marketing PT Arya Prada Sekuritas (1991-1995) • Ketua Delegasi Indonesia, The 2nd Asia Securities Forum, Seoul, Korea Selatan (1996) • Ketua Delegasi Indonesia, The 6th Asia Securities Forum, Tokyo, Jepang (2000) • Direktur Marketing PT Indomitra Sekuritas (1995-2000) • Salah Satu Pendiri, Sekretaris Jenderal, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) (1995-2002) • Presiden Direktur PT Indomitra Sekuritas (2000-2002) • Direktur Perdagangan, Keanggotaan PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek Indonesia (2002-2009) • Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) (2009-2018) • Komisaris Independen PT Rukun Raharja Tbk (2010-2019) • Komisaris Utama/Independen PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Karsa Mandiri (2011-2017) • Komisaris Independen PT CGS CIMB Securities (2018-sekarang) • Senior Advisor Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) (2018-sekarang) • Komisaris Utama Independen PT Rukun Raharja Tbk (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Repoer Tbk (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Putra Rajawali Kencana Tbk (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2011-sekarang)	





Laporan Direksi



Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Atas nama Direksi, dengan berbangga hati saya menyampaikan Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. dan pencapaian untuk tahun 2019.

Meningkatkan Dinamika Industri sebagai Pendorong yang Kuat untuk Pertumbuhan di Masa Depan

Di tahun 2019 industri telekomunikasi Indonesia fokus pada peningkatan infrastruktur jaringan. Operator telekomunikasi memprioritaskan pencapaian tingkat ARPU yang sehat, mengakhiri perang tarif yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Fokus pada ARPU mengharuskan operator telekomunikasi untuk meningkatkan layanan mereka, yang pada gilirannya mengharuskan mereka untuk secara aktif melakukan roll-out dan meningkatkan infrastruktur jaringan mereka. Hal ini menghasilkan momentum yang sehat dari order

penyewaan baru - baik bangunan baru dan kolokasi - terutama di paruh kedua tahun ini setelah ketidakpastian politik dari pemilu mereda.

Kami juga mencatat peningkatan kebutuhan operator telekomunikasi dalam menjual aset menara mereka untuk menyediakan modal guna membiayai lebih lanjut peluncuran jaringan mereka. Sebagai contoh, PT Indosat Tbk menjual 3.100 menara. Kami berharap tren ini terus berlanjut, memberikan peluang untuk pertumbuhan anorganik, dan selanjutnya order penyewaan baru ketika modal dari penjualan aset dikucurkan untuk *roll-out* jaringan.

Secara terpisah, ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok tampaknya tidak berdampak signifikan pada industri telekomunikasi Indonesia. Larangan terhadap Huawei yang diberlakukan oleh AS tampaknya tidak mengurangi momentum industri telekomunikasi Indonesia.



Penambahan Penyewa yang Sehat di 2019 Memposisikan Perseroan untuk Pertumbuhan yang Kuat di Masa Depan

Seiring dengan perkembangan industri yang positif Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan sewa yang kuat. Perseroan memperoleh hampir 1.800 order baru selama 2019, pencapaian order organik tertinggi yang Perseroan pernah capai. Dari jumlah tersebut, 882 order telah diproses, mendorong pertumbuhan penyewaan bersih menjadi 11.154 per Desember 2019, tumbuh 6,3% dari 10.492 per Desember 2018. Sisanya akan diproses pada tahun 2020 dan memberikan Perseroan landasan yang kuat untuk tahun depan.

Meskipun kinerja operasional cenderung kuat, tidak demikian halnya dengan pencapaian finansial Perseroan. Pendapatan turun 7,0% menjadi Rp1.767 miliar di 2019 dari Rp1.899 miliar di 2018. Penurunan pendapatan merupakan indikator lagging dari dinamika industri yang menantang di tahun-tahun sebelumnya di mana penyedia layanan telekomunikasi terimbas dari perang tarif pada waktu itu, yang menyebabkan potongan tarif sewa dari pelanggan, mundurnya pemain telekomunikasi tertentu, serta roll-out jaringan yang lebih lambat. Kami percaya bahwa kami telah melalui yang terburuk.

Kami siap untuk perkembangan industri telekomunikasi di masa depan. Kami terus mempertahankan hubungan yang erat untuk mempertahankan peran kami sebagai mitra pilihan untuk *roll-out* jaringan mereka. Kami juga secara konsisten berinvestasi dalam layanan jaringan data untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi data dan digitalisasi ekonomi Indonesia. Selain itu, kami terus memelihara dan mengolah kumpulan bakat kami untuk mengantisipasi peluang yang dijanjikan industri ini. Dengan inisiatif ini, kami percaya bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan peningkatan industri telekomunikasi Indonesia di masa datang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah nilai inti yang tertanam di seluruh operasional Perseroan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan/keadilan secara konsisten dalam setiap proses bisnis, kami akan meraih kinerja yang baik dan terus menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan kami.

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan didasarkan pada pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kami juga telah meningkatkan tata kelola kami dengan menerapkan kebijakan anti korupsi di seluruh Perseroan dan memperkuat fungsi audit internal kami.



Perubahan Komposisi Direksi

Di tahun 2019 tidak terdapat perubahan susunan Direksi. Sehingga, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Nobel Tanihaha sebagai Direktur Utama
- Juliawati Gunawan sebagai Direktur
- Tommy Gustavi Utomo sebagai Direktur Independen

Penutup

Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami yang terdalam kepada para

pemegang saham, pemangku kepentingan, dan mitra bisnis Perseroan atas kepercayaan dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Dewan Komisaris, komite terkait, dan setiap karyawan yang tanpa lelah berkontribusi pada pertumbuhan Perseroan. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kami kepada Pemerintah, regulator, dan masyarakat. Perseroan berkomitmen untuk menjadi warga korporasi yang terhormat dan mewujudkan visinya untuk menciptakan nilai dan perbedaan.

Atas nama Direksi
Jakarta, 29 Juni 2020

Nobel Tanihaha
Direktur Utama

Profil Direksi



1. **Nobel Tanihaha**
Direktur Utama
2. **Juliawati Gunawan**
Direktur
3. **Tommy Gustavi Utomo**
Direktur Independen





1



Nobel Tanihaha Direktur Utama

Usia	45 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan - RUPS 22 Mei 2014 - RUPS 29 Mei 2015 - RUPS 23 Mei 2017	
Ruang Lingkup Penugasan Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan	
Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California (1996)	
Riwayat Jabatan - Direktur Vikay Group yang bergerak di bidang properti (1997-2000) - Direktur PT Sekawan Abadi Prima (2006-sekarang) - Direktur PT Jaring Lintas Indonesia (2006-sekarang) - Direktur PT Kharisma Agung Grahanusa (2007-sekarang) - Direktur Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2006-sekarang)	

2



Juliawati Gunawan Direktur

Usia	49 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan - RUPS 22 Mei 2014 - RUPS 29 Mei 2015 - RUPS 23 Mei 2017	
Ruang Lingkup Penugasan Bertanggung jawab atas bidang keuangan	
Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara (1993)	
Riwayat Jabatan - Auditor dan Konsultan di Prasectio, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) dan Ernst & Young Indonesia (1992-2003) - Financial Controller PT Solusi Tunas Pratama (2009-Juni 2011) - Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (Juni 2011-sekarang)	



Tommy Gustavi Utomo

Direktur Independen

Usia	50 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017

Ruang Lingkup Penugasan

Bertanggung jawab atas bidang pelaksanaan dan pengembangan proyek

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1994)
- Memperoleh gelar Master Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006)

Riwayat Jabatan

- Berkarier di Bangun Cipta Sarana Group (1995-1998)
- Berkarier di Sahid International Group dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (1998-2004)
- Berkarier di PT Netwave Multi Media (2004-2006)
- General Manager Project Site Acquisition PT Bakrie Telecom Tbk (2006-2012)
- Kepala Bagian Manajemen Properti PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2012-2013)
- Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2013-sekarang)



Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan 2019

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. tahun 2019 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, 29 Juni 2020

Dewan Komisaris

Jeffrey Yuwono
Komisaris Utama

Ludwig Indrawan
Wakil Komisaris Utama

Thong Thong Sennelius
Komisaris

Erry Firmansyah
Komisaris Independen

Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen

Direksi



Nobel Tanihaha
Direktur Utama



Juliawati Gunawan
Direktur

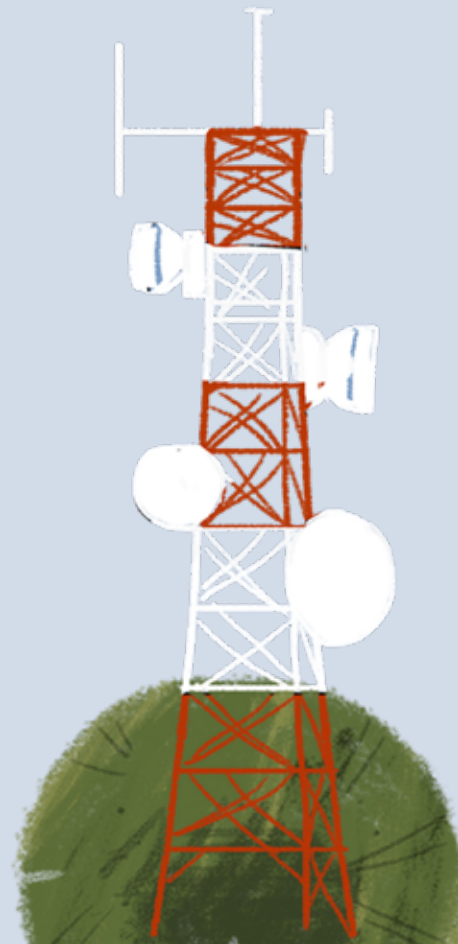
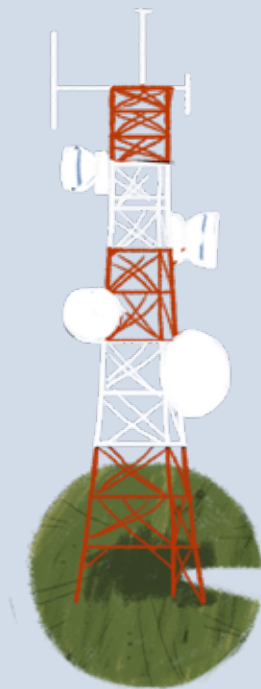


Tommy Gustavi Utomo
Direktur Independen



03

Profil Perusahaan



Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Bidang Usaha Utama	PT Solusi Tunas Pratama Tbk. bergerak di bidang usaha penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.
Status Perusahaan	Perusahaan Terbuka
Tanggal Pendirian	27 September 2006
Landasan Hukum Pendirian	1. Akta Pendirian No.5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. 2. SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006. 3. Tanda Daftar Perusahaan No.090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/v/2007 tanggal 16 Mei 2007. 4. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.
Kode Saham	SUPR
Bursa Saham	Bursa Efek Indonesia
Modal Dasar	2.000.000.000 lembar saham atau setara dengan Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor	Rp113.757.969.800 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Hubungan Investor	T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5795 0077 E : corporate.secretary@stptower.com
Alamat Lengkap	
Kantor Pusat	Kantor Perwakilan
Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia Kontak Kami T : +62 21 57940688 F : +62 21 57950077 Layanan pelanggan 24 jam: 0-800-140-1380 (bebas biaya) E-mail: corporate.secretary@stptower.com Situs: www.stptower.com	Kantor Perwakilan Bandung Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracandong Bandung 40275 T : +62 22 733 3328 F : +62 22 733 3329
	Kantor Perwakilan Medan Komplek Centrium No. 53 Jl. Brigjend Katamso Medan 20151 T : +62 61 8881 6041 F : +62 61 8881 5874
	Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya T : +62 31 567 7996 F : +62 31 567 9006

Tentang STP

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dari segi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki. Awalnya bisnis inti Perseroan fokus pada penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antena dan perangkat pendukung lain kepada operator telekomunikasi, yang dikenal dengan *Base Transceiver Station* (BTS) dengan skema perjanjian kontrak sewa jangka panjang yang rata-rata berjangka waktu sekitar 10 tahun.

Saat ini, Perseroan sudah memperluas layanan infrastruktur dengan menambah penyediaan layanan akses terhadap kapasitas backhaul serat optik dan juga jaringan *indoor Distributed Antenna System* (DAS) di berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang terletak di kota-kota besar. Langkah strategis Perseroan tersebut dilakukan sejalan dengan proses transformasi Perseroan yang sudah dimulai sejak tahun 2012 untuk menjadi perusahaan penyedia layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa penyewaan menara dan penyediaan kapasitas *backhaul* serat optik sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia karena sejalan dengan misi operator telekomunikasi yang berupaya memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kapasitas dan cakupan jaringan, namun sekaligus harus mengendalikan anggaran belanja modal mereka. Perseroan juga percaya bahwa permintaan terhadap kapasitas jaringan serat optik akan tetap bertumbuh sebagai hasil dari permintaan layanan data yang akan terus meningkat.

Perseroan telah memiliki aset menara telekomunikasi di seluruh 34 provinsi di Indonesia di mana sebesar 87% aset menara telekomunikasi Perseroan terletak di Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia.

Per 31 Desember 2019, Perseroan tercatat memiliki 6.384 menara dengan 11.154 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,75. Selain itu, Perseroan juga memiliki 2 *shelter-only sites*, 38 jaringan *Indoor DAS*, serta lebih dari 3.000 km panjang jaringan kabel serat optik di seluruh Indonesia termasuk 1.964 km di daerah Jabodetabek.





Visi, Misi dan Nilai-nilai inti Perusahaan

Visi

Menciptakan
nilai dan
perbedaan

Misi

Mempertahankan pertumbuhan
yang menguntungkan
melalui inovasi,
kualitas dan komitmen

Budaya Kerja Perseroan

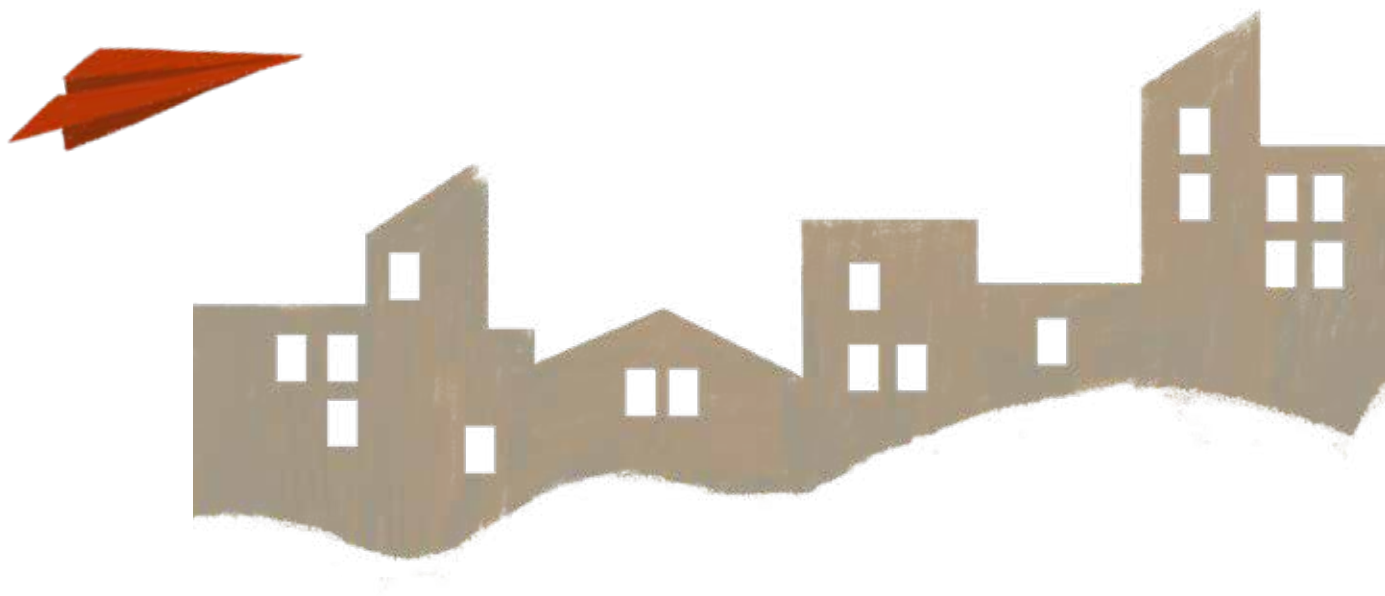
Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, Manajemen menghimbau seluruh insan Perseroan untuk selalu menanamkan tata nilai inti Perseroan serta menerapkan budaya kerja yang dinamis dan inovatif dengan mengutamakan hasil pencapaian atau kinerja (*result oriented*) dari masing-masing individu yang tentunya menentukan kinerja tim secara kolaboratif.

Nilai-Nilai Inti Perseroan

Nilai Inti Perusahaan	Terpercaya	Dinamis	Menyenangkan	Inovatif	Kerja Sama Tim
	Kita dapat diandalkan dan dipercaya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan.	Kita terbuka kepada perubahan; bertindak dengan antusias dan percaya diri.	Kami menciptakan suasana menyenangkan di pekerjaan kami.	Kita berinisiatif untuk selalu kreatif dalam mencari solusi paling efektif dalam segala yang kita lakukan.	Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memiliki satu visi dan mencapai tujuan yang sama.
Indikator Perilaku	- Loyal. - Berkomitmen. - Jujur. - Kompeten. - Rasa Memiliki.	- Berpikir cepat dan bertindak cermat. - Percaya diri. - Proaktif dan <i>self-driven</i>. - Beradaptasi.	- Membuat orang lain senang. - Bekerja dengan semangat. - Berpikir positif. <i>Work-life balance</i>.	- Fokus pada solusi. - Perbaikan berkesinambungan. - Berani berbeda. - Berpikir ke depan.	- Komunikasi yang efektif. - Menghormati, mendukung dan mempercayai satu sama lain. <i>Sense of belonging</i>. - Ingin berbagi. - Kontribusi positif.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.





Tonggak Sejarah

2006

- Perseroan berdiri pada tanggal 27 September 2006 dengan nama PT Solusi Tunas Pratama.

2007

- Mengakuisisi 528 menara telekomunikasi dalam konstruksi yang kemudian disewakan secara tidak langsung kepada PT Axis Telecom.

2008

- Mulai beroperasi secara komersial.
- Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (Master Lease Agreement/MLA) dengan PT Bakrie Telecom Tbk.

2014

- Perseroan mengakuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata dan 142 menara telekomunikasi dari perusahaan menara independen.
- Pada 19 Desember, Perseroan mendapat Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.

2013

- Berekspansi dalam bisnis Indoor Distributed Antenna System (Indoor DAS).
- Memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dengan keseluruhan fasilitas berjumlah US\$192,5 juta dan Rp1,3 triliun, yang sebagian digunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi sebelumnya yang diperoleh tahun 2011 dan sisanya untuk pengembangan barang modal dan modal kerja.

2015

- Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas II sejumlah 343.165.024 saham baru dengan harga Rp7.000 per saham. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi biaya emisi) sebesar Rp2.402.155.168.000.
- Menerbitkan obligasi US\$300 juta 6,25% Senior Notes Due 2020 sebesar US\$300 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).
- Menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi berupa Term Loan Facility sebesar US\$315 juta dan Fasilitas Kredit Revolving sebesar US\$10 juta dan Rp530 miliar.

2016

- Sebagai bagian dari program Transformasi Perseroan melalui pendekatan pembenahan menyeluruh, STP melakukan penajaman Nilai Inti Perusahaan dengan menambah 1 (satu) nilai inti menjadi: Innovative, Dynamic, Positive, Trustworthy, Fun, Reliable
- Pada tanggal 19 September, Perseroan melakukan skema pembiayaan kembali fasilitas pinjaman sindikasi tahun 2015 dengan skema pinjaman berjangka sebesar US\$225 juta, pinjaman berjangka sebesar Rp1.050 miliar dan fasilitas revolving Rp580 miliar.

2009

- Mengakuisisi 543 portofolio menara dari PT Bakrie Telecom Tbk.
- Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (MLA) dengan PT Indosat Tbk, PT Smart Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.

2010

Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (MLA) dengan PT Axis Telekom Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL), PT First Media Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications).

2011

- Memperoleh pinjaman sindikasi dengan jumlah keseluruhan fasilitas berjumlah Rp1,08 triliun.
- Melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 100 juta saham baru dengan harga Rp3.400 per saham. Jumlah keseluruhan perolehan dana (sebelum dikurangi harga emisi) berjumlah Rp340 miliar.
- Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2011.
- Mengakuisisi 100% penyertaan saham dalam PT Sarana Inti Persada, sebuah perusahaan penyedia menara independen di Bandung.

2012

- Berekspansi dalam bisnis jaringan kabel serat optik dan microcell pole (Outdoor DAS).

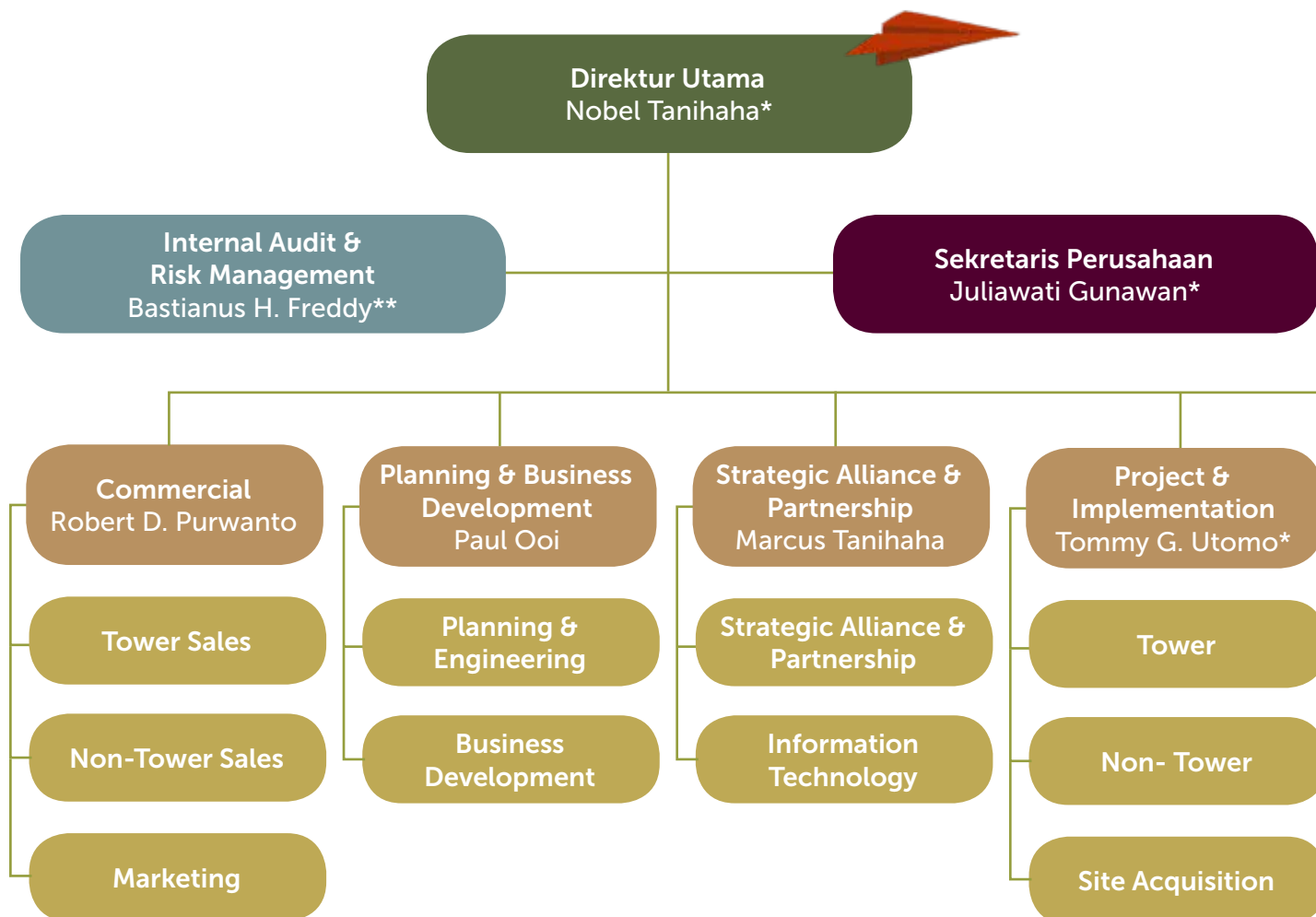
Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas I sejumlah 135 juta saham baru seharga Rp4.800 per saham dengan 59,4 juta waran yang melekat pada saham baru tersebut. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi harga emisi) dari penerbitan saham baru dan konversi waran adalah sebesar Rp933 miliar.

- Mengakuisisi 521 menara telekomunikasi dari PT Hutchison 3 Indonesia dan dari perusahaan penyedia menara independen.

2018

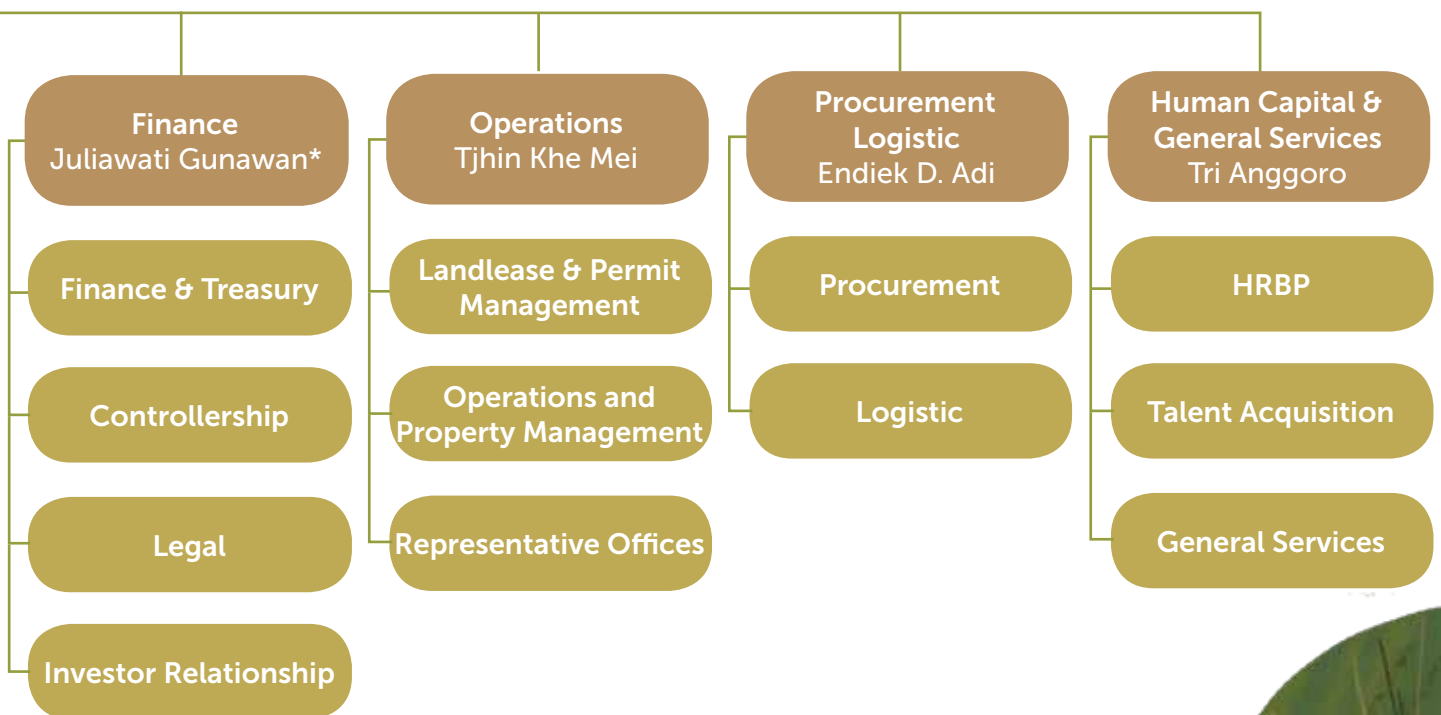
Pada bulan Februari 2018, Perseroan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman yang berupa fasilitas Term Loan USD sebesar US\$ 297 juta dan fasilitas Term Loan and Revolving Loan IDR sebesar Rp3.850 miliar. Kemudian pada bulan Juni 2018 Perseroan mendapatkan opsi untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar US\$20 juta

Struktur Organisasi



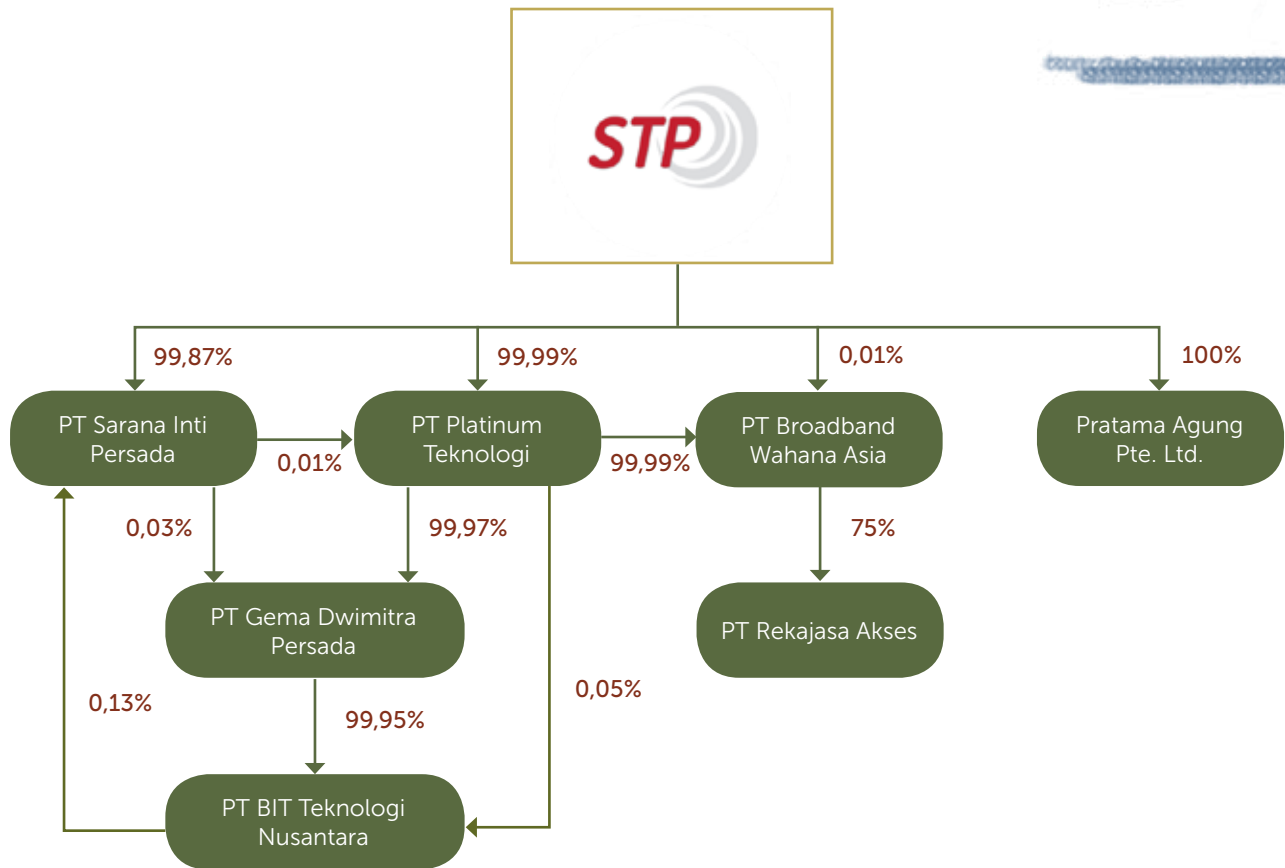
*Merupakan Direktur Perseroan yang diangkat melalui RUPS dan tercantum dalam akta Perseroan

**Resmi menjabat sejak 27 Mei 2020, menggantikan Tissa Purnama yang mengundurkan diri sejak tanggal 17 September 2019





Struktur Grup Perusahaan





Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting bagi keberlanjutan usaha Perseroan. Melalui Unit SDM, Perseroan merencanakan, mengatur dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif secara berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan bermanfaat. Perseroan mengedepankan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan andal sehingga diharapkan dapat menginspirasi dan menghasilkan karya-karya

yang berdampak positif terhadap kelangsungan bisnis Perseroan, dan juga bagi kemajuan pelanggan serta masyarakat luas.

Guna memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis, Perseroan senantiasa mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang akan diperlukan di masa mendatang melalui pengembangan sumber daya manusia.

Prosedur Seleksi dan Rekrutmen Karyawan

Seiring dengan perkembangan bisnis dan dinamika industri maka Perseroan menerapkan beberapa strategi di mana Perseroan terus memperbaiki dan mengkaji jalur rekrutmen yang ada untuk mendapatkan individu-individu terbaik melalui kerja sama dengan Institusi *Headhunter*, jaringan online professional networking yaitu LinkedIn, dan juga melalui situs STP.

Program rekrutmen dirancang untuk menarik para talenta terbaik di seluruh tingkatan di mana program ini bertujuan untuk menyeleksi karyawan dan menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi masing-masing dan mampu

dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja Perseroan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kesempatan berkariir secara adil. Kami menghargai keberagaman dalam jajaran tenaga kerja kami, karena Perseroan sadar bahwa memiliki karyawan yang berbeda jenis kelamin, usia, latar belakang dan perspektif akan menguntungkan bagi Perseroan.

Kami menerapkan budaya inklusif dan kesetaraan ini ke dalam semua aspek kerja, termasuk perekrutan, pengembangan karir, promosi dan kompensasi.

Acara Perayaan Tahun Baru



Donor Darah Karyawan STP Group



Komposisi Karyawan

Pada tahun 2019, Perseroan merekrut 35 karyawan baru dari jumlah total 390 karyawan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Perseroan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya yang sebesar 355 karyawan. Adapun komposisi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Perusahaan	Direktur & Setara Direktur	Kepala Divisi	Kepala Departemen	Kepala Seksi	Officer	Staff	Non Staff	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	1	9	21	39	40	3	5	118
PT Sarana Inti Persada	-	-	-	4	12	-	-	16
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	4	18	30	60	99	7	24	242
PT Rekajasa Akses	1	1	2	-	7	3	-	14
Jumlah	6	28	53	103	158	13	29	390

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Perusahaan	Pasca Sarjana	Sarjana Strata 1	Diploma	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Pertama	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	12	82	12	12	-	118
PT Sarana Inti Persada	-	12	4	-	-	16
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	9	160	31	34	8	242
PT Rekajasa Akses	1	9	3	1	-	14
Jumlah	22	263	50	47	8	390

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Perusahaan	Karyawan Tetap	Karyawan Kontrak	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	89	29	118
PT Sarana Inti Persada	10	6	16
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	195	47	242
PT Rekajasa Akses	14	-	14
Jumlah	308	82	390

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Perusahaan	<=25	>25-35	>35-40	>40-50	>50	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	5	51	29	31	2	118
PT Sarana Inti Persada	3	12	-	1	-	16
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	11	87	60	67	17	242
PT Rekajasa Akses	1	5	6	2	-	14
Jumlah	20	155	95	101	19	390

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

Perusahaan	Wanita	Pria	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	31	87	118
PT Sarana Inti Persada	8	8	16
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	68	174	242
PT Rekajasa Akses	5	9	14
Jumlah	112	278	390

Budaya Kerja

Perseroan berkomitmen untuk menganut 5 (lima) nilai inti Perseroan yang merupakan fondasi untuk memperkuat budaya Perseroan. Kelima tata nilai Perseroan tersebut mencakup: Terpercaya, Dinamis, Menyenangkan, Inovatif, dan Kerja Sama Tim. Perseroan mengadopsi pendekatan holistik dalam perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan, serta menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan membudidayakan nilai-nilai inti untuk menjadi dasar dari tindakan dan bentuk budaya Perseroan.

Perseroan membangun kesadaran mengenai nilai-nilai tersebut beserta perilaku standar yang ditetapkan, dengan

mengadakan sesi orientasi sebagai sarana sosialisasi kepada seluruh karyawan baru.

Selain itu, Perseroan juga senantiasa memberikan penyegaran dan menyelinapkan nilai-nilai inti Perseroan pada momen-momen tertentu seperti:

- *New Fiscal Year Gathering* yang merupakan ajang pengungkapan pencapaian target Perseroan pada tahun sebelumnya dan mengkomunikasikan target tahun berjalan kepada seluruh karyawan.
- Town hall meeting yang merupakan ajang *review* atas pencapaian Perseroan atas target tengah tahunan.

STP Culture

Sebagai bentuk penerapan budaya perusahaan dan juga menjalankan konsep *work-life balance*, Perseroan memasukitahunketigapenyelenggaraankegiatan tahunan yang bernama STP Culture. Dalam kegiatan ini, karyawan dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan menjalankan proyek atau berkompetisi mengumpulkan point dalam *event-event* yang diselenggarakan perusahaan. Adapun kelompok yang berhasil mengumpulkan point terbanyak pada kegiatan STP Culture akan mendapatkan apresiasi tersendiri.

Di tahun 2019, STP Culture mengambil tema "Be Your Own Hero", di mana setiap karyawan diajak untuk semakin sadar akan kesehatannya masing-masing. Tema "Be Your Own Hero" mengajak setiap orang untuk sadar bahwa kitalah yang harus berjuang untuk kesehatan kita sendiri.

Penilaian kerja karyawan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester. Sistem penilaian yang dilakukan adalah dengan pendekatan *Management by Objective* (MBO).

1. Apresiasi
Perseroan memberikan apresiasi (*reward*) bagi setiap karyawan yang diukur berdasarkan kinerja masing-masing. *Reward* yang dimaksud adalah berupa insentif dan biasanya diberikan di tengah dan akhir tahun saat proses appraisal karyawan oleh divisi SDM.
2. Sanksi
Dalam pelaksanaannya, mekanisme sanksi dijalankan secara normatif, di mana setiap karyawan yang terbukti melanggar peraturan dan etika kerja yang berlaku, maka akan menerima teguran dan/atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Strategi Remunerasi
Dalam menetapkan besaran remunerasi, Perseroan selalu melihat kondisi bisnis dan tren industri. Hal ini secara otomatis memposisikan Perseroan sebagai perusahaan yang memiliki kompensasi dan benefit yang kompetitif. Dalam hal ini Perseroan juga selalu melakukan review kinerja setiap tahunnya.

Perseroan selalu berupaya untuk menerapkan pemberian kompensasi yang adil. Perseroan menyadari bahwa tenaga kerja dengan keahlian khusus, termotivasi, dan mampu berinteraksi dengan baik sangatlah penting bagi pencapaian sasaran pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan memberikan remunerasi kepada karyawannya berdasarkan peran dan tanggung jawab, masa kerja dan penilaian kinerja berupa gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Sistem penggajian ditetapkan oleh

Perseroan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan dan standar penggajian yang kompetitif di pasar tenaga kerja khususnya untuk industri terkait.

Perseroan juga senantiasa mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mengedepankan kesetaraan remunerasi dengan tidak membedakan jumlah remunerasi berdasarkan gender, melainkan kepada jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja individu.

Struktur remunerasi karyawan Perseroan dikaji ulang setiap tahunnya untuk disesuaikan dengan situasi di pasar sehingga dapat terus bersaing dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Struktur remunerasi Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum regional (UMR).

Ketentuan mengenai remunerasi dan manfaat yang diterima karyawan tersebut tercantum secara formal dalam Perjanjian Kerja Karyawan. Khusus untuk karyawan wanita, Perseroan memberikan istirahat melahirkan selama total 3 (bulan). Perseroan juga memberikan izin cuti meninggalkan pekerjaan bagi karyawan pria karena kelahiran anak.

Komitmen Perseroan untuk melindungi karyawan juga dilakukan dengan memberikan paket manfaat yang komprehensif dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Manfaat ini meliputi:

- Manfaat kesehatan;
- Cuti hamil dan melahirkan;
- Dana pensiun;
- Tunjangan hari raya; dan
- Manfaat lainnya untuk karyawan dan keluarga inti karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan mewujudkan keberlanjutan usaha. Sehingga sebagai perwujudan dari komitmen tersebut maka Perseroan menyusun program-program pengembangan karyawan yang dilakukan secara internal melalui *on the job training* dengan pengawasan dari masing-masing atasan dan juga

secara eksternal dengan materi pelatihan yang dipilih untuk dapat mengembangkan kompetensi yang relevan. Di tahun 2019, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp500.124.753 untuk program pelatihan bagi karyawan Perseroan. Adapun program-program pelatihan yang dijalankan Perseroan selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelatihan SDM Tahun 2019

No	Bulan	Jenis Training	Nama Training	Penyelenggara
1	Januari	Internal - Project	Leadership Transformation Program: Team Coaching Session	Duage Management
2	Februari	Internal	Professional Project Management	DCO Learning
3	April	Sharing Session	Finance Talk	CIMB Team
4	April	Pelatihan Publik	Asset Management	Bina Management Center
5	Mei	Internal - Project	Individual Coaching	Duage Management
6	Juni	Internal	Effective Communication	HUMAN CAPITAL
7	Juni	Internal	Commercial Training	Product Team
8	Agustus	Internal	Pakta Integritas	Tri Anggoro
9	Agustus	Internal	PMO Workshop	Magna QM
10	Agustus	Internal	One Strong Team Workshop	Planning & Commercial Team
11	Agustus	Pelatihan Publik	Strategi Penagihan Piutang Bermasalah	P. Hadisaputro
12	September	Pelatihan Publik	Penyelesaian Sengketa Surety Bond (Advance Payment Bond, Performance Bond & Retention Bond)	Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia (PPHBI)
13	14 - 15 Oktober	Pelatihan Publik	Enterprise Risk Management (ERM) by COSO Framework Approach & Risk Based Audit (RBA)	DPS Consulting
14	September	Internal	Training PSAK	E&Y
15	September	Internal	Negotiation Skill	HCGS
16	Oktober	Internal	Effective Communication (Batch 1)	Septiandi & Yasmin Firoh
17	November	Internal	Leader as a Coach	Tri Anggoro & Frans Dedi
18	Desember	Internal	Networking with Smart Communication	Amir Faisal
19	Desember	Internal	HR Leader as a Strategic Business Partner SDM Unggul Indonesia Maju	Dewas Menyapa Indonesia

Kesetaraan dan Keberagaman

Terkait pengembangan sumber daya manusia, Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan yang adil (*fair*) dan juga senantiasa menjamin kesempatan berkarier yang sama bagi karyawan pria maupun wanita. Hal ini antara lain didukung dengan sistem jenjang karier yang didasarkan pada kualifikasi jabatan, kompetensi karyawan yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, dan masa kerja. Perseroan menilai pengembangan karier merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap karyawan, meningkatkan sikap kerja, serta menciptakan kepuasan kerja demi mencapai tujuan perusahaan.

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama di dalam Perseroan, dengan tidak memandang jenis kelamin, latar belakang, agama, atau etnis. Setiap keputusan dalam melakukan perekrutan, pelatihan, promosi, dan kompensasi didasarkan semata-mata pada kriteria yang objektif sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan dan kinerja karyawan.

Jalur Komunikasi Informasi Bagi Karyawan

Perseroan menyadari bahwa penyampaian informasi yang efektif dapat membantu Perseroan merealisasikan visi dan misinya. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan karyawan, antara lain melalui jalur komunikasi email, sosialisasi langsung atau tatap muka dengan karyawan, serta town hall meeting.

Di tahun 2019, sebagai ajang komunikasi antara karyawan dengan pihak manajemen sekaligus sebagai forum untuk sosialisasi rencana bisnis dan strategi perusahaan maka Perseroan menyelenggarakan aktivitas sebagai berikut:

1. New Year Gathering (1 Februari 2019)

Acara ini merupakan tradisi STP Group dalam menyambut Tahun Baru di mana seluruh karyawan diundang untuk makan bersama. Selain sebagai perayaan, acara ini juga menjadi ajang beramah

tamah dan silaturahmi antara karyawan. Selain itu acara ini juga diisi dengan *Town Hall Meeting*, di mana pihak manajemen menyampaikan pencapaian target tahun sebelumnya dan mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan target tahun berjalan dan juga update program perusahaan.

2. Buka Puasa Bersama (24 Mei 2019)

Acara rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Sebelum berbuka bersama, acara diawali dengan siraman rohani/coaching/talkshow yang diikuti oleh seluruh karyawan.

3. STP 13th Anniversary (22 November 2019)

Kegiatan ini merupakan acara selebrasi ulang tahun Perseroan yang ke-13. Selain makan malam dan ramah tamah, acara ini juga sebagai kegiatan puncak pemberian penghargaan untuk kegiatan STP Culture yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2019.

Acara Buka Puasa Bersama



Acara Ulang Tahun STP ke-13





Work-Life Balance di Lingkungan Kerja Perseroan

Perseroan sangat memperhatikan keseimbangan antara pola kerja dengan pola hidup masing-masing karyawannya. Perseroan selalu mendukung bahwa keluarga karyawan adalah prioritas utama sehingga Perseroan senantiasa mengedepankan tingkat fleksibilitas waktu kerja bagi pegawai tetap, waktu kerja bagi pegawai paruh waktu, dan waktu cuti untuk pegawai laki-laki setelah istrinya melahirkan.

Upaya untuk menciptakan lingkungan serta suasana kerja yang seimbang antara bekerja dengan aktivitas pribadi (*work and life balance*) terwujud dalam kegiatan yang mengekspresikan aspirasi rohani dan hobi. Kegiatan tersebut diwadahi oleh Perseroan dengan menyediakan fasilitas ibadah seperti mushola dan juga fasilitas olah raga seperti *gym* atau pusat kebugaran.

Tidak hanya didukung dengan fasilitas, Perseroan juga menyelenggarakan kelas olah raga (*Wellness Class*) setiap sore, setelah usai jam kerja. Setiap karyawan dapat mengikuti kelas Muay Thai, Yoga, Zumba, atau Futsal dan mendapatkan poin untuk STP Culture jika mengikuti kelas-kelas tersebut.

Serangkaian upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki keseimbangan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di STP. Perseroan percaya bahwa kenyamanan lingkungan kerja juga menjadi tolak ukur kepuasan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, Perseroan selalu berusaha memfasilitasi pengelolaan lingkungan kerja melalui *work flow* yang nyaman dan seimbang demi memaksimalkan produktivitas serta kinerja setiap karyawan.

Teknologi Informasi

Di era industri 4.0, teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat kian membentuk industri dan memberikan keunggulan kompetitif yang kuat bagi perusahaan yang dapat mengikuti tren tersebut. Begitu pula halnya di Perseroan, teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting yang mendukung operasional Perseroan.

Perkembangan teknologi informasi di Perseroan berada di bawah tanggung jawab Divisi Teknologi Informasi (TI). Divisi TI memiliki visi untuk menjadi *business enabler* untuk memberdayakan STP Group agar dapat mencapai objektif bisnisnya dengan menyediakan sistem yang kuat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Divisi TI memiliki misi memberikan solusi TI yang strategis untuk STP Group agar mendukung pertumbuhan yang menguntungkan melalui otomatisasi sistem, kebijakan, dan peningkatan proses.

Di tahun 2019, pengembangan teknologi informasi di Perseroan difokuskan pada upaya memperbarui, meningkatkan, serta menstabilkan sistem ERP. Selain itu Perseroan juga memperkuat infrastruktur jaringannya. Adapun rencana pengembangan teknologi informasi untuk tahun 2020 akan difokuskan pada upaya meningkatkan keamanan data memanfaatkan teknologi untuk efisiensi proses bisnis.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham	Per 31 Desember 2019			Per 31 Desember 2018		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
PT Kharisma Indah Prima	491.384.554	49.138.455.400	43,20	491.384.554	49.138.455.400	43,20
Cahaya Anugrah Nusantara Holdings Ltd	290.228.868	29.002.288.660	25,51	290.228.868	29.002.288.660	25,51
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600	0,03	359.596	35.959.600	0,03
Masyarakat (<5%)	355.606.680	35.560.668.000	31,26	355.606.680	35.560.668.000	31,26
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00

Kronologi Pencatatan Saham

Penawaran Umum Perdana

Pada 29 September 2011, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp3.400 per saham. Seluruh saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana digunakan untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada 8 Agustus 2012, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp4.800 per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 dengan masa berlaku pelaksanaan 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015. Sampai dengan masa pelaksanaan berakhir, Perseroan menerbitkan 59.415.534 waran. Saham-saham dan waran ini tercatat pada BEI. Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi, dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas II

Pada 19 Desember 2014, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp7.000 per saham. Seluruh saham dari penawaran umum ini telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, pada bulan Januari 2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (setelah pertemuan antara pinjaman pemegang saham Perseroan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyetoran modal) digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Pada tahun 2015, Pratama Agung Pte. Ltd., entitas anak telah berhasil menerbitkan obligasi sebesar USD 300 juta dengan kupon 6.25% berjangka waktu 5 tahun (Surat Utang) dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 25 Februari 2015. Obligasi ini bernama USD 300 million 6.25% Senior Notes Due 2020 dan merupakan obligasi internasional perdana yang diterbitkan oleh grup Perseroan dan telah diperdagangkan. Pada tanggal 28 Maret 2018, Perseroan telah melunasi penuh obligasi ini.

Informasi Tentang Entitas Anak

Entitas Anak dan Struktur Kepemilikannya

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung (%)	Tahun Penyertaan
Kepemilikan Langsung				
1.	PT Sarana Inti Persada	Pengelolaan dan Penyewaan Menara BTS	100,0	2011
2.	PT Platinum Teknologi	Investasi	100,0	2012
3.	Pratama Agung Pte. Ltd.	Investasi	100,0	2013
4.	PT Broadband Wahana Asia	Investasi	100,0	2016
Kepemilikan Tidak Langsung				
1.	PT Gema Dwimitra Persada (melalui PT Platinum Teknologi)	Perdagangan	100,0	2012
2.	PT Bit Teknologi Nusantara (melalui PT Gema Dwimitra Persada dan PT Platinum Teknologi)	Penyewaan Microcell dan Jasa Jaringan Kabel Serat Optik	100,0	2012
3.	PT Rekajasa Akses (melalui PT Broadband Wahana Asia)	Penyedia Layanan Data	75,0	2016



Nama dan Alamat Entitas Anak serta Kantor Perwakilan

Alamat Lengkap

Kantor Pusat	Kantor Perwakilan
Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia Kontak Kami Telepon : +62 21 57940688 Faksimili : +62 21 57950077 Layanan pelanggan 24 jam: 0-800-140-1380 (bebas biaya) E-mail: corporate.secretary@stptower.com Situs: www.stptower.com	Kantor Perwakilan Bandung Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracondong Bandung 40275 T : +62 22 733 3328 F : +62 22 733 3329
	Kantor Perwakilan Medan Komplek Centrium No. 53 Jl. Brigjend Katamso Medan 20151 T : +62 61 8881 6041 F : +62 61 8881 5874
	Kantor Perwakilan Surabaya Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya T : +62 31 567 7996 F : +62 31 567 9006

Entitas Anak

PT Bit Teknologi Nusantara Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5794 1278 www.bit-teknologi.com	PT Sarana Inti Persada Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracondong – Bandung, Jawa Barat 40275 T : +62 22 733 3328 F : +62 22 733 3329
PT Platinum Teknologi Perkantoran Permata Senayan Blok C23 Lt. 3 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5795 0077	PT Gema Dwimitra Persada Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0688 F : +62 21 5795 0077
PT Broadband Wahana Asia Perkantoran Permata Senayan Blok F8-9 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0966 F : +62 21 5794 0977	PT Rekajasa Akses Perkantoran Permata Senayan Blok F8-9 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 T : +62 21 5794 0966 F : +62 21 5794 0977 www.acsata.com
	Pratama Agung Pte. Ltd. 7 Straits View #12-00 Marina One East Tower Singapore (018936)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(Member Firm of RSM Network)
Plaza ASIA Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350
STTD : No.212/BL/STTD-AP/2012 tanggal 17
Desember 2012
Keanggotaan Asosiasi: Anggota IAPI No. 1546
Surat Penunjukan: 0081014/BN/104/EL Tanggal 2 Oktober
2014

Jasa yang diberikan:
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan
bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam
Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan audit yang
dilakukan.

Periode Penugasan:
Tahun Buku 2019

Konsultan Hukum

Makes & Partners
Menara Batavia
Jl. K.H Mas Mansyur Kav. 126
Tanah abang, Jakarta Pusat 10220
T +62 21 574 7181
STTD : STTD.KH-145/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi: Keanggotaan HKHPM No. 200924
Surat Penunjukan: 0063R/MP/Acc-inv/LN/05/19

Jasa yang diberikan:
Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai
Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan
Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan
dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara
objektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi,
dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Periode Penugasan:
Tahun Buku 2019

Notaris

Rini Yulianti, S.H.
Jl. H. Naman Raya No. 31
Pondok Kelapa
Jakarta 13450
T +62 21 864 1170
STTD : No.90/BL/STTD-N/2007
Keanggotaan Asosiasi : Berdasarkan Surat
Keterangan No.06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/
XI/2010 tanggal 2 November 2010
Surat Penunjukkan : 048A/DIR-STP/X/2014 tanggal 23
Oktober 2014

Jasa yang diberikan:
Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT II, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan dalam rangka PUT II kecuali rapat-rapat mengenai keuangan, penentuan harga, dan strategi pemasaran.

Periode Penugasan:
Tahun Buku 2019

Biro Administrasi Efek

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48
Jakarta 12930
T +62 21 252 5666
F +62 21 252 5028
STTD : No.Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September
1991 a/n PT Risjad Salim Registra
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi
Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004
Surat Penunjukkan : 048B/DIR-STP/X/2014 tanggal 23
Oktober 2014

Jasa yang diberikan:
Melaksanakan administrasi Daftar Pemegang Saham, menghitung HMETD, distribusi HMETD, administrasi pelaksanaan HMETD, deposit saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam sistem elektronik, melaksanakan penjabatan, menerbitkan formulir konfirmasi penjabatan, menyajikan laporan pelaksanaan HMETD dan menerbitkan Surat Kolektif Saham.

Periode Penugasan:
Tahun Buku 2019

Penghargaan & Sertifikasi

2013

Indonesian Platinum and Best Corporate Award 2013 (IPBCA)
The Best Tower Building Company of the Year



Warta Ekonomi
Indonesia Best New Emiten 2013



2015

Brand Finance plc
87th Most Valuable Indonesian Brands 2015
& US\$21 mil Brand Value & A+



2014

Anugerah Perusahaan Tbk 2014 oleh Economic Review

- Perusahaan Penunjang Telekomunikasi Independen Terbaik
- Peringkat ke-7 dalam kategori Perusahaan Terbaik di Bidang Konstruksi Non Bangunan



Warta Ekonomi

- Most Powerful & Valuable Company dalam kategori Bidang Konstruksi Non Bangunan



2016

Brand Finance plc
Ranked 94th in Most
Valuable Indonesian Brands
2016 with a US\$ 17 million
Brand Value & A- Brand
Rating'



2017

Warta Ekonomi
Indonesia Most Powerful
Companies Award (MPCA)
2017



Infobank
100 Fastest Growing
Companies 2017



2018

The Financial Times
dan Statista
FT 1000 High-Growth
Companies Asia-Pacific
2018





04

Analisis dan Pembahasan Manajemen





Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Perkembangan industri telekomunikasi di sepanjang tahun 2019 terbilang cukup baik, tercermin dari kinerja emiten sektor telekomunikasi. Setelah sebelumnya di tahun 2018 pemerintah menetapkan kebijakan registrasi prabayar yang berdampak pada pertumbuhan basis pelanggan, di tahun 2019 pemerintah memberlakukan kebijakan terkait IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang membuat operator selular mendapat tambahan pekerjaan baru dan berdampak pada pengeluaran belanja modal yang sangat besar untuk menjalankan aturan tersebut. Di sisi lain, perang harga mulai mereda meskipun aturan mengenai tarif layanan data belum kunjung dikeluarkan oleh Kominfo. Terlepas dari berbagai tantangan yang menghadang, industri telekomunikasi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan di tahun 2019.

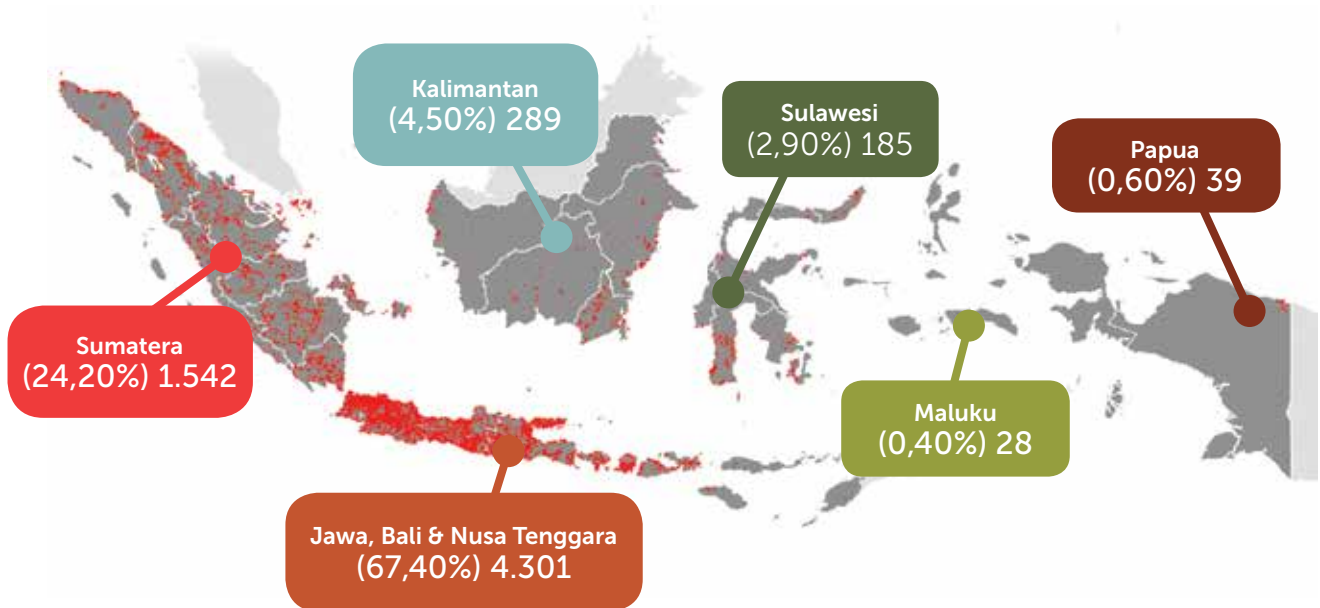
Sebagai salah satu dari perusahaan penyedia infrastruktur menara independen terbesar di Indonesia, perkembangan kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi dari kinerja pertumbuhan industri telekomunikasi. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar dan terpercaya di Indonesia, yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group, dan PT Indosat Tbk.

Saat ini, Perseroan telah mengoperasikan menara di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Mayoritas menara Perseroan terletak di pulau Jawa dan Sumatera di mana daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Perkembangan portofolio aset Perseroan selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Portfolio Aset Strategis	2019	2018*	2017
Site Portofolio Tower			
Jumlah Site Menara	6.384	6.412	6.895
Site Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS**	38	37	38
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	3.382	3.000	2.847
Penyewaan Site Menara	11.154	10.492	11.774
Rasio Penyewaan Menara	1,75x	1,64x	1,71x
Penyewaan Portofolio Non-Tower			
Site Shelter Only	2	2	2
Site Indoor DAS	68	54	63

*) Per akhir 2018, menara dan penyewaan di mana PT First Media Tbk/PT Internux tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan

**) Dihitung berdasarkan jumlah bangunan



Selain portofolio aset menara, Perseroan juga memiliki portofolio kabel serat optik darat yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Selain jaringan kabel serat optik darat, Perseroan juga memiliki jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa – Kalimantan, Pulau Jawa – Sumatera, dan Batam – Singapura.

Kami percaya bahwa keputusan Perseroan untuk ekspansi di jaringan serat optik akan memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi secara terintegrasi di Indonesia dan bersaing pada era digital saat ini. Ke depannya, Perseroan akan tetap berinovasi dan bertumbuh untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.





Kinerja Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2019	2018	Perubahan 2018-2019
Aset Lancar	1.764,6	2.073,5	(308,9)
Aset Tidak Lancar	9.400,2	9.597,0	(196,8)
Jumlah Aset	11.164,8	11.670,5	(505,7)
Liabilitas Jangka Pendek	1.567,0	1.536,2	30,8
Liabilitas Jangka Panjang	6.624,3	7.164,3	(540,0)
Jumlah Liabilitas	8.191,3	8.700,5	(509,2)
Jumlah Ekuitas	2.973,5	2.970,0	3,5

Aset Lancar

Per 31 Desember 2019, jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp1.764,6 miliar, menurun 14,9% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.073,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada piutang usaha sebesar 39,1%.

Aset Tidak Lancar

Per 31 Desember 2019, aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar Rp9.400,2 miliar, menurun sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9.597,0 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada piutang derivative sebesar 87,6%.

Jumlah Aset

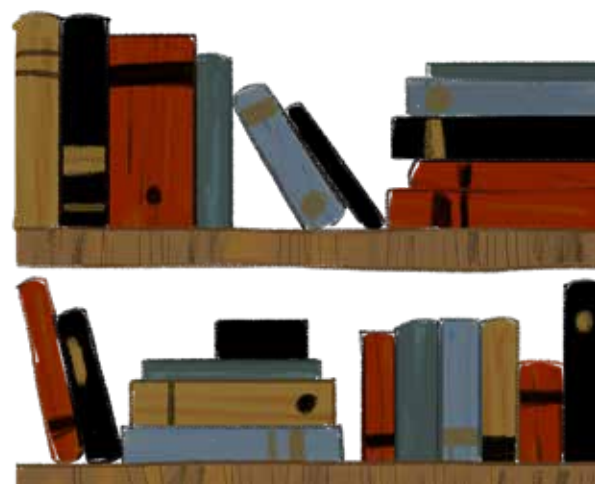
Berdasarkan pencapaian aset lancar dan aset tidak lancar sebagaimana dijelaskan di atas, jumlah aset Perseroan di tahun 2019 tercatat sebesar Rp11.164,8 miliar, atau menurun sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp11.670,5 miliar.

Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Desember 2019, liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp1.567,0 miliar atau meningkat sebesar 2,0% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.536,2 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada akrual dan utang bank sindikasi bagian lancar atas utang bank berjangka.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 7,5% menjadi Rp6.624,3 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7.164,3 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sindikasi berjangka.



Ekuitas

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2019	2018	Perubahan 2018-2019
Modal saham	113,8	113,8	-
Tambahan Modal disetor – bersih	3.589,8	3.589,8	-
Penghasilan komprehensif lainnya	(247,2)	(14,1)	(233,1)
Saldo laba (defisit)	(482,8)	(719,5)	236,7
Jumlah ekuitas	2.973,5	2.970,0	3,5

Di tahun 2019 jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 0,1% dari Rp2.970,0 miliar per 31 Desember 2018 menjadi Rp2.973,5 miliar per 31 Desember 2019.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo defisit dari Rp719,5 miliar di tahun 2018 menjadi Rp482,8 miliar di tahun 2019.

Laporan Keuangan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2019	2018	Perubahan 2018-2019
Pendapatan usaha	1.767,0	1.899,8	(132,7)
Laba bruto	1.274,9	1.421,1	(146,1)
Laba usaha	1.085,8	1.254,3	(168,5)
EBITDA	1.478,0	1.637,7	(159,7)
Laba (rugi) tahun berjalan	228,4	(1.223,8)	1.452,2
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	3,6	(1.123,5)	1.127,1

Pendapatan

Pendapatan usaha Perseroan terutama berasal dari penyewaan infrastruktur milik Perseroan yang terdiri dari penyewaan menara telekomunikasi, penyewaan infrastruktur penguat sinyal di gedung-gedung, dan juga penyewaan dan pemakaian kapasitas infrastruktur jaringan kabel serat optik. Jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.767,0 miliar di mana sekitar 88,7% pendapatan Perseroan pada

tahun tersebut tercatat berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group (termasuk PT Telekomunikasi Selular dan pendapatan dari *reseller* dengan PT Telekomunikasi Selular sebagai konsumen akhir), dan PT Indosat Tbk. Kualitas kredit yang kuat dari para pelanggan utama Perseroan serta ditambah dengan arus kas jangka panjang yang stabil merupakan beberapa faktor kunci dan menjadi keunggulan komparatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.



Sumber Pendapatan Perseroan berdasarkan Pelanggan

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	Tahun		Tahun	
	2019	%	2018	%
PT XL Axiata Tbk (XL)	648,2	36,7	751,0	39,5
PT Hutchison 3 Indonesia (H3I)	379,4	21,5	373,9	19,7
PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	350,2	19,8	343,9	18,1
PT Indosat Tbk (Indosat)	136,6	7,7	132,1	7,0
PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)	124,6	7,1	107,9	5,7
Lain-lain	128,0	7,2	191	10,1
Jumlah	1.767,0	100,0	1.899,8	100,0

Beban Pokok Pendapatan

Total beban pokok pendapatan pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,8% dari tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh peningkatan jasa keamanan dan lain-lain. Tabel berikut menunjukkan rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	Tahun		Tahun		Perubahan 2018-2019
	2019	% Terhadap Pendapatan	2018	% Terhadap Pendapatan	
Penyusutan dan amortisasi:					
Sewa lahan	189,2	10,7	184,8	9,7	4,4
Penyusutan aset tetap	152,6	8,6	150,7	7,9	1,9
Sewa jaringan serat optik	7,0	0,4	8,0	0,4	(1,0)
Perizinan	6,9	0,4	7,8	0,4	(0,9)
Lain-lain	12,5	0,7	8,3	0,4	4,2
Sub jumlah	368,2	20,8	359,6	18,9	8,6
Beban pokok pendapatan lainnya:					
Pemeliharaan dan perbaikan	64,0	3,6	68,8	3,6	(4,8)
Jasa keamanan dan lain-lain	59,9	3,4	50,3	2,6	9,6
Sub jumlah	123,9	7,0	119,1	6,3	4,8
Jumlah beban pokok pendapatan	492,1	27,8	478,7	25,1	13,4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komponen terbesar dari beban pokok pendapatan Perseroan di tahun 2019 adalah beban penyusutan dan amortisasi di mana beban tersebut merupakan biaya non kas. Beban amortisasi sewa lahan merupakan amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar di muka kepada pemilik lahan untuk lokasi pendirian menara telekomunikasi Perseroan. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sewa sesuai dengan perjanjian sewa yang berlaku. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain merupakan amortisasi biaya perizinan sesuai masa manfaat perizinan tersebut. Beban penyusutan aset tetap merupakan biaya penyusutan atas menara dan jaringan serat kabel optik beserta sarana pendukungnya, beban penyusutan instalasi jaringan Indoor DAS, dan aset tetap lainnya.

Sementara beban pemeliharaan dan perbaikan serta jasa keamanan dan lain-lain merupakan beban operasional yang timbul terkait pengoperasian aset Perseroan yang disewakan kepada pelanggan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan merupakan pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan laba bruto sebesar Rp1.274,9 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,3% dari tahun 2018 sebesar Rp1.421,1 miliar, serta margin laba bruto mengalami penurunan menjadi sebesar 72,2% dari 74,8% di tahun 2018.

Beban Usaha

Secara keseluruhan, beban usaha Perseroan di tahun 2019 mencapai Rp189,1 miliar di mana beban usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,4% dari Rp166,8 miliar pada tahun 2018. Beban usaha Perseroan terutama berasal dari beban gaji dan tunjangan yang tercatat meningkat sebesar 18,1% bila dibandingkan dengan tahun 2018 seiring dengan penambahan jumlah karyawan. Rincian beban usaha Perseroan dapat dilihat melalui tabel berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	Tahun		Tahun		Perubahan 2018-2019
	2019	% Terhadap Pendapatan	2018	% Terhadap Pendapatan	
Penyusutan dan amortisasi:					
Amortisasi	19,9	1,1	16,8	0,9	3,1
Penyusutan aset tetap	4,1	0,2	7,0	0,4	(2,9)
Sub jumlah	24,0	1,4	23,8	1,3	0,2
Beban usaha lainnya:					
Gaji dan tunjangan	124,1	7,0	105,1	5,5	19,0
Perjalanan dan akomodasi	11,0	0,6	9,8	0,5	1,2
Imbalan pasca kerja	9,3	0,5	9,1	0,5	0,2
Perlengkapan dan biaya kantor lainnya	8,2	0,5	8,8	0,5	(0,6)
Pemasaran	6,4	0,4	4,5	0,2	1,9
Jasa profesional	6,1	0,3	5,6	0,3	0,5
Sub jumlah	165,1	9,3	143,0	7,5	22,1
Jumlah beban usaha	189,1	10,7	166,8	8,8	22,3



Laba Usaha

Pada tahun 2019, laba usaha Perseroan tercatat sebesar Rp1.085,8 miliar atau menurun jika dibandingkan dengan laba usaha pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.254,3 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban pokok pendapatan sebesar 2,8% dan beban usaha sebesar 13,4% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Maka dari itu, margin laba usaha tercatat menurun menjadi 61,4% pada tahun 2019 dari 66,0% pada tahun 2018.

EBITDA

EBITDA Perseroan dihitung dari laba usaha ditambah biaya depresiasi dan amortisasi. Pada tahun 2019, EBITDA tercatat sebesar Rp1.478,0 miliar, di mana EBITDA Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar 9,8% dibandingkan dengan Rp1.637,7 miliar EBITDA pada tahun 2018. Margin EBITDA di tahun 2019 tercatat sebesar 83,6% dibandingkan dengan 86,2% pada tahun 2018.

Beban Lain-lain – Bersih

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2019	2018	Perubahan 2018-2019
Penghasilan bunga	13,0	8,0	5,0
Beban keuangan	(855,9)	(954,6)	98,7
Kenaikan (penurunan) nilai dari revaluasi aset tetap	200,4	(919,3)	1.119,7
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha – bersih	(0,1)	(329,0)	328,9
Bond premium call	-	(128,9)	128,9
Lain-lain – bersih	(201,3)	(132,9)	(68,4)
Jumlah beban lain-lain – bersih	(843,9)	(2.456,7)	1.612,8

Di tahun 2019 Perseroan mencatatkan beban lain-lain – bersih sebesar Rp843,9 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan beban lain-lain – bersih sebesar Rp2.456,7 miliar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya beberapa transaksi signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 seperti penurunan nilai dari revaluasi aset tetap sebesar Rp919,3 miliar dan bond premium call sebesar Rp128,9 miliar.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Di tahun 2019 Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp228,4 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp1.223,8 miliar.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2019	2018	Perubahan 2018-2019
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.876,9	1.637,0	239,9
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(534,3)	(374,8)	(159,5)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.128,7)	(1.385,3)	256,6

Deskripsi	2019	2018	Perubahan 2018-2019
Kenaikan (penurunan) pada kas dan bank	213,9	(123,1)	337,0
Dampak selisih kurs pada bank	0,6	(10,0)	10,6
Kas dan bank awal tahun	147,0	280,1	(133,1)
Kas dan bank akhir tahun	361,5	147,0	214,5

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan lainnya, pembayaran kepada manajemen dan karyawan, serta arus kas masuk dan keluar yang mencerminkan penerimaan serta pembayaran bunga dan pajak.

Pada akhir 2019, penerimaan kas dari pelanggan tercatat sebesar Rp2.154,5 miliar, pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp165,8 miliar, dan pembayaran kepada manajemen dan karyawan sebesar Rp124,4 miliar. Setelah diimbangi dengan penerimaan bunga serta penerimaan dan pembayaran pajak, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sejumlah Rp1.876,9 miliar pada tahun 2019, meningkat 14,7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.637,0 miliar.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi yang mencakup penambahan menara telekomunikasi dan kolokasi, pembayaran sewa lahan dibayar di muka dan juga penambahan aset tetap.

Pada tahun 2019, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penambahan aset tetap sebesar Rp299,3 miliar dan pembayaran sewa lahan dibayar di muka sebesar Rp223,4 miliar. Secara keseluruhan, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2019 adalah sebesar Rp534,3 miliar, meningkat 42,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp374,8 miliar.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan terutama terdiri dari perolehan dari utang sindikasi, penerimaan dan pembayaran utang bank, pembayaran utang obligasi, dan pembayaran beban keuangan.

Di tahun 2019, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan digunakan untuk pembayaran pinjaman sindikasi dan pembayaran beban keuangan berjumlah Rp1.128,7 miliar, turun 18,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.385,3 miliar.



Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dijadikan sebagai ukuran terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar utang. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek melalui rasio kas dan rasio lancar. Di mana rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang tersedia dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio solvabilitas atau disebut juga leverage ratio digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh Perseroan dengan dana yang dipinjam

dari kreditur Perseroan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva Perseroan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank). Rasio solvabilitas antara lain mencakup rasio utang terhadap ekuitas dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, serta rasio utang terhadap jumlah aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Di tahun 2019, pencapaian rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Perusahaan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Uraian Description	2019	2018
Rasio Likuiditas (%)		
Rasio Kas	0,2	0,1
Rasio Lancar	1,1	1,3
Rasio Solvabilitas (x)		
Rasio Pinjaman* Terhadap Ekuitas	2,4	2,5
Rasio Pinjaman* Terhadap Aset	0,6	0,6
Rasio Ekuitas Terhadap Jumlah Aset	0,3	0,3

*) Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman

Kolektibilitas

Rata-rata periode kolektibilitas piutang merupakan jumlah piutang usaha dibagi dengan pendapatan dikali 365 hari. Periode kolektibilitas rata-rata Perseroan selama tahun 2019 adalah 167 hari dan 169 hari di tahun 2018, sedangkan rasio perputaran piutang adalah sebesar 2,2x di tahun 2019 dan 2018.

Berdasarkan penelaahan manajemen atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Uraian	2019	2018
Rasio Aktivitas		
Kolektibilitas Piutang (hari)	167	169
Perputaran Aset (x)	2,2	2,2

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal,

dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Berikut ini merupakan tabel struktur modal Perseroan yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2019*	2018	2017
Pinjaman**			
Bank	7.052,2	7.359,7	3.571,9
Obligasi	-	-	3.790,2
Ekuitas	2.937,5	2.969,9	4.093,4
Total Modal yang Diinvestasikan	9.989,7	10.329,6	11.891,1

*) Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatat rasio pinjaman bersih terhadap LQA EBITDA sebesar 4,3x, sementara rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 2,4x.

**) Pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2019, tidak terdapat ikatan material baru sebagaimana diungkapkan pada Catatan No. 32 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Investasi Barang Modal

Kami membangun dan mengakuisisi site baru dan mengakuisisi portofolio site setelah mendapatkan kontrak sewa jangka panjang yang berdurasi 10 tahun dengan perusahaan operator telekomunikasi. Oleh karena itu sebagian besar belanja modal kami bersifat diskresioner. Sumber pendanaan untuk belanja modal tersebut berasal dari pendanaan internal dan pinjaman eksternal.



Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya serta Proyeksi Tahun Mendatang

Dalam menjalankan usahanya, manajemen Perseroan secara rutin menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menentukan target kinerja Perseroan untuk tahun mendatang dengan berlandaskan pada kapasitas Perseroan sepanjang tahun berjalan dan ditentukan berdasarkan arahan dari pemegang saham.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (Covid- 19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya

harga-harga sekuritas di pasar modal. Manajemen Grup menyatakan bahwa Grup tidak mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan karena tidak signifikannya exposure kedua hal tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang tidak material terhadap kinerja usaha Grup meskipun terdapat ketidakpastian signifikan mengenai dampak kondisi ini terhadap kegiatan usaha Grup dimasa mendatang.

Prospek Usaha Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan meningkat di mana Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkisar antara 5,1-5,5%. Bagi industri telekomunikasi, infrastruktur merupakan salah satu investasi yang signifikan. Tren yang berjalan kini menunjukkan bahwa infrastruktur sudah tidak lagi dikerjakan oleh operator penyedia jasa telekomunikasi dan mereka lebih memfokuskan diri kepada pengembangan jaringan dan peningkatan kualitas layanan. Sehingga, infrastruktur kini cenderung dikerjakan oleh perusahaan infrastruktur telekomunikasi seperti kami.

Di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur telekomunikasi masih bisa ditingkatkan lebih jauh sehingga industri infrastruktur telekomunikasi masih memiliki ruang bertumbuh yang sangat luas, terutama jika didukung pertumbuhan yang sehat dan stabil pada industri telekomunikasi. Selain itu, tren pembangunan kota besar sebagai smart city juga menjadi potensi yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, jumlah pengguna mobile data di Indonesia kian meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan peningkatan tren di masyarakat yang semakin banyak bergantung pada teknologi mobile dan menggunakan aplikasi ber-bandwidth tinggi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlepas dari itu, konsumsi data per orang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Konsumsi data pun akan terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah startup dan usaha kecil dan menengah yang akan mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia.

Untuk memastikan layanan komunikasi tetap terjaga dengan baik, para operator telekomunikasi di negeri ini terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan 3G dan 4G LTE miliknya di mana para operator telekomunikasi akan meningkatkan penyebaran dari menara makro dan tiang microcell. Hal ini memberi peluang bagi Perseroan untuk membangun menara BTS dan kolokasi baru agar cakupan dan kualitas layanan para operator telekomunikasi tetap terjaga.

Maka dari itu, kami percaya bahwa para operator telekomunikasi akan terus berinvestasi dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan mereka agar dapat memenuhi permintaan data dari konsumen yang kian meningkat. Dengan track record dan portofolio jaringan fiber optik Perseroan, kami percaya bahwa Perseroan

memiliki keahlian dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dari para operator telekomunikasi. Oleh karena itu, Perseroan akan terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu dari perusahaan penyedia infrastruktur menara independen terkemuka di Indonesia.

Aspek Pemasaran

Di tahun 2019, penetrasi pemasaran dan penjualan layanan Perseroan tetap difokuskan dalam penguatan sinergi dengan para operator telekomunikasi di Indonesia seiring dengan rencana roll out jaringan dari masing-masing operator. Selain itu, melalui entitas anak perusahaan, Perseroan juga fokus melakukan pemasaran dalam bidang pemanfaatan dan pengembangan jaringan kabel serat optik. Perseroan juga menyadari perlunya mencari pelanggan baru dan tidak bergantung kepada existing customers saja.

Dalam sektor bisnis jaringan serat kabel, selain terus mengembangkan prospek di bidang wholesale dan enterprise, Perseroan juga melakukan penetrasi bisnis di bidang Fiber to the Home (FTTH), pengembangan bisnis cloud dan IoT. Dalam hal ini, Perseroan berupaya tepat dalam menyusun strategi dan melihat peluang ke depan melalui integrasi solusi-solusi yang inovatif dan terkini sejalan dengan perkembangan tren teknologi telekomunikasi di Indonesia.

Strategi

1. Pengembangan Fokus Bisnis

Untuk memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi berkelanjutan, Perseroan memformulasikan dan mengimplementasikan strategi pengembangan produk dan layanan yang berfokus pada perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi, termasuk memperlebar akses terhadap kapasitas *backhaul* jaringan serat optik dan jaringan *Indoor Antenna System* (DAS) di berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran, serta optimalisasi layanan penyewaan atau kolokasi infrastruktur jaringan lain yang dimiliki Perseroan. Perseroan terus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan agar dapat secara menyeluruh bertumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan yang menyediakan jaringan infrastruktur yang seutuhnya.

Dalam menetapkan harga layanan, Perseroan senantiasa memperhatikan etika bisnis, kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, serta ketentuan yang dikeluarkan pihak regulator. Dengan demikian, Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun calon pelanggan secara berkesinambungan, dan juga berkompetisi secara sehat.

2. Service Excellence

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkaya pengetahuan karyawan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan (*product knowledge*) didukung oleh simplikasi standar operasional perusahaan (SOP), serta dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui penajaman nilai inti Perseroan yang dibarengi dengan penerapan budaya Perseroan yang ditanamkan oleh Manajemen dalam upaya merealisasikan visi dan misi jangka panjang Perseroan.

Pangsa Pasar

Positioning Perseroan sebagai empat besar tower provider di Indonesia menjadi suatu nilai tambah tersendiri. Meskipun dari jumlah menara bukan yang terbanyak, Perseroan sebagai salah satu penyedia infrastruktur yang dapat diandalkan di Indonesia saat ini senantiasa berusaha untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui pola pembangunan sesuai permintaan maupun kolokasi dari menara yang ada. Sementara dari sisi non tower business, Perseroan juga memiliki pertumbuhan bisnis yang cukup bagus bahkan termasuk sebagai salah satu pemain infrastruktur Data Business terpadang di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk senantiasa menjaga posisi Perseroan di pangsa pasar industri infrastruktur telekomunikasi, Perseroan juga akan terus fokus untuk melakukan inovasi yang menunjang bisnis non



menara untuk memperkaya nilai tambah yang dapat diberikan Perseroan kepada pelanggan. Kondisi pasar saat ini dikaitkan terhadap kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang masih memiliki permintaan yang besar dengan semakin beragamnya aplikasi melalui media internet. Baik dari sisi kebutuhan akan jangkauan yang luas maupun kecepatan, kebutuhan ini akan tetap meningkat terutama mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Meskipun penetrasi internet melalui seluler cukup luas, hal ini berbeda dengan penetrasi internet melalui jaringan pita lebar (broadband) yang dinilai belum mencukupi saat ini.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Perseroan melalui salah satu anak perusahaannya yakni PT Bit Teknologi

Nusantara (BIT) turut mendorong tingkat kompetisi dalam hal penyediaan produk yang semakin lengkap dengan kemampuan untuk melakukan layanan tambahan selain menara, misalnya termasuk penyediaan mobile backhaul ke lokasi menara milik Perseroan. Melalui BIT, Perseroan mengembangkan bisnisnya pada produk yang masih terhubung dengan bisnis inti Perseroan yakni melalui pengembangan Data Business maupun solusi layanan lainnya termasuk *Internet of Things* (IoT).

Persaingan di pasar yang semakin ketat, tentunya juga memerlukan kecepatan proses bisnis dan kebijakan yang lebih berfokus pada pasar (*market-driven policy*). Tidak hanya diversifikasi agar produk/layanan semakin lengkap, Perseroan juga perlu melakukan peningkatan secara terus menerus terhadap layanan Perseroan.

Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas memerlukan persetujuan para pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Direksi. Dalam menetapkan pembayaran dividen kas beserta jumlahnya, Direksi akan mempertimbangkan usulannya yang didasarkan pada beberapa faktor, termasuk pencapaian hasil laba

Perseroan, ketersediaan cadangan, kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, kebutuhan belanja modal dan kesempatan pengembangan usaha yang ada.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada tahun 2019, melalui RUPS Tahunan sesuai Akta Notaris Rini Yulianti S.H., notaris di Jakarta, No. 6 tanggal 15 Mei 2019, Direksi memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum

Rincian mengenai realisasi penggunaan dana penawaran umum Perseroan dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus			
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Penggunaan 1	Penggunaan 2	Penggunaan 3	Penggunaan 4
Penawaran Umum Terbatas II	19 Desember 2014	2.404.155	8.639	2.393.516	1.708.000	462.500	223.016	2.393.516

(dalam jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Sisa Dana Hasil Penggunaan Penawaran Umum
		Penggunaan 1	Penggunaan 2	Penggunaan 3	Penggunaan 4	
Penawaran Umum Terbatas II	19 Desember 2014	1.708.000	462.500	223.016	2.393.516	-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Waran Seri I (WS I)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Efek	Tanggal Penerbitan	Total Efek yang Telah Diterbitkan (Lembar)*	Efek yang Telah Dikonversi		Jumlah Efek yang Tidak Dikonversikan (Lembar)**	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Sisa Dana Hasil Konversi
			Jumlah Konversi (Lembar)	Nilai (Rp)			
Waran Seri 1	6 Maret 2013	59.415.534	59.414.674	285.117	860	285.117	-

*) Pada saat penerbitan efektif, jumlah efek waran yang diterbitkan sejumlah 59.400.000 waran, berdasarkan surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0284/JKU/0115 tanggal 6 Januari 2015 mengenai Laporan Penyesuaian Jumlah Waran Series I PT Solusi Tunas Pratama Tbk, jumlah efek waran menjadi sebesar 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp3.367 per waran.

**) Jumlah efek yang tidak dikonversikan sebanyak 860 waran merupakan sisa waran series 1 yang tidak berlaku lagi karena tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Tidak ada transaksi material yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi, selain yang diungkapkan pada Catatan 28 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Selama tahun 2019 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap kinerja Perseroan.





Perubahan Kebijakan Akuntansi

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";

- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perseroan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

Informasi Kelangsungan Usaha

Sekitar 88,7% pendapatan Perseroan pada segmen tower business di tahun 2019 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Grup (termasuk reseller dengan PT Telekomunikasi Selular sebagai konsumen akhir) dan PT Indosat Tbk. Selain dari *tower business*, kelangsungan usaha Perseroan juga ditunjang oleh *non-tower business* untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan Perseroan. Kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi menjadi permintaan yang besar seiring dengan semakin beragamnya aplikasi melalui media internet. Baik dari sisi kebutuhan akan jangkauan yang luas maupun kecepatan, kebutuhan ini akan tetap meningkat terutama mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Meskipun penetrasi internet melalui seluler cukup luas, hal ini berbeda dengan penetrasi internet

melalui jaringan pita lebar (*broadband*) yang dinilai belum mencukupi saat ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Perseroan melalui salah satu anak perusahaannya yakni PT Bit Teknologi Nusantara (BIT) mengembangkan segmen *non-tower business* yang masih terhubung dengan bisnis inti Perseroan, antara lain melalui penyediaan *mobile backhaul* ke lokasi menara milik Perseroan serta pengembangan Data Business maupun solusi layanan lainnya.

Melalui upaya inovasi dan pengembangan usaha pada kedua segmen tower dan non-tower, Perseroan yakin akan keberlangsungan usahanya untuk terus beroperasi guna memenuhi harapan para pemegang saham.







Tata Kelola Perusahaan





Tata Kelola Perusahaan

Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen STP untuk mendorong terwujudnya perusahaan yang kokoh dan independen.

Perseroan percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting untuk keberlanjutan kinerja Perseroan. Untuk itu, STP berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik dan panduan yang berlaku secara umum bagi perusahaan publik. Komitmen ini ditegakkan di semua tingkat organisasi, di mana prinsip dan praktik terbaik tata kelola ini diterapkan dalam aktivitas operasi sehari-hari dan ditinjau kembali untuk menjamin terpenuhinya tujuan guna mewujudkan nilai pemegang saham untuk para pemangku kepentingan.

Prinsip GCG yang dimaksud terdiri dari lima prinsip utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

1. Transparansi

Perseroan berupaya untuk menjamin keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material serta relevan terkait aktivitas Perseroan. Sebagai perwujudan prinsip transparansi, Perseroan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu cara Perseroan untuk mempertahankan objektivitas dalam menjalankan usaha.

2. Akuntabilitas

Agar sistem pengelolaan perusahaan bisa terlaksana dengan lebih efektif, Perseroan beserta entitas anak dikelola dengan kejelasan struktur organisasi, fungsi,

sistem, serta peran dan tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan maupun seluruh karyawan.

3. Tanggung Jawab

Perseroan berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dan memastikan bahwa Perseroan dikelola untuk menjadi perusahaan yang sehat, taat pada hukum dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

4. Independensi

Perseroan mendorong setiap unit kerja agar melakukan peran serta fungsinya masing-masing secara profesional dan independen tanpa ada benturan kepentingan atau tanpa pengaruh secara berlebihan dari pihak ataupun kepentingan tertentu. Upaya tersebut mencakup meminimalisir benturan kepentingan dalam kegiatan manajemen dan operasional, dengan cara memastikan agar rangkap jabatan dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap Perseroan.

5. Keadilan

Perseroan berupaya untuk menjamin adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karier tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin dan kondisi fisik.

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG di seluruh tingkatan organisasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku, Piagam Audit Internal Perseroan dan Code of Conduct Perseroan yang diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit setingkat Dewan Komisaris, dan Komite setingkat Direksi;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal dan Manajemen Risiko;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Pelaksanaan pemilihan Audit Eksternal dan pembentukan Satuan Kerja Audit Internal;
6. Penyusunan Rencana Bisnis dan Key Strategic Initiative Perseroan;
7. Pelaksanaan transparansi laporan keuangan dan nonkeuangan Perseroan.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme GCG merupakan proses implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Sistem tersebut menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme GCG juga menjelaskan prosedur pengambilan keputusan dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure GCG*) yang ada di lingkungan perusahaan agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, Perseroan selalu memasukkan peninjauan kembali terhadap *soft-structure GCG* dalam pembahasan rencana kerja GCG setiap tahunnya. Seluruh kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan GCG dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme *check-and-balance* yang efektif.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu bagian dari *soft-structure GCG* yang mengatur mekanisme dalam penerapan GCG. Mekanisme ini meliputi prosedur dan aturan pengawasan kinerja pihak pengambil keputusan, khususnya formulasi kebijakan yang akan ditempuh.

Soft-structure GCG di Perseroan terdiri dari:

1. *Code of Corporate Governance*
Kode ini menjelaskan rangkaian proses yang digunakan oleh segenap jajaran Manajemen dalam mengelola STP sehari-hari dan memuat prinsip-prinsip penerapan GCG yang selaras dengan perundang-undangan, visi dan misi, serta budaya Perseroan.
2. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tata laksana kerja, Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang ketentuannya mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Anggaran Dasar menjelaskan tahapan aktivitas yang terstruktur dan sistematis, seperti ketentuan mengenai keanggotaan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pedoman kerja Direksi dan Komisaris. Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan

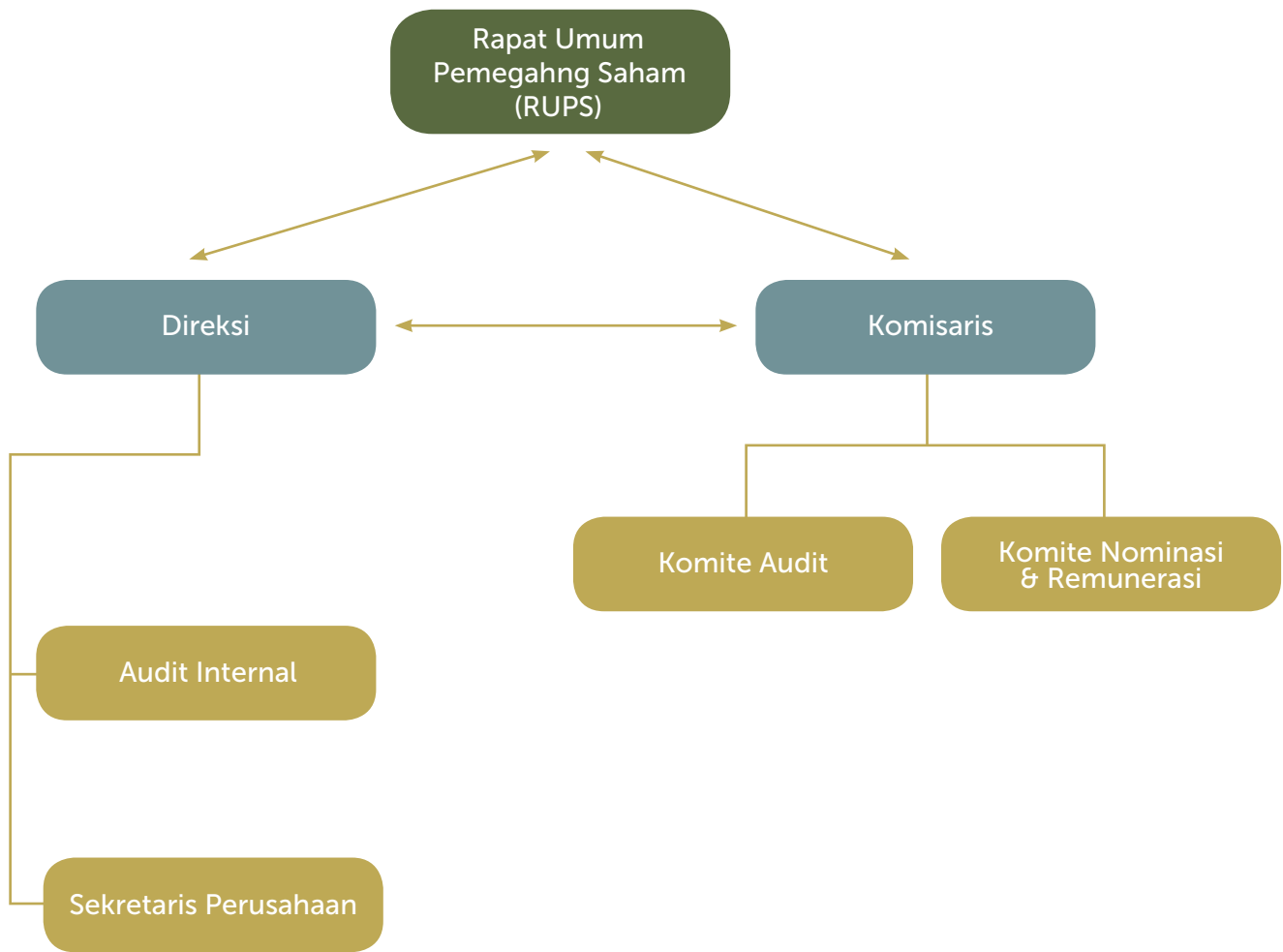
regulasi (Undang-Undang/Peraturan) dan praktik terbaik yang telah disepakati bersama sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Anggaran Dasar Perusahaan juga menjelaskan secara rinci hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam melaksanakan tugas, sehingga tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien.

3. Code of Conduct
Code of Conduct merupakan pedoman perilaku dan etika bisnis bagi setiap insan Perseroan dalam menjalankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan lingkup pekerjaannya di Perseroan.
4. Piagam Komite Audit
Piagam Komite Audit adalah pedoman yang menjelaskan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, Komite Audit merujuk kepada Piagam yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi ini.
5. Piagam Internal Audit
Piagam adalah dokumen formal yang mengelaborasi visi, misi, tata nilai, kode etik dan norma, ruang lingkup, tugas, kewenangan, tanggung jawab dan standar pelaksanaan Audit. Piagam Internal Audit menjadi bukti komitmen dan dukungan manajemen serta komitmen fungsi Satuan Pengawasan Internal untuk menjalankan fungsinya. Piagam Internal Audit ditandatangani oleh Direktur Utama dan satu orang Direktur lainnya.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, organ perusahaan tertinggi di dalam Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun kepengurusan di Perseroan menganut sistem dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsi masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan hubungan tata kelola, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi, sedangkan Direksi dalam melakukan fungsi pengelolaannya dibantu oleh Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku yang bersangkutan dan salah satu agenda penting RUPS Tahunan adalah membahas pengesahan Laporan Tahunan. Sementara RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan/permintaan pemegang saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan jangka panjang Perseroan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara terbuka, wajar, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Pada tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 6 tertanggal 15 Mei 2019 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hasil
1.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang antara lain memuat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.	1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018. 3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor 00360/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019.
2.	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4.	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.	1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



No.	Agenda	Hasil
5.	Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Jonathan Yuwono dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Jeffrey Yuwono selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. 3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Jeffrey Yuwono Wakil Komisaris Utama : Bapak Ludwig Indrawan Komisaris : Bapak Thong Thong Sennelius Komisaris Independen : Bapak Muhamad Senang Sembiring Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah DIREKSI Direktur Utama : Bapak Nobel Tanihaha Direktur : Ibu Juliawati Gunawan Direktur Independen : Bapak Tommy Gustavi Utomo 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.



Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Usai penyelenggaraan RUPS Tahunan, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 7 tertanggal 15 Mei 2019 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hasil
1.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 15.	1. Menyetujui untuk menyesuaikan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2017, sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Konstruksi; Real Estat; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Perdagangan Besar; Informasi dan Telekomunikasi. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: • Kegiatan Usaha Utama, yaitu: a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (4221) b. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa (68110) c. Aktivitas Perusahaan Holding (64200) • Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu: a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523) b. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100) 3. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (5) huruf c, penghapusan Pasal 15 ayat (9) huruf c dan perubahan Pasal 15 ayat (10) huruf e Anggaran Dasar Perseroan; 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas usaha yang dijalankan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali oleh RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris

wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab serta independen.

Penunjukan, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/ POJK.04/2014.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebelum dan sesudah RUPS Tahunan, adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Jonathan Yuwono	Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
4.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017

Komposisi Dewan Komisaris sesudah RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Jeffrey Yuwono	Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
4.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017

Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3(tiga) orang anggota, yaitu:
 - Seorang Komisaris Utama;
 - Seorang Wakil Komisaris Utama; dan
 - Seorang atau lebih Komisaris lainnya termasuk Komisaris Independen;
 Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk untuk setiap saat menjaga jumlah Komisaris Independen sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - Mempunyai akhlak, moral dan integrasi yang baik;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; atau
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, yaitu secara umum sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
3. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Independensi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

4. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
5. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan;
6. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Independensi Dewan Komisaris

Mengacu pada POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen, Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Bapak Erry Firmansyah dan Bapak Muhamad Senang Sembiring. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun, serta mengacu kepada POJK 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan; serta
- Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, kedua Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan independensi Komisaris Independen telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04.2014.

Tata Cara Penunjukan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat wajib mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tata cara penunjukan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan para anggota, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan

berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 3 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Jonathan Yuwono*	Komisaris Utama	0	0	0%
2.	Jeffrey Yuwono**	Komisaris Utama	2	2	66,66%
3.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	1	1	100%
4.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	3	3	100%
5.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	3	3	100%
6.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	3	3	100%

*) Resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Mei 2019

**) Resmi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Mei 2019

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda
28 Maret 2019	Pembahasan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018
29 Juli 2019	Pembahasan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Kuartal II Tahun Buku 2019
29 Oktober 2019	Pembahasan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Kuartal III Tahun Buku 2019

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya, serta pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS di mana Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode tahun buku.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi merupakan komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sejauh ini komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan dari penunjukan komite tersebut. Dewan Komisaris tidak menemukan ketidaksesuaian ataupun penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi tersebut ataupun bagian daripadanya.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris Perseroan tidak mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi atau seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan oleh Dewan Komisaris yang lebih fokus pada melakukan pengawasan dan memantau agar aktivitas Perseroan berjalan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seiring dengan strategi bisnis Perseroan yang fokus pada pembaruan struktur organisasi, penyelarasan budaya Perseroan melalui penajaman serta internalisasi nilai-nilai inti Perseroan, pengembangan serta pemberdayaan sumber daya manusia, dan perbaikan menyeluruh sistem operasional Perseroan.

Direksi

Sebagai organ eksekutif tertinggi di Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan operasional Perseroan, dalam upaya mencapai target yang ditentukan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi juga mewakili Perseroan dalam persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.

Selama tahun 2019 tidak ada perubahan pada komposisi Direksi Perseroan. Sehingga, susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi per 31 Desember 2019

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
3.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017

Komposisi dan kriteria anggota Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - Mempunyai akhlak, moral dan integrasi yang baik.
 - Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - Dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:



1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat;
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya yang sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup hal-hal secara umum sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. Tugas pokok Direksi adalah;
 - a. Mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus harta kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat Anggaran Tahunan Perseroan dan wajib disampaikan pada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk hal-hal dan keputusan-keputusan berikut ini tidak dapat dilakukan Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dimana persetujuan tersebut termasuk persetujuan dari Wakil Komisaris Utama.

Tata Cara Penunjukan Anggota Direksi

Anggota Direksi yang diangkat wajib mengikuti ketentuan:

1. Undang-undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
3. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Tata cara penunjukan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan para anggota, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang

bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melakukan rapat setidaknya-tidaknya 12 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	12	12	100%
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	12	12	100%
3.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur Independen	12	12	100%

Agenda Rapat Direksi

Tanggal	Agenda
8 Januari 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
5 Februari 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
5 Maret 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
7 April 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
12 Mei 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
23 Juni 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
14 Juli 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
11 Agustus 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
8 September 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
6 Oktober 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
12 November 2019	Pembahasan Operasional Perseroan
3 Desember 2019	Pembahasan Operasional Perseroan dan target Perseroan untuk tahun 2020

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2019, Perseroan melaksanakan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Jonathan Yuwono*	Komisaris Utama	0	0	0
2.	Jeffrey Yuwono**	Komisaris Utama	2	2	66,66%
3.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	1	1	33%
4.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	3	3	100%

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
5.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	3	3	100%
6.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	3	3	100%
7.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	3	3	100%
8.	Juliawati Gunawan	Direktur	3	3	100%
9.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur Independen	3	3	100%

*) Resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Mei 2019

**) Resmi menjabat sejak sebagai Komisaris Utama tanggal 15 Mei 2019

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Agenda
25 April 2019	Membahas strategi Perseroan dalam usahanya mencapai target dan membahas isu aktual terkait bisnis Perseroan dan strategi Perseroan dalam menghadapinya
23 Agustus 2019	Membahas strategi Perseroan dalam usahanya mencapai target dan membahas isu aktual terkait bisnis Perseroan dan strategi Perseroan dalam menghadapinya
29 November 2019	Membahas strategi Perseroan dalam usahanya mencapai target dan membahas isu aktual terkait bisnis Perseroan dan strategi Perseroan dalam menghadapinya

Informasi mengenai Keputusan RUPS

Hingga 31 Desember 2019, pelaksanaan keputusan RUPS untuk tahun buku 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun buku 2019, tidak ada keputusan RUPS di tahun buku 2019 yang belum dilaksanakan oleh Perseroan.
- Untuk tahun buku 2018, terdapat satu keputusan RUPS 2018 yang belum dilaksanakan Perseroan yaitu keputusan RUPS sehubungan dengan persetujuan rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimal 10% (sepuluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Belum dilaksanakannya keputusan tersebut disebabkan karena Perseroan belum mendapatkan pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penilaian Kinerja Direksi

Direktur Utama melakukan kajian atas kinerja pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh Anggota Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya satu kali dalam setahun berdasarkan kriteria-kriteria tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan pertimbangan dan masukan Direktur Utama, dimana evaluasi kinerja Direksi tersebut dilaporkan kepada pemegang saham dan tertuang di dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Pendukung Tugas Direksi

Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan merupakan fungsi yang membantu Direksi dalam menjalankan tata kelola Perusahaan. Sejauh ini Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan dari pembentukan fungsi tersebut. Direksi tidak menemukan ketidaksesuaian ataupun penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan ataupun bagian daripadanya.

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui prosedur yaitu RUPS melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Remunerasi

Prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Sementara struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi turut mengacu pada ketentuan sebagaimana telah ditetapkan disetujui oleh RUPS tersebut, dengan komponen penghasilan yang dimaksud terdiri dari:

- Gaji/Honorarium;
- Tunjangan;
- Fasilitas; dan
- Tantiem/Insentif Kinerja.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Remunerasi & Nominasi mengacu kepada indikator agar sesuai dengan tujuan dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Kinerja Perseroan.
3. *Business Size*.
4. Hasil *benchmarking* remunerasi industri terkait.
5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan untuk melakukan analisis dan evaluasi semua informasi tersebut serta menghasilkan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuannya dan/atau disampaikan kepada RUPS.

RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada 15 Mei 2019 memutuskan bahwa pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Pada tahun 2019, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar 1,6 miliar rupiah dan 17 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp1,6 miliar rupiah dan Rp13,5 miliar rupiah.



Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Dalam kepengurusan Perseroan, hubungan keluarga dan keuangan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat melalui tabel berikut.

Nama	Hubungan Afiliasi dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jonathan Yuwono*	-	✓	-	✓	✓	-
Jeffrey Yuwono**	-	✓	-	✓	✓	-
Ludwig Indrawan	-	✓	-	✓	-	✓
Thong Thong Sennelius	-	✓	-	✓	-	✓
Erry Firmansyah	-	✓	-	✓	-	✓
Muhamad Senang Sembiring	-	✓	-	✓	-	✓
Nobel Tanihaha	-	✓	-	✓	-	✓
Juliawati Gunawan	-	✓	-	✓	-	✓
Tommy Gustavi Utomo	-	✓	-	✓	-	✓
*) Resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Mei 2019						
**) Resmi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Mei 2019						

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja dan operasi Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017 mengenai pengangkatan Komite Audit Perseroan, periode jabatan Anggota Komite Audit Perseroan adalah mulai dari Mei 2017 sampai dengan Mei 2020. Adapun susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1.	Muhamad Senang Semibiring (Komisaris Independen)	Ketua	3 Oktober 2017
2.	Sujoko Martin (Pihak Independen)	Anggota	3 Oktober 2017
3.	Anwar Muljadi Arif (Pihak Independen)	Anggota	3 Oktober 2017

Profil Anggota Komite Audit

Muhamad Senang Sembiring

Ketua Komite Audit

Profil Muhamad Senang Sembiring dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris, bab Laporan Manajemen.

Sujoko Martin

Anggota Komite Audit

Usia

51 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan

Riwayat Jabatan

- 1992-2004 Memulai karier di PT Astra International Tbk dengan posisi terakhir sebagai Head of Corporate Accounting
- 2004-2009 Head of Accounting & Control PT United Tractors, Tbk
- 2009-2010 Direktur Finance PT Bina Pertiwi (wholly owned subsidiary of PT United Tractors)
- 2010-2014 Direktur Finance dan IT PT Bukit Makmur Mandiri Utama
- 2015-Feb 2017 CFO dan Board Risk Committee Samko Timber Limited, Singapore
- Jul 2017-Jul 2018 CFO PT Artamulia Tatapratama
- Des 2018-sekarang Direktur PT Putra Perkasa Abadi

Anwar Muljadi Arif

Anggota Komite Audit

Usia

60 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan (1985)
- Memperoleh gelar PPAk di Universitas Indonesia (2004)

Riwayat Jabatan

- 1985-1991 Drs Utomo & Co – SGV & Co - Audit Staff to Audit Manager Group
- 1991-1994 Prasetyo, Utomo & Co – Arthur Andersen & Co – Audit AW Manager
- 1994-2003 Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja – Ernst & Young – Senior Manager
- 2003-2015 Purwantono, Suherman & Surja – Ernst & Young – Associate Director



Independensi Anggota Komite Audit

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan dua (2) orang anggota dari profesional sebagai pihak independen yang keduanya berasal dari luar lingkungan Perseroan yaitu Sujoko Martin dan Anwar Muljadi Arif. Anggota dan Ketua Komite Audit bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan keuangan, keluarga, atau pun bisnis dengan Perseroan selain dari remunerasi yang diterima karena pelaksanaan tugas mereka selaku Komite Audit dan Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Pihak Independen adalah pihak diluar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 April 2012 dan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 April 2016.

Struktur isi Piagam Komite Audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Pendahuluan
2. Tujuan Pembentukan Komite Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
4. Wewenang
5. Komposisi dan Struktur Komite Audit
6. Persyaratan Komisaris Independen
7. Syarat Keanggotaan Komite Audit
8. Etika Kerja
9. Pelaksanaan Kerja
10. Prosedur Pengaduan
11. Masa Tugas
12. Kebijakan Anti Korupsi dan Pedoman
13. Operasional
14. PEMBERLAKUAN

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim auditor eksternal dan internal.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.



Rapat Komite Audit

Selama tahun 2019, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Muhamad Senang Sembiring (Komisaris Independen)	Ketua	3	3	100%
2.	Sujoko Martin (Pihak Independen)	Anggota	3	3	100%
3.	Anwar Muljadi Arif (Pihak Independen)	Anggota	3	3	100%

Pelatihan Anggota Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Audit tidak mengikuti pelatihan terkait baik yang diselenggarakan oleh Perseroan maupun pihak eksternal.

Laporan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku

Komite Audit telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, rapat Komite Audit telah membahas dan memberikan rekomendasi atas beberapa hal berikut:

1. Komite menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2019;
2. Komite memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Perseroan secara berkala;
3. Komite melakukan kajian terhadap usulan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018 dan 2019;
4. Komite melakukan pembahasan atas perencanaan audit ekstern tahun 2019 dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal;
5. Komite memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2019, memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan dan memberikan rekomendasi di antaranya memastikan Pengembangan Teknologi Informasi;
6. Komite melakukan kajian atas Rencana Audit tahun 2020;
7. Komite memantau penerapan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku;
8. Komite memantau tindakan dan penanganan kasus internal fraud;
9. Komite melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Perseroan.

Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi & Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No.34/2014 oleh kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi yang berlaku efektif pada tanggal 2 Oktober 2017, yang diketuai oleh Erry Firmansyah dan

beranggotakan Jeffrey Yuwono dan Ludwig Indrawan. Keduanya akan menjabat untuk periode jabatan yang belum ditentukan. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Dasar hukum pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi adalah Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Oktober 2017.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1.	Erry Firmansyah (Komisaris Independen)	Ketua	2 Oktober 2017
2.	Jeffrey Yuwono (Komisaris Utama)	Anggota	1 Juli 2019
3.	Ludwig Indrawan (Wakil Komisaris Utama)	Anggota	2 Oktober 2017

Profil Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi & Nominasi, terutama untuk Erry Firmansyah, Jeffrey Yuwono, dan Ludwig Indrawan dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris, bab Laporan Manajemen.

Independensi Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi & Nominasi telah memenuhi kriteria independensi berikut ini:

1. Ketua merupakan Komisaris Independen dan anggota lainnya merupakan anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite tidak berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Piagam Komite Remunerasi & Nominasi

Perseroan tidak memiliki Piagam Komite Remunerasi & Nominasi namun Komite Remunerasi & Nominasi menjalankan fungsinya berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris seperti yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi adalah memformulasikan remunerasi dari anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Perseroan baik dalam bentuk tunai atau apapun (termasuk namun tidak terbatas pada gaji, tunjangan, bonus, intensif, dan pesangon).

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi & Nominasi tidak mengadakan rapat khusus untuk pembahasan aspek remunerasi & nominasi di Perseroan.

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Remunerasi & Nominasi tidak mengikuti pelatihan terkait baik yang diselenggarakan oleh Perseroan maupun pihak eksternal.

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi & Nominasi pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi & Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas struktur organisasi Perseroan.
2. Memberikan usulan rekomendasi remunerasi dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Profil dan Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Sekretaris Perusahaan

Saat ini jabatan Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Juliawati Gunawan yang berdomisili di Jakarta dan diangkat berdasarkan Surat Penunjukan oleh Direksi Perusahaan No. 015/DIR-STP/CORSEC/III/2011 perihal Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan tertanggal 2 Maret 2011.

Juliawati Gunawan Sekretaris Perusahaan	
Usia 49 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Surat Penunjukan No. 015/DIR-STP/CORSEC/III/2011 tanggal 2 Maret 2011	
Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara (1993)	
Riwayat Jabatan	
1992-2003	Auditor dan Konsultan di Prasetio, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) dan Ernst & Young Indonesia
2009-Juni 2011	Financial Controller PT Solusi Tunas Pratama
Juni 2011-sekarang	Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama dan berperan dalam menjaga kelancaran hubungan antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk membantu Direksi dalam hal:

1. Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis Perseroan dan menjalin hubungan baik dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal.
2. Memastikan Perseroan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan kegiatan RUPS.
4. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi dan manajemen dengan pemangku kepentingan dalam rangka membangun citra Perseroan.
5. Menyelenggarakan kegiatan serta memfasilitasi hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan.

6. Memantau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Memonitor perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyebarkan informasi kepada semua unsur dalam organisasi yang menyangkut program-program Perseroan, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi Perseroan.

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Kegiatan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2019 termasuk:

1. Menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan;
2. Menyelenggarakan satu (1) kali paparan publik (public expose); dan
3. Memastikan pemenuhan terhadap kepatuhan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2019, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:



1. Seminar Penilaian Tata Kelola Perusahaan dan sharing terkait Implementasi Good Corporate Governance (GCG).
2. Seminar tentang Pendalaman POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, serta sharing session terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.
3. Seminar Pendalaman POJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, SE OJK No.30/SE OJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta sharing session dari PT Bank Permata Tbk sebagai Juara 3 Kategori Private Keuangan Listed - Annual Report Award (ARA) 2018.
4. Seminar mengenai Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
5. Seminar Pendalaman POJK Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.
6. Seminar mengenai Peraturan Buyback Saham sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
7. Seminar mengenai Strategi Implementasi GCG yang efektif dengan tugas Corporate Secretary dan POJK Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Audit Internal

Perseroan menyadari betapa pentingnya sistem pengendalian internal yang baik di Perseroan dan memastikan bahwa sistem yang dimiliki sudah cukup lengkap dan memadai. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan membentuk Unit Audit Internal Perusahaan pada 15 Agustus 2011.

Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 27 Mei 2016 memutuskan untuk menunjuk dan mengangkat Tissa Purnama, S.E. sebagai Ketua Unit Piagam Perusahaan. Beliau menjabat hingga mengajukan pengunduran diri pada tanggal 26 Juli 2019. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tertanggal 17 September 2019, Direktur Perseroan telah melakukan pemberhentian dengan hormat Tissa Purnama, S.E. selaku Ketua Audit Internal atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 13 September 2019 sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Hingga 31 Desember 2019, fungsi audit internal di Perseroan dijalankan langsung oleh Direksi Perseroan hingga Perseroan mengangkat Bastianus H. Freddy sebagai Ketua Audit Internal per tanggal 27 Mei 2020.

Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang independen terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Perseroan dan sistem manajemen risiko. Unit Audit Internal juga berperan untuk memberikan penjaminan kualitas tata kelola seluruh bagian Perseroan. Tugas-tugas Unit Audit Internal ini dicapai dengan melakukan audit rutin dan menyeluruh terhadap semua departemen, fungsi, dan proses yang ada di Perseroan, dengan berfokus pada bagian yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi sehubungan dengan kemungkinannya dalam memberikan pengaruh yang dapat merugikan kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Ketua Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang anggota, yaitu 1 Kepala Departemen dan 1 (satu) orang Staf Audit Internal. Seluruh anggota Unit Audit Internal tersebut memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi dan pengalaman kerja sebelumnya sebagai auditor internal dan atau auditor eksternal.

Profil Ketua Unit Audit Internal

Tissa Purnama, S.E.* Ketua Unit Audit Internal	
Usia 37 tahun	
Kewarganegaraan Indonesia	
Dasar Hukum Penunjukan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 27 Mei 2016	
Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Institut Bisnis and Informatika Indonesia (sekarang dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business), Jakarta (2006)	
Riwayat Jabatan	
• 2006-2009	Staf Senior pada Assurance Services di PricewaterhouseCoopers/PwC Indonesia
• 2009-2010	Staf Senior pada Internal Audit Services (IAS) di PricewaterhouseCoopers/PwC Indonesia
• 2010-2013	Manager Audit Internal di PT Indosat Tbk
• 2013-2015	Manager Audit Internal di PT Central Cipta Murdaya
• 2016-Juli 2019	Ketua Unit Audit Internal di PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
*) Resmi mengajukan pengunduran diri per tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan oleh Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tertanggal 17 September 2019 atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 13 September 2019.	



Bastianus H. Freddy*

Ketua Unit Audit Internal

Usia

38 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 28 Mei 2020

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta (2004)

Riwayat Jabatan

- | | |
|-----------------|---|
| • 2004 | Staf Audit Internal di PT Perdana Gapura Prima Group |
| • 2009-2010 | Manajer Audit di Deloitte Indonesia |
| • 2010-2013 | Asisten Manajer di PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia |
| • 2013-2020 | Ketua Audit Internal di PT AirAsia Indonesia Tbk |
| • 2020-sekarang | Ketua Unit Audit Internal di PT Solusi Tunas Pratama Tbk. |

*) Resmi diangkat sebagai Ketua Audit Internal per tanggal 27 Mei 2020.

Pelatihan Unit Audit Internal

Hingga 31 Desember 2019 tidak ada pelatihan terkait audit internal baik yang diselenggarakan oleh Perseroan ataupun mengikuti pelatihan dari pihak eksternal.

Struktur dan Posisi Audit Internal

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dalam Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Ketua Unit Audit Internal.
2. Ketua Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Ketua Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Ketua Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Ketua Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Unit Audit Internal.
6. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal wajib diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal mengacu kepada Piagam Audit Internal yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 16 September 2016.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik serta independensi dan objektivitas Auditor Internal. Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan, Unit Audit Internal menyusun prioritas objek audit tahunan dalam rencana audit internal dan memfokuskan pada unit usaha atau prospek bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas operasional dan atau laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Audit Internal merupakan kegiatan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan.

Unit Audit Internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Dalam struktur organisasi, Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Audit Eksternal

Dalam menyusun laporan keuangan dan guna meningkatkan fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM International). Penunjukkan KAP Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ini dimaksudkan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019. Penunjukan KAP tersebut dilakukan berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mendelegasikan kewenangan penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("KAP AAJAM") sebagai auditor eksternal Perusahaan telah dilakukan sejak tahun buku 2011, maka periode penugasan KAP AAJAM terhadap jasa yang diberikan kepada Perusahaan tercatat sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

Perseroan dan KAP AAJAM tidak memiliki hubungan afiliasi kekeluargaan dan keuangan yang mampu mempengaruhi independensi auditor eksternal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Jasa yang diberikan kepada Perseroan selama tahun 2019 adalah audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Laporan keuangan tahunan Perseroan memperoleh hasil 'wajar tanpa pengecualian'. Biaya jasa audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp440.000.000. Selain audit atas laporan keuangan, Perseroan tidak menggunakan jasa lain dari KAP AAJAM.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Manajemen Risiko

Dalam perjalanannya, Perseroan senantiasa menghadapi perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang sangat pesat sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Melalui manajemen risiko, Perseroan berusaha meminimalkan terjadinya ancaman dan memaksimalkan peluang yang ada. Penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu pada berbagai pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang juga berlaku di industri.

Penerapan sistem manajemen risiko yang tepat sasaran dan intensif diharapkan mampu memberi manfaat yang berkelanjutan berupa:

1. Penyediaan informasi kepada pihak manajemen mengenai eksposur risiko yang dihadapi.
2. Peningkatan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis.
3. Penilaian risiko yang melekat pada setiap produk atau kegiatan usaha Perseroan.

Risiko yang Dihadapi Perseroan dan Upaya Pengelolaan Risiko

Beberapa risiko utama yang memiliki pengaruh penting terhadap kegiatan usaha Perusahaan, antara lain:

Profil Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Operasional	• Menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara yang dimiliki serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik. • Mengasuransikan sebagian besar aset dengan nilai yang memadai untuk meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah.
Risiko Hukum	• Menelaah secara seksama atas perjanjian yang dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan penyewa, para pemilik lahan dan pemasok untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. • Peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari.
Risiko Keuangan	• Menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati. • Melakukan perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten. • Menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif. • Melakukan kontrak lindung nilai terhadap risiko: (i) fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap pembayaran pinjaman Perusahaan yang diperoleh dalam mata uang USD; dan (ii) volatilitas suku bunga pinjaman.

Sistem Pengendalian Internal

Unit Audit Internal dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang menjadi salah satu dasar bagi Manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efektif dan efisien.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Unit Audit Internal senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal pada semua level, dalam menerapkan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa Perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan.

Kode Etik Perusahaan

Kode Etik bertindak sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, pihak independen dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan agar secara konsisten bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai-nilai dan visi misi Perseroan.

Isi Kode Etik

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Pemegang Saham, Pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya (yang meliputi Hubungan dengan Pelanggan, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuaian dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, dan Anti Pencucian Uang);
7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan terus mengoptimalkan penerapannya guna mencapai skema praktik terbaik. Perseroan terus meningkatkan

kualitas penerapan GCG dengan memperkuat etika dan budaya kerja yang mengutamakan integritas tinggi, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh level manajemen dan karyawan.

Upaya Penegakan Kode Etik

Perseroan terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui *email blast* kepada seluruh karyawan dan karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat *Induction Program* bagi karyawan eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik, sementara sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. Perseroan memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

Pengendalian Korupsi dan Gratifikasi

Untuk memandu manajemen dan seluruh karyawan dalam menjalankan etika bisnis yang sehat, Perseroan menerapkan Kebijakan Antikorupsi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan tanpa terkecuali. Hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 Agustus 2012. Perseroan juga menunjuk Compliance Manager untuk memastikan



Kebijakan Antikorupsi ini berlaku dan dijalankan dengan baik. Pokok-pokok isi dari Kebijakan Antikorupsi tersebut, antara lain:

1. Larangan tegas terhadap korupsi dalam bentuk apapun.
2. Hubungan dengan mitra kerja.
3. Mengatur kebijakan tentang hadiah, hiburan, dan perjalanan.
4. Sumbangan politik, donasi, CSR dan sponsorship.
5. Rekrutmen mantan pejabat pemerintah dan pejabat pemerintah aktif.
6. Ketepatan pencatatan dan pengendalian internal.
7. Sanksi.
8. Prosedur kepatuhan.

Benturan Kepentingan

Seluruh karyawan Perseroan diimbau untuk menghindari kegiatan pribadi atau urusan finansial yang memiliki benturan kepentingan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan.

Whistleblowing System

Terjadinya fraud yang diakibatkan oleh praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi citra Perseroan. Hal tersebut juga dapat merusak produktivitas kerja maupun kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen menyediakan sarana sistem pelaporan bagi karyawan yang berkeinginan untuk menyampaikan pelaporan dugaan pelanggaran terkait fraud atau dikenal sebagai Whistleblowing System (WBS). Sarana ini dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam membantu Perseroan meningkatkan kualitas GCG.

Dalam rangka untuk semakin mendorong peran serta karyawan dalam melaporkan, mencegah dan menangani pelanggaran terkait fraud secara efektif dan efisien, maka Perseroan juga menambah kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan fraud dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor.

Perlindungan bagi Whistleblower

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perseroan di mana identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email dan unit kerja/perusahaan) akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, pelapor diperbolehkan untuk tidak mencantumkan identitas (anonim).

Penanganan dan Pihak Pengelola Pengaduan

Divisi Audit Internal merupakan Unit Kerja terkait yang mengelola pengaduan di mana laporan yang diterima oleh Perseroan akan diteruskan ke Direktur Utama kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait tersebut. Bilamana diperlukan maka unit kerja terkait tersebut akan melakukan investigasi lebih lanjut. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran terkait fraud dapat dilakukan melalui surat, email, website, dan telepon.

Laporan Pelanggaran Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mencatat tidak terdapat (nihil) laporan pengaduan pelanggaran yang masuk baik melalui telepon, email, faksimili, ataupun kontak surat.



Akses Informasi dan Data Perseroan kepada Publik

Dalam rangka memelihara akuntabilitas dan transparansi perusahaan, Perseroan secara rutin menyampaikan berbagai informasi, khususnya yang terkait dengan kepentingan pelanggan Perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya. Perseroan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bursa efek dan pasar modal terkait keterbukaan informasi.

Secara berkala, Perseroan selalu menyampaikan informasi terkini tentang Perseroan kepada pemegang saham, pihak otoritas pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai jalur komunikasi. Selain pelaporan langsung kepada regulator pasar modal, informasi juga disampaikan oleh Perseroan kepada pemegang saham secara umum melalui pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di media massa.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan membuka saluran informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui media berikut ini.

Situs (Website)

Guna mendukung kemudahan dalam mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan, Perseroan telah membangun platform teknologi informasi yang efektif dalam memberikan dukungan penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu, dan tepat sasaran. Bagi masyarakat umum yang berminat mencari informasi perkembangan terkini Perseroan dapat mengakses situs resmi Perseroan di www.stptower.com.

Laporan Tahunan

Informasi lebih lengkap mengenai Perseroan dapat diperoleh melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain dicetak dalam bentuk fisik, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan juga diunggah di situs resmi Perseroan.

Layanan Pelanggan

Sedangkan bagi yang ingin mendapatkan dan mengirimkan informasi lebih rinci termasuk dalam menyampaikan keluhan, silakan gunakan fasilitas "Kontak Kami" di situs www.stptower.com atau hubungi kami melalui saluran telepon di nomor +6221-5794 0688, dan faksimili di nomor +6221-5795 0077.

Media Massa

Perseroan secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Alamat surat-menyurat:
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Rukan Permata Senayan Blok C01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta 12210, Indonesia
Telepon : +6221 5794 0688
Fax : +6221 5795 0077
Email : corporate.secretary@stptower.com
Website : www.stptower.com



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang pada praktiknya harus dilaksanakan secara efektif guna mempertahankan tingkat keberhasilan kinerja Perseroan, maka Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari jajaran personel yang tepat dan berkualitas baik dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang luas seperti ekonomi, hukum dan teknologi yang terkait dengan bisnis Perseroan.

Keragaman keahlian, latar belakang dan pengetahuan, pengalaman industri, di antara faktor-faktor lain akan menjadi pertimbangan saat akan memilih seorang anggota baru dari Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mengakui dan mendapatkan manfaat dari keberagaman latar belakang anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan melihat peningkatan keragaman pada komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai satu bagian penting dalam menjaga keunggulan yang kompetitif.







06



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan memandang bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk senantiasa dipenuhi. Dalam hal ini, definisi CSR di Perseroan mencakup kewajiban untuk melestarikan lingkungan, menghormati hak-hak asasi manusia, menyediakan kondisi kerja yang nyaman dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan para karyawan, memprioritaskan kesehatan dan keamanan di tempat kerja, serta berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan perekonomian domestik. Perseroan meyakini bahwa kegiatan bisnis yang inovatif, etika bisnis yang baik, serta pengembangan tenaga kerja yang unggul berperan penting untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan yang akan memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Landasan Hukum

Implementasi CSR di Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas serta POJK No. 29/POJK.14/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang juga mengatur tentang penerapan dan pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial di Perseroan.

Ruang Lingkup

Saat ini, penyusunan program CSR di Perseroan baru hanya difokuskan pada aspek tertentu dan memiliki cakupan yang tidak terlalu luas. Namun, untuk ke

depannya Perseroan berharap untuk dapat memberikan manfaat seluas-luasnya melalui implementasi program CSR yang meliputi empat pilar sebagai berikut:

1. Lingkungan hidup;
2. Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
4. Tanggung jawab kepada konsumen.

Meskipun saat ini implementasi program CSR belum merata di semua pilar, Perseroan senantiasa meningkatkan komitmennya untuk memperluas cakupan program CSR yang dimiliki.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Program CSR Perseroan dilakukan berlandaskan kesadaran penuh bahwa keberadaan Perseroan di tengah masyarakat sangat bergantung pada penerimaan masyarakat setempat terhadap Perseroan sebagai perusahaan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia. Atas dasar ini pula, Perseroan memfokuskan kegiatan CSR-nya pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan, terutama dalam bentuk kegiatan yang bersifat filantropi seperti donasi untuk korban bencana alam.

Di tahun 2019, Perseroan menyalurkan anggaran sebesar Rp523 juta untuk penyelenggaraan kegiatan CSR di sepanjang tahun. Adapun detail dari kegiatan CSR Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bantuan	Lokasi
CSR Tsunami Selat Sunda	17 Januari 2019	Rp25 juta	Selimut (42 pcs) & pakaian dalam dewasa & anak-anak (42 paket)	Banten & Lampung
CSR Kurban Idul Adha	8-10 Agustus 2019	Rp33 juta	Kambing (11 ekor)	Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah
CSR Gempa Maluku	10-11 Oktober 2019	Rp465 juta	Terpal (566 pcs), beras 5 kg (500 karung), mie instan (100 dus), selimut (250 pcs), sarung (100 pcs), portable genset (1 pcs), sarana MCK, instalasi air & toren (8 titik)	Pulau Haruku, Desa Tial, Liang & Waai



Penyerahan Bantuan Bencana Gempa dan Tsunami di Selat Sunda



Penyerahan Bantuan Bencana Gempa di Maluku



Penyerahan Bantuan Hewan Kurban



Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Perseroan telah mengasuransikan atau menjamin kualitas serta kinerja dari produk yang dijual kepada pelanggan/klien. Komitmen Perseroan atas perlindungan terhadap konsumen tercermin dalam standar etika Perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan senantiasa bekerja keras untuk memberikan layanan dengan kualitas terbaik;
2. Perseroan senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan;

3. Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem dan didukung teknologi yang memadai;
4. Selain mempertahankan kualitas produk, Perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses operasional;
5. Melakukan upaya evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, Perseroan telah memiliki Pusat Pengaduan Konsumen yang dapat disampaikan melalui email yang ditujukan kepada callcenter@stptower.com atau melalui 24 Hours Helpdesk di nomor 0800 1401 380.





Laporan Keuangan

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**

***PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan-Laporan Keuangan Tersendiri:		Supplementary Information-Separate Financial Statements:
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I/ <i>Appendix I</i>	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	Lampiran II/ <i>Appendix II</i>	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran III/ <i>Appendix III</i>	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran IV/ <i>Appendix IV</i>	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Pengungkapan Lainnya	Lampiran VI/ <i>Appendix V</i>	<i>Other Disclosures</i>



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER**

**Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian/
Regarding to the Responsibility for the Consolidated Financial Statements**

**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
For The Years Ended December 31, 2019 and 2018**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Nama/ <i>Name</i> | : | Nobel Tanihaha |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, RT.005/RW.002
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | (021) 5794 0688 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2 | Nama/ <i>Name</i> | : | Juliawati Gunawan Halim |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Perum Citra 3 Blok E-5/3A, RT.006/RW.013
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | (021) 5794 0688 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur/ <i>Director</i> |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan; | 1 | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information;</i> |
| 2 | Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2 | <i>The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3 | a) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3 | a) <i>All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;</i> |



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

- | | |
|---|--|
| <p>b) Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas Anak.</p> | <p>b) <i>The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.</i></p> <p>4 <i>We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

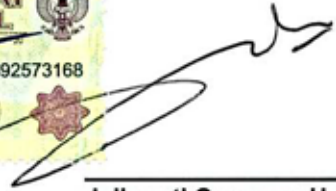
We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 6 Mei / May 6, 2020

Atas Nama dan Mewakili Direksi/ *On behalf of the Board of Directors*



Nobel Tanihaha
Direktur Utama/
President Director



Juliawati Gunawan Halim
Direktur/
Director



**RSM**

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00580/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/V/2020

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian ini bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan tentang dampak dari wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia terhadap PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian, manajemen berkeyakinan bahwa pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang tidak material terhadap kinerja usaha Perusahaan, meskipun terdapat ketidakpastian signifikan mengenai dampak kondisi ini terhadap kegiatan usaha Perusahaan di masa mendatang. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 34 for the accompanying consolidated financial statements that explain the impact of the corona virus (Covid-19) outbreak in Indonesia on the PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries. As disclosed in Note 34 to the consolidated financial statements, the management believes that the pandemic Covid-19 at this time has an immaterial impact on the Company's business performance, however there is significant uncertainty about the impact of the current conditions on the Company's business in the future. Our opinion is unmodified in respect of this matter.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended, is performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken a whole.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 6 Mei/May 6, 2020

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	3, 28	361,534	147,045	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	4, 27, 28	611,786	1,005,389	Trade Receivables
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5, 28	209,232	247,934	Accrued Income
Piutang Lain-lain	6, 27, 28	11,887	26,335	Other Receivables
Persediaan	7	37,649	35,295	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	25.a	264,173	355,081	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	8	268,345	256,442	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		1,764,606	2,073,521	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	8	799,699	847,204	Advances and Prepaid Expenses - Net of Current Portion
Aset Tetap	9	8,441,722	8,288,344	Property and Equipment
Aset Takberwujud	10	110,769	108,299	Intangible Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	11, 28	46,884	352,366	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	25.d	1,145	747	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		9,400,219	9,596,960	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		11,164,825	11,670,481	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	12, 28			Trade Payables
Pihak Berelasi	27	2,548	486	Related Party
Pihak Ketiga		8,512	14,410	Third Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	28	15,383	157	Other Current Financial Liabilities
Utang Pajak	25.b	7,791	8,863	Taxes Payable
Akrual	13, 28	171,741	77,463	Accruals
Pendapatan Ditangguhkan	14	688,183	852,120	Deferred Income
Utang Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loan
Utang Bank Jangka Pendek	15.a, 28	300,000	360,000	Short-Term Bank Loan
Bagian Lancar atas Utang Bank Berjangka	15.b, 28	372,831	222,766	Current Portion of Term Bank Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1,566,989	1,536,265	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Sindikasi Berjangka	15.b, 28	6,585,646	7,134,063	Syndicated Term Bank Loans
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	38,674	30,248	Long-Term Employment Benefits Obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		6,624,320	7,164,311	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8,191,309	8,700,576	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (Rupiah Penuh) per Saham				Share Capital - Rp100 (Full Amount) Par Value per Share
- Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham				- Authorized Capital - 2,000,000,000 Shares
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.137.579.698 Saham	17	113,758	113,758	- Issued and Paid-Up Capital - 1,137,579,698 Shares
Tambahan Modal Disetor - Bersih	18	3,589,771	3,589,771	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lainnya	19	(247,200)	(14,145)	Other Comprehensive Income
Defisit		(482,813)	(719,479)	Deficits
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2,973,516	2,969,905	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		--	--	Non-controlling Interest
Jumlah Ekuitas		2,973,516	2,969,905	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		11,164,825	11,670,481	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN	20, 27	1,767,050	1,899,775	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21			COST OF REVENUES
Penyusutan dan Amortisasi		(368,167)	(359,618)	Depreciation and Amortization
Beban Pokok Pendapatan Lainnya		(123,933)	(119,055)	Other Cost of Revenues
Jumlah		<u>(492,100)</u>	<u>(478,673)</u>	Total
LABA BRUTO		1,274,950	1,421,102	GROSS PROFIT
Beban Usaha	22			Operating Expenses
Penyusutan dan Amortisasi		(24,026)	(23,774)	Depreciation and Amortization
Beban Usaha Lainnya		(165,077)	(142,989)	Other Operating Expenses
Jumlah		<u>(189,103)</u>	<u>(166,763)</u>	Total
LABA USAHA		1,085,847	1,254,339	OPERATING PROFIT
Penghasilan Bunga	23.a	13,058	7,984	Interest Income
Beban Keuangan	23.b			Financial Charges
Beban Bunga		(523,919)	(513,710)	Interest Expense
Beban Keuangan Lainnya		(331,966)	(440,893)	Other Financial Charges
Kenaikan (Penurunan) Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	9	200,444	(919,255)	Net Increase (Decrease) of Revaluation of Towers and Supporting Equipment
Beban Lain-lain - Neto	24	<u>(201,593)</u>	<u>(590,803)</u>	Other Expenses - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		241,871	(1,202,338)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	25.c	<u>(13,489)</u>	<u>(21,505)</u>	Income Tax Expense
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>228,382</u>	<u>(1,223,843)</u>	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	16	(1,552)	6,165	Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	16, 25.d.	50	(202)	Income Tax of Remeasurement of Defined Benefits Plan
Kenaikan (Penurunan) Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	9	(96,249)	205,271	Net Increase (Decrease) of Revaluation of Towers and Supporting Equipment
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	19	(1,279)	15,170	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen				Effective Portion of Loss on Hedging
Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas	19	<u>(125,741)</u>	<u>(126,066)</u>	Instrument Related with Cash Flow Hedge
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		<u>(224,771)</u>	<u>100,338</u>	Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>3,611</u>	<u>(1,123,505)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		228,382	(1,223,843)	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		<u>--</u>	<u>--</u>	Non-controlling Interest
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>228,382</u>	<u>(1,223,843)</u>	TOTAL PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		3,611	(1,123,505)	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		<u>--</u>	<u>--</u>	Non-controlling Interest
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>3,611</u>	<u>(1,123,505)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM:				EARNINGS (LOSS) PER SHARE:
Laba (Rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (Rupiah Penuh)				Profit (Loss) for the year attributable to shareholders of common shares of the Company (Full Rupiah)
Dasar	26	201	(1,076)	Basic

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Model Saham/ Share Capital	Tambahkan Model Disetor - Bersih/ Additional Paid-in Capital - Net	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income				Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficits)				Jumlah/ Ekuitas/ Total Equity		
		Bagian Efektif dari Keuntungan Instrumen Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Aus Kas/ Effective Portion of Loss on Hedging Instrument Supporting Related with Cash Flow Hedge	Kenaikan (Penurunan) Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang/ Net Increase (Decrease) in Revaluation of Towers and Supporting Equipment	Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing/ Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency	Pengukuran atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefits Plan	Jumlah/ Total	Yang Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
SALDO PADA TANGGAL 1 JANUARI 2018	113.758	3.589.771	(247.392)	123.497	1.125	3.123	(119.647)	22.900	486.628	509.528	4.093.410	BALANCE AS OF JANUARY 1, 2018
<i>Movements in Equity in 2018</i>												
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2018												
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba	--	--	--	5.164	--	--	5.164	--	(5.164)	(5.164)	--	
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(126.086)	205.271	15.170	5.963	100.338	--	(1.223.843)	(1.223.843)	(1.123.505)	Total Comprehensive Income (Loss) for the Year
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018	113.758	3.589.771	(373.458)	333.932	16.295	9.086	(14.145)	22.900	(742.379)	(719.479)	2.869.905	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018
<i>Movements in Equity in 2019</i>												
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2019												
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba	--	--	--	(8.284)	--	--	(8.284)	--	8.284	8.284	--	
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(125.741)	(96.249)	(1.279)	(1.502)	(224.771)	--	228.382	228.382	3.611	Total Comprehensive Income (Loss) for the Year
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019	113.758	3.589.771	(499.199)	229.399	15.016	7.584	(247.200)	22.900	(905.713)	(482.813)	2.973.516	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements*

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the Years Ended
 December 31, 2019 and 2018
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		2,154,474	1,892,016	Cash Received from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya		(165,813)	(137,503)	Payment to Suppliers and Others
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan		(124,381)	(112,414)	Payments for Management and Employees
Penerimaan Bunga		13,058	7,984	Interest Received
Penerimaan Restitusi Pajak		43,361	19,634	Receipts from Tax Refund
Pembayaran Pajak Penghasilan		(43,730)	(32,665)	Cash Paid For Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>1,876,969</u>	<u>1,637,052</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan Aset Tetap	9	(299,348)	(161,295)	Addition of Property and Equipment
Penambahan Aset Takberwujud		(6,880)	--	Addition of Intangible Assets
Pembayaran Sewa Lahan		(223,391)	(210,370)	Payments For Land Lease
Uang Muka Konstruksi		(4,689)	(3,159)	Advances for Construction
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(534,308)</u>	<u>(374,824)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Transaksi Utang Sindikasi	15			Syndicated Loan Transactions
Penerimaan		400,000	3,979,763	Proceeds
Pembayaran		(723,188)	(508,290)	Payments
Pembayaran Beban Keuangan		(805,560)	(733,256)	Payment of Financial Charges
Pembayaran Utang Obligasi		--	(4,123,500)	Payment Bond Obligation
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(1,128,748)</u>	<u>(1,385,283)</u>	Net Cash Flows Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		213,913	(123,055)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
DAMPAK SELISIH KURS PADA BANK		576	(10,049)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ON CASH IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		147,045	280,149	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	3	<u>361,534</u>	<u>147,045</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 33.

Information of non-cash transaction is presented in Note 33.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007 Tambahan No. 9241/2007. Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 11 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, Emiten, Perusahaan Publik dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0941293 tanggal 15 Juni 2015. Perubahan anggaran dasar terakhir, berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 13 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan Perseroan. Pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0048628 tanggal 16 Mei 2016.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008. Saat ini, kegiatan usaha Perusahaan adalah pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Kharisma Indah Ekaprima. Entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Deltamas Abadi Makmur.

1.a. The Company's Establishment

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (hereinafter called "the Company") was established based on Notarial Deed No. 5 dated July 25, 2006 made in presence of Ridjqi Nurdiani, S.H., Notary in Bekasi. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007. Based on Notarial Deed No. 9 dated June 11, 2015 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, concerning as the amendment of Company's Articles of Association to conform with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners, Listed Company, Public Company and POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Conducting of General Meetings Shareholders of Public Company. The amendment notice has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No. AHU-AH.01.03-0941293 dated June 15, 2015. The latest amended articles of association, based on Notarial Deed No. 8 dated May 13, 2016 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, regarding the addition of paid in capital. The amendment notice has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No. AHU-AH.01.03-0048628 dated May 16, 2016.

In accordance with the Company's Articles Association, the main business activities of the Company are operating and renting of Base Transceiver Station (BTS) tower building or telecommunications towers and other related telecommunication infrastructure. The Company started its commercial activities in March 2008. Currently, the Company's business activities are operating and renting of towers and supporting equipment or telecommunications towers and other telecommunication infrastructures directly or through subsidiaries.

Parent entity of the Company is PT Kharisma Indah Ekaprima. Ultimate parent entity of the Company is PT Deltamas Abadi Makmur.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia.

The Company is domiciled in Jakarta with office address at Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, South Jakarta, Indonesia.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 15 Mei 2019 dan Akta Notaris No. 21 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on Notarial Deed No. 8 dated May 15, 2019 and Notarial Deed No. 21 dated May 23, 2017 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Dewan Komisaris			Boards of Commissioners
Komisaris Utama	Jeffrey Yuwono	Jonathan Yuwono	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Ludwig Indrawan	Ludwig Indrawan	Vice President Commissioner
Komisaris	Thong Thong Sennelius	Thong Thong Sennelius	Commissioner
Komisaris Independen	Muhamad Senang Sembiring	Muhamad Senang Sembiring	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Erry Firmansyah	Erry Firmansyah	Independent Commissioner
Direksi			Directors
Direktur Utama	Nobel Tanihaha	Nobel Tanihaha	President Director
Direktur	Juliawati Gunawan *)	Juliawati Gunawan *)	Director
Direktur Independen	Tommy Gustavi Utomo	Tommy Gustavi Utomo	Independent Director

*) Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

*) Serves as the Corporate Secretary

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Based on Boards of Commissioners' Decision, the composition of Audit Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Muhamad Senang Sembiring	Chairman
Anggota	Sujoko Martin	Member
Anggota	Anwar Muljadi Arif	Member

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") masing-masing sebanyak 390 dan 355 orang.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries ("Group") has 390 and 355 person, respectively.

1.c. Penawaran Umum Saham Perusahaan Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 29 September 2011, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp3.400 (Rupiah penuh) per saham.

1.c. The Company's Public Offering of Shares Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company received the effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 to offer 100,000,000 shares to the public with par value amounted to Rp100 (full Rupiah) per share with initial offering price amounted to Rp3,400 (full Rupiah) per share.

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp320.524, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp9.476 (Catatan 18).

The excess amount received from the issuance of share over its par value amounting to Rp320,524 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp9,476 (Note 18).

Penawaran Umum Terbatas I

Pada tanggal 8 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan Rupiah nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp4.800 (Rupiah penuh) per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (Rupiah penuh) waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 (Rupiah penuh) dengan masa berlaku pelaksanaan tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company received the effective statement from the Chairman of Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 related to Limited Public Offering I in order to issue Pre-emptive Rights (HMETD) amounting to 135,000,000 shares with par value of Rp100 (full Rupiah) per share with offering price of Rp4,800 (full Rupiah) per share and maximum 59,400,000 (full Rupiah) warrants. The exercise price of warrant amounted to Rp4,800 (full Rupiah) with exercise period from March 6, 2013 to August 28, 2015.

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp630.595, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp3.905 (Catatan 18).

The excess amount received from the issuance of share over its par value amounting to Rp630,595 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp3,905 (Note 18).

Waran mengalami penyesuaian dengan adanya Penawaran Umum Terbatas II menjadi 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.367 (Rupiah penuh).

Warrant has been adjusted in connection to Limited Public Offering II to be 59,415,534 warrants with exercise price of Rp3,367 (full Rupiah).

Sampai dengan berakhirnya masa berlaku pelaksanaan, jumlah waran yang dilaksanakan adalah 59.414.674 waran. Selisih lebih jumlah yang diterima dari waran yang dilaksanakan adalah sebesar Rp279.176 dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 18).

Up to end of the exercise period, the number of warrants exercised are 59,414,674 warrants, the excess amount received from warrants exercised amounted to Rp279,176 is recorded in "Additional Paid-In Capital" account (Note 18).

Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau *telecommunication sites* dan modal kerja.

The use of proceeds resulting from above public offering are relating to acquisition, construction of towers and/or telecommunication sites and working capital.

Penawaran Umum Terbatas II

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan No.S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD)

Limited Public Offering II

On December 19, 2014, the Company received the effective statement from Financial Services Authority No.S-550/D.04/2014 related to Limited Public Offering II in order to issue Pre-emptive Rights (HMETD) amounted to 343,165,024 ordinary shares with par value amounted to

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp7.000 (Rupiah penuh) per saham.

Periode pelaksanaan PUT II dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 16 Januari 2015.

Selisih lebih jumlah dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp2.359.200, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp8.639 (Catatan 19).

Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas setelah dikurangi antara pinjaman pemegang saham Perusahaan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyeteroran modal, untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Seluruh saham dan waran diatas tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rp100 (full Rupiah) per share and an offering price amounted to Rp7,000 (full Rupiah) per share.

The period of PUT II held on January 9 until January 16, 2015.

The excess amount from the issuance of share over its par value amounted to Rp2,359,200 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp8,639 (Note 19).

The use of proceeds resulting from above public offering after net-off between the Company's shareholder loan to PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) with KIE's liability to pay the shares subscribed are relating to payment of a portion of loan facility and for working capital.

All shares and warrants above are listed in Indonesia Stock Exchange (BEI).

1.d. Entitas-entitas Anak

Kepemilikan saham Perusahaan pada entitas anak yang dikonsolidasi, baik secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

1.d. Subsidiaries

The Company's ownerships, directly and indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas-entitas Anak/Subsidiaries	Bidang Usaha/ Activity	Domisili/ Domicile	Tanggal Pendirian/ Establishment Date	Dimulainya Kegiatan Operasi/ Commencement of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
						2019	2018
PT Sarana Inti Persada	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS / Operating and leasing of BTS tower	Bandung	12 Oktober / October 12, 2004	2005	100%	212,617	202,090
PT Platinum Teknologi	Perdagangan / Trading	Jakarta	13 September / September 13, 2011	--	100%	801,459	801,459
PT Gema Dwimitra Persada	Perdagangan / Trading	Jakarta	25 September / September 25, 2008	--	100%	793,854	793,854
PT BIT Teknologi Nusantara	Penyewaan menara dan jasa jaringan / Tower leasing and network services	Jakarta	9 Agustus / August 9, 2004	2009	100%	1,119,588	1,269,267
PT Broadband Wahana Asia	Investasi / Investment	Jakarta	14 Maret / March 14, 2011	--	100%	7,512	7,514
PT Rekajasa Akses	Penyewaan jasa jaringan / Network services	Jakarta	7 Agustus / August 7, 2000	2010	75%	16,100	15,626
Pratama Agung Pte. Ltd.	Investasi / Investment	Singapura/Singapore	14 Maret / March 14, 2013	2015	100%	29,949	32,621
Kharisma Agung Pte. Ltd *)	Perdagangan / Trading	Singapura/Singapore	4 November / November 4, 2014	2015	100%	--	--

*) Dilikuidasi pada tahun 2019 / Liquidated in 2019

Perusahaan membeli 99,87% saham PT Sarana Inti Persada (SIP) dan 99,99% saham PT Platinum Teknologi (PT) masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011 dan 16 Februari 2012. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 dan 16 Februari 2012 laporan keuangan SIP dan PT dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan. PT memiliki PT Gema Dwimitra Persada dan PT BIT Teknologi Nusantara secara langsung dan tidak langsung.

The Company acquired 99.87% shares of PT Sarana Inti Persada (SIP) and 99.99% shares of PT Platinum Teknologi (PT) on December 27, 2011 and February 16, 2012, respectively. In connection with the acquisition, starting December 27, 2011 and February 16, 2012, the financial statements of SIP and PT are consolidated in the Company's financial statements. PT has ownership in PT Gema Dwimitra Persada and PT BIT Teknologi Nusantara directly and indirectly.

Pada tahun 2013 entitas anak membeli seluruh saham kepentingan nonpengendali atas SIP dan PT di atas.

In 2013, the subsidiaries purchased all the non-controlling shares of SIP and PT above.

Perusahaan dan PT membeli 100% saham PT Broadband Wahana Asia (BWA) pada tanggal 24 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 laporan keuangan BWA dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan.

The Company and PT acquired 100% shares of PT Broadband Wahana Asia (BWA) on June 24, 2016 which become effective on January 1, 2016. As a result of the acquisition, starting January 1, 2016, the financial statement of BWA is consolidated in to the Company's financial statements.

BWA memiliki 75% saham PT Rekajasa Akses. Berdasarkan perjanjian antara pemegang saham, disepakati untuk melakukan pengalihan hak dan kepentingan meliputi diantaranya hak untuk mencatat dalam pembukuan bahwa BWA memiliki 100% kepentingan atas seluruh kekayaan dan pendapatan PT Rekajasa Akses untuk periode 5 (lima) tahun pertama sejak pengalihan.

BWA has 75% ownership in PT Rekajasa Akses. Based on agreement between the shareholders, it is agreed to transfer rights and interest including the rights of BWA to record and consolidate 100% of all PT Rekajasa Akses assets and revenue for the period of 5 (five) years since the date of acquisition).

Pada tanggal 6 Mei 2019, Kharisma Agung Pte. Ltd. telah dilikuidasi berdasarkan surat dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) dengan nomor 201432881N.

On May 6, 2019, Kharisma Agung Pte. Ltd. has been liquidated based on letter from the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) with number 201432881N.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidance for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, yaitu:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman";
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan";
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama";
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and elements included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2019, are as follows:

- PSAK 22 (Improvement 2018): "Business Combination";
- PSAK 24 (Amendment 2018): "Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- PSAK 26 (Improvement 2018): "Borrowing Cost";
- PSAK 46 (Improvement 2018): "Income Taxes";
- PSAK 66 (Improvement 2018): "Joint Arrangement";
- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISAK 34: "Uncertainty over Income Tax Treatments".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and controlled entities as described in Note 1.d.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. where the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control over the acquired business, until such control ceases.

Parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entity are eliminated in full on consolidation.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the Parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2.e. Instrumen Keuangan **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount of which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent.

If the Group loses control over the subsidiary, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is ceases;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when the control is ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the cessation of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when the control is ceased;*
- (e) Reclassify to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other SAKs, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.*

2.e. Financial Instrument **Initial Recognition and Measurement**

The Group recognize a financial assets or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial

mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
 - (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual segera dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, its fair value is added or deducted with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified as fair value through profit or loss are immediately expensed.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on its classification on initial recognition. The Group classifies financial assets into one of the following four categories:

- (i) **Financial Assets At Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as fair value through profit or loss. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing within near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) **Loans and Receivables**
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) *those that are determined to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as fair value through profit or loss;*

- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iv) Available-for-Sale Financial Assets (AFS)
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition are designated as fair value through profit or loss. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers

pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa

substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligation occurred or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.

The Group derecognizes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial*

depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of

bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all commission and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification near to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different level in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the entire fair value measurement:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between level of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period which the change occurred.

Lindung Nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif *swap* dan opsi atas kurs dan tingkat bunga untuk lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas pada risiko perubahan selisih kurs dan tingkat bunga mengambang.

Dalam bisnis normal Grup terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan keuangan tertulis dari manajemen, Perusahaan menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Grup menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektifitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

Lindung Nilai Atas Arus Kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Hedging

The Group uses derivative financial instruments of cross currency and interest rate swap and option to hedge the exposure of variability in cash flows that is attributable to fluctuation of exchange rate and floating interest rate risks.

The normal course of the Group's business exposes it to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company uses derivatives and other hedging instruments. PSAK 55 allows three types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

The Group uses hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Cash Flow Hedge

The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognised (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognised in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Grup mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Derivatif

Seluruh derivatif awalnya diakui dan selanjutnya dinyatakan pada nilai wajar. Kebijakan Grup menggunakan derivatif hanya untuk tujuan lindung nilai. Akuntansi untuk derivatif dalam hubungan lindung nilai diuraikan dalam bagian di atas.

Jika, Grup melibatkan derivatif untuk melindungi nilai beberapa transaksi tetapi kriteria lindung nilai yang ketat sesuai PSAK 55 tidak dipenuhi. Dalam hal ini, meskipun transaksi memiliki alasan ekonomi dan bisnis, akuntansi lindung nilai tidak dapat diterapkan. Akibatnya, perubahan dalam nilai wajar derivatif tersebut diakui dalam laba rugi dan akuntansi untuk item yang dilindung nilai mengikuti kebijakan Grup untuk item tersebut.

Derivatif Melekat

Derivatif melekat dalam kontrak utama nonderivatif diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik dan risiko dari kontrak utama dan kontrak utama tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2.f. Kas dan Bank

Kas dan Bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro), yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Group reclassifies the associated gains and losses that were recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

Derivatives

All derivatives are initially recognized and subsequently carried at fair value. The Group policy is to use derivatives only for hedging purposes. Accounting for derivatives engaged in hedging relationship is described in the above section.

If, the Group enters into certain derivatives in order to hedge some transactions but the strictly hedging criteria prescribed by PSAK 55 are not met, even though the transaction has its economic and business rationale, hedge accounting cannot be applied. As a result, changes in the fair value of those derivatives are recognized in profit or loss and accounting for the hedged item follows the Group's policies for that item.

Embedded Derivatives

Embedded derivatives in non-derivative host contracts are treated as separate derivatives when their risks and economic characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value to profit or loss.

2.f. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are cash on hand and cash in banks (demand deposits) that are not used as collateral or are not restricted in use.

2.g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode biaya masuk pertama keluar pertama. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dan dikelompokkan sebagai aset lancar dan tidak lancar, mana yang lebih tepat.

2.i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Aset tetap, kecuali menara dan sarana penunjang, dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

2.g. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the first in first out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period of the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in against cost of inventories recognized in the period in which the reversal occurs.

2.h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the period benefited, and are classified as current or non-current assets, whichever is more appropriate.

2.i. Property and Equipment

Property and Equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Property and equipment, except Property and Supporting Equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Setelah pengakuan awal, menara dan sarana penunjang dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Sebagian surplus revaluasi dialihkan sejalan dengan penggunaan aset ke saldo laba sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset awalnya. Pada saat penghentian pengakuan aset, surplus revaluasi untuk aset tersebut dialihkan ke saldo laba.

After initial recognition towers and supporting equipment are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses.

When an item of fixed assets is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset.

The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with the following policy.

If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.

If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognised in profit or loss. However, the decrease is recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluations are performed with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

Sum of revaluation surplus is transferred as the asset is used to retained earnings amounting to the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the assets and depreciation based on the asset's original cost. Upon asset disposal, any revaluation surplus relating to those asset is transferred to retained earnings.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus, berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

<u>Tahun/Years</u>		
Menara dan Sarana Penunjang	30	Towers and Supporting Equipment
Bangunan	20	Buildings
Menara Bergerak	8	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	4 – 20	Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	4 – 8	Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	4	Vehicles
Antena Indoor	8	Indoor Antenna

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Construction in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipments account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir tahun buku, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed every year ended, and adjusted prospectively, if appropriate.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset) is credited or charged to operations in the asset is derecognized. At the end of each financial period, the Group reviews useful life, residual values, methods of depreciation, and the remaining useful life based on technical condition.

2.j. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir tahun, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Penurunan Nilai Goodwill

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh goodwill merepresentasikan level terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi.

2.j. Impairment of Assets

In the end of the year, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

Impairment of Goodwill

Irrespective of whether there is any indication of impairment, goodwill is tested for impairment annually.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each cash-generating unit, or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree were assigned to those units or groups of units. Each unit or group of units to which the goodwill is so allocated represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes and is not larger than an operating segment.

2.k. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

2.k. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK's.

Component of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

2.1. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas dari pelapor.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.1. Related Parties Transactions and Balances
A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.m. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek

(b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*

- (i) *The entity and the reporting entity are members of the same business group (i.e. parent entity, subsidiary and the fellow subsidiary is related to the others);*
- (ii) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group of which the other entity is members);*
- (iii) *Both entities are joint ventures of the same third party;*
- (iv) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
- (v) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employee benefit of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
- (vi) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or*
- (vii) *A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- (viii) *The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.m. Employees Benefits

Short-term Employment Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during the accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits

yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include as among wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance pay and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefits liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) *When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) *When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang muka sewa yang diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan Ditangguhkan" dan diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya. Pendapatan sewa properti investasi yang belum ditagih disajikan sebagai piutang yang belum difakturkan dan dicatat di akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

2.o. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

2.n. Revenue and Expenses Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Rental income from operating lease of is recognized as revenue when earned. The rental received in advance are presented as "Deferred Income" and recognized as income on straight-line basis over the lease term. Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as accrued income and recorded in Accrued Income.

Expenses are recognized as incurred on accrual basis.

2.o. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it

pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group are offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*

- i. *the same taxable entity; or*
- ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- a) *has legally enforceable rights to offset the recognized amounts; and*
- b) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously*

2.p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

2.p. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Group receives SKPP.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Group has disclosed the following in its financial statements:

- i. Tanggal SKPP
- ii. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP
- iii. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

- i. *The date of SKPP*
- ii. *Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP*
- iii. *Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

2.q. Laba Per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

2.q. Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity with the weighted average ordinary shares outstanding during the period.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusi, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the impact of all dilutive potential ordinary shares.

2.r. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

2.r. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and most of the subsidiaries is Rupiah.

Mata uang fungsional Pratama Agung Pte. Ltd. (PA), entitas anak adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas PA pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan

The functional currency of Pratama Agung Pte. Ltd. (PA), a subsidiary, is United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of PA at reporting date are translated at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using transaction rate for the period. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income

komprehensif lain dalam akun "Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing".

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp13.901 (Rupiah Penuh) per 1 USD, Rp10.320 (Rupiah Penuh) per 1 SGD dan Rp14.481 (Rupiah Penuh) per 1 USD, Rp10.602 (Rupiah Penuh) per 1 SGD.

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

income in "Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency" account.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e. middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2019 and 2018 is Rp13,901 (full Rupiah) per 1 USD, Rp10,320 (full Rupiah) per 1 SGD and Rp14,481 (full Rupiah) per 1 USD, Rp10,602 (full Rupiah) per 1 SGD, respectively.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.s. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya selama 5-11 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika, dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.s. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either definite or indefinite.

Intangible Asset with Definite Useful Life

Intangible asset with definite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Amortization is calculated so as to write-off the cost of the asset less its estimated residual value, over its useful economic life of 5-11 years.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset derecognised if, disposed or when there was no longer economic benefits future expected from its use or disposal.

Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud merupakan perbedaan antara nilai neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan.

Gain or loss arises from derecognition of intangible asset is the difference between the value of net disposed (if any) and the number of registered assets. Gain or losses recognized in profit or loss when the asset was retired. Gain is not recognized as revenue.

Goodwill

Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Goodwill

Goodwill arising in a business combination is initially measured at its cost, being the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Goodwill tidak diamortisasi.

After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is not amortised.

2.t. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

2.t. Operating Segments

Group presented operating segments based on the financial information used by the operational decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by operational decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.u. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.u. Leases

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Lessee

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Lessor

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Group as Lessee

At the commencement of the lease term, Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the property and equipment that are owned.

Under an operating lease, the Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as Lessors

The Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment in the finance lease as lessor.

The Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.v. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar Aset Tetap

Nilai wajar aset tetap bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari aset tetap. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

2.v. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions

Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Fair Value of Property and Equipment

The Group's fair value of property and equipment depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believe that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property. Further details are disclosed in Note 9.

Penurunan Nilai Goodwill

Dalam melakukan estimasi penurunan nilai *goodwill*, manajemen Grup melakukan analisis dan *assessment* atas kemampuan unit penghasil kas, kondisi perubahan operasi entitas akuisisian dan pengalihan unit penghasil *goodwill*. Bila terdapat indikasi penurunan kemampuan unit penghasil kas dalam menghasilkan kas dan manajemen berkeyakinan bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan kas, maka manajemen akan melakukan *impairment* atas *goodwill*. Bila terjadi perubahan operasional unit bisnis dan/atau unit penghasil kas telah dialihkan, maka seluruh nilai *goodwill* yang dicatat sebelumnya akan diturunkan nilainya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Catatan 2.i). Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 9.

Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir tahun pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama

Impairment of Goodwill

In estimating the impairment of goodwill, the Group's management performs analysis and assessment of the ability of the cash generating unit, the change of the operating conditions of acquired entity and transfer of goodwill generating unit. If there are indications of a decrease in the ability of the cash generating unit in generating cash and management believes that the cash generating unit decrease the ability to generate cash, then the management will do the impairment of goodwill. If there is a change in the operational business units and/ or cash-generating unit has been transferred, the entire value of goodwill previously recorded will be impaired.

Estimated Useful Life of Property and Equipment

The Group reviews periodically the estimated useful life of property and equipment based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates due to changes in the mentioned factors above (Note 2.i). Carrying value of property and equipment is disclosed in Note 9.

Post-Employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.

The Group determines the appropriate discount rate at end of reporting year by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle this obligation. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that has a similar year to the corresponding year of obligation. Other key assumption is partly determined by current market conditions, during the year in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits

periode dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir tahun pelaporan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Grup mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 4 dan 11.

Sehubungan dengan provisi spesifik, Perusahaan memiliki tagihan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Internux (INUX) yang telah direstrukturisasi (Catatan 11), karena menurut evaluasi manajemen terdapat ketidakpastian dalam penyelesaiannya, sehingga seluruh piutang Grup dari BTEL dan INUX telah dicatat cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar nilai tercatat piutang kepada BTEL dan INUX.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model

assumption will impact on recognition of actuarial gains or losses at the end of the year. Further details are disclosed in Note 16.

Allowance for Impairment Loss

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expected to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment loss of accounts receivable. Further details are disclosed in Notes 4 and 11.

In relation to specific provision, the Company has receivables from PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) and PT Internux (INUX) which were restructured (Note 11), due to based on the management's assesment that the uncertainty of the receivables repayment, all the Group's receivables from BTEL and INUX has been provided by provision for impairment loss at the carrying value of BTEL and INUX's receivables.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, Management's judgment is required to determine fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives

seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

and discount rate, accelerated repayment rate, and default rate assumptions.

Estimasi Pajak Tangguhan

Pengakuan aset pajak tangguhan dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada tahun mendatang, di mana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi laba kena pajak di masa datang dan perencanaan strategis perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhnya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks di mana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat (Catatan 25.d).

Deferred Tax Estimation

Deferred tax assets recognition is performed only if it is probable that the asset will be recovered in the form of economic benefits to be received in future years, in which the temporary differences and tax losses can still be used. Management also considers the future estimated taxable income and strategic tax planning in order to evaluate its deferred tax assets in accordance with applicable tax laws and its updates. As a result, related to its inherent nature, it is likely that the calculation of deferred taxes is related to a complex pattern where assessment requires a judgment and is not expected to provide an accurate calculation (Note 25.d).

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

ii. Critical judgments in applying the accounting policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2018) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.e.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2018). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.e.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kas dan Bank

3. Cash on Hand and in Banks

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas	489	272	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	224,961	62,293	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Standard Chartered Bank	85,724	20,895	Standard Chartered Bank
PT Bank Shinhan Indonesia	20,003	--	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12,512	2,003	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1,779	705	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Citibank N.A., Cabang Jakarta	1,741	515	Citibank N.A., Jakarta Branch
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	500	874	Others (below Rp1,000 each)
Subjumlah	347,220	87,285	Subtotal
<u>US Dolar</u>			<u>US Dollar</u>
Standard Chartered Bank			Standard Chartered Bank
(2019: USD878,505; 2018: USD3,528,111)	12,212	51,091	(2019: USD878,505; 2018: USD3,528,111)
PT Bank BNP Paribas Indonesia			PT Bank BNP Paribas Indonesia
(2019: USD77,402; 2018: USD559,630)	1,076	8,104	(2019: USD77,402; 2018: USD559,630)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (USD27,403)	382	--	PT Bank CIMB Niaga Tbk (USD27,403)
Lain-lain (2019: USD11,151; 2018: USD20,220)			Others (2019: USD11,151; 2018: USD20,220)
(masing-masing di bawah USD15,000)	155	293	(below USD15,000 each)
Subjumlah	13,825	59,488	Subtotal
Jumlah Kas dan Bank	361,534	147,045	Total Cash on Hand and in Banks

4. Piutang Usaha

4. Trade Receivables

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Party (Note 27)
PT Sekawan Abadi Prima	19	--	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak Ketiga			Third Parties
PT XL Axiata Tbk	478,105	644,753	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	107,496	226,539	PT Hutchison 3 Indonesia
PT First Media Tbk	27,155	27,155	PT First Media Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	28,570	136,437	Others (below Rp10,000 each)
Subjumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga	641,326	1,034,884	Subtotal Trade Receivables from Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(29,559)	(29,495)	Less: Allowance for Impairment Loss
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga - Neto	611,767	1,005,389	Total Trade Receivable from Third Parties - Net
Jumlah Piutang Usaha - Neto	611,786	1,005,389	Total Trade Receivables - Net

Perubahan cadangan kerugian nilai adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment loss is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Saldo Awal Tahun	29,495	--	Beginning Balance
Penambahan	759	29,495	Addition
Penghapusan	(695)	--	Write-off
Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	29,559	29,495	Total Allowance for Impairment Loss

Berdasarkan penelaahan manajemen atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on the management's review of the individually trade receivable balance at the end of reporting period, management believes that the allowance for impairment loss is sufficient to cover the possible loss that might arise from uncollected trade receivables.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 28.

Analysis of trade receivables by maturity is presented in Note 28.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas utang bank sindikasi jangka panjang (Catatan 15.b).

Trade receivables used as collateral for long-term syndicated bank loans (Note 15.b).

5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

5. Accrued Income

Berikut merupakan rincian pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan pelanggan:

The detail of accrued income by customer is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Telekomunikasi Selular	95,706	111,162	PT Telekomunikasi Selular
PT XL Axiata Tbk	72,347	119,051	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	28,764	5,611	PT Hutchison 3 Indonesia
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	12,415	12,110	Others (below Rp10,000 each)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	209,232	247,934	Total Accrued Income

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan lainnya yang belum ditagih karena kelengkapan dokumen penagihan sedang dalam proses verifikasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Accrued income represents unbilled rental income of telecommunication towers and others due to the completeness of billing documents were in the verification process as of December 31, 2019 and 2018.

6. Piutang Lain-lain

6. Other Receivables

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Party (Note 27)
PT Sekawan Abadi Prima	--	18	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak ketiga	11,887	26,317	Third Parties
Jumlah Piutang Lain-lain	11,887	26,335	Total Other Receivables

7. Persediaan

7. Inventory

Akun ini terdiri dari persediaan atas material konstruksi menara dan sarana penunjang, peralatan telekomunikasi dan suku cadang.

This account consists of the supply of tower construction materials and supporting equipment, telecommunication equipments and spare parts.

Persediaan Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Asuransi FPG Indonesia, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp13.458 dan Rp33.700 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Inventory of the Group has been insured against fire, earthquake, thieves, damages and other risks to PT Asuransi FPG Indonesia, third party, with a sum insured amounted to Rp13,458 and Rp33,700 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

8. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

8. Advances and Prepaid Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Sewa Lahan	929,423	886,952	Land Lease
Uang Muka Operasional	60,569	62,324	Operational Advances
Sewa Jaringan Serat Optik (Catatan 30.b.2)	54,998	61,998	Fiber Optic Lease (Note 30.b.2)
Perizinan dan Lain-lain	23,054	92,372	Permits and Others
Jumlah	1,068,044	1,103,646	Total
Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang			Prepaid Expenses - Non-Current Portion
Sewa Lahan	741,423	723,378	Land Lease
Sewa Jaringan Serat Optik (Catatan 30.b.2)	47,998	54,998	Fiber Optic Lease (Note 30.b.2)
Perizinan dan Lain-lain	10,278	68,828	Permits and Others
Jumlah Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang	799,699	847,204	Total Prepaid Expenses - Non-Current Portion
Jumlah - Bagian Jangka Pendek	268,345	256,442	Total - Current Portion

Grup memiliki perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga yang antara lain berlokasi di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

The Group entered land lease agreements with third parties which among others, located in Java, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi and Papua.

Perizinan dan lain-lain terutama merupakan biaya perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diamortisasi sesuai masa berlakunya.

Permits and others is mainly represented Building Construction Permits (IMB) acquisition costs which amortized over the IMB validity period.

9. Aset Tetap

9. Property and Equipment

	2019						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Model Revaluasi							Revaluation Model
Menara dan Sarana Penunjang	7,757,686	263,494	(165,995)	5,137	119,101	(96,249)	7,883,174
							Towers and Supporting Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Menara dan Sarana Penunjang	--	(83,264)	1,921	--	81,343	--	--
							Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	7,757,686	180,230	(164,074)	5,137	200,444	(96,249)	7,883,174
							Subtotal
Model Biaya							Cost Model
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	10,969	--	--	--	--	--	10,969
Menara Bergerak	22,857	--	--	--	--	--	22,857
Jaringan, Serat Optik dan Infrastruktur	741,269	27,600	--	10,626	--	--	779,495
Peralatan dan Perabot Kantor	53,636	1,421	(78)	(8,172)	--	--	46,807
Kendaraan	2,945	--	(620)	--	--	--	2,325
Antena Indoor	32,665	837	--	82	--	--	33,584
Subjumlah	864,341	29,858	(698)	2,536	--	--	896,037
							Subtotal
Aset Dalam Penyelesaian							Construction in Progress
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	7,684	20,077	--	(1,385)	--	--	26,376
Menara dan Sarana Penunjang	9,801	55,837	--	(5,137)	--	--	60,501
Subjumlah	17,485	75,914	--	(6,522)	--	--	86,877
							Subtotal
Jumlah	881,826	105,772	(698)	(3,986)	--	--	982,914
							Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	(3,432)	(549)	--	--	--	--	(3,981)
Menara Bergerak	(10,045)	(2,805)	--	--	--	--	(12,850)
Jaringan, Serat Optik dan Infrastruktur	(274,285)	(62,362)	--	(6,375)	--	--	(343,022)
Peralatan dan Perabot Kantor	(44,894)	(3,458)	37	6,375	--	--	(41,940)
Kendaraan	(2,227)	(86)	231	--	--	--	(2,082)
Antena Indoor	(16,285)	(4,206)	--	--	--	--	(20,491)
Subjumlah	(351,168)	(73,466)	268	--	--	--	(424,366)
							Subtotal
Nilai Tercatat	8,288,344						8,441,722
							Carrying Value

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

2018							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Model Revaluasi							Revaluation Model
Menara dan Sarana Penunjang	8,861,984	80,848	(402,049)	5,284	(993,652)	205,271	Towers and Supporting Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Menara dan Sarana Penunjang	--	(79,223)	4,826	--	74,397	--	Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	8,861,984	1,625	(397,223)	5,284	(919,255)	205,271	Subtotal
Model Biaya							Cost Model
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	10,969	--	--	--	--	10,969	Building
Menara Bergerak	24,478	69	--	(1,690)	--	22,857	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik	646,627	54,070	--	40,572	--	741,269	Fiber Optic Networks
dan Infrastruktur	51,746	1,967	(77)	--	--	53,636	and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	2,731	292	(78)	--	--	2,945	Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	32,291	236	--	138	--	32,665	Vehicles
Antena Indoor	768,842	56,834	(155)	39,020	--	864,341	Indoor Antenna
Subjumlah	--	--	--	--	--	--	Subtotal
Aset Dalam Penyelesaian							Construction in Progress
Jaringan Serat Optik dan	45,642	2,255	--	(40,213)	--	7,684	Fiber Optic Networks and
Infrastruktur	1,385	8,444	--	(28)	--	9,801	Infrastructure
Menara dan Sarana Penunjang	47,027	10,699	--	(40,241)	--	17,485	Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	--	--	--	--	--	--	Subtotal
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	(2,884)	(548)	--	--	--	(3,432)	Building
Menara Bergerak	(7,811)	(2,929)	--	695	--	(10,045)	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik	(209,813)	(64,472)	--	--	--	(274,285)	Fiber Optic Networks
dan Infrastruktur	(38,646)	(6,277)	29	--	--	(44,894)	and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	(2,105)	(197)	75	--	--	(2,227)	Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	(12,225)	(4,060)	--	--	--	(16,285)	Vehicles
Antena Indoor	(273,484)	(78,483)	104	695	--	(351,168)	Indoor Antenna
Jumlah	9,404,369	--	--	--	--	8,288,344	Total
Nilai Tercatat	--	--	--	--	--	--	Carrying Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dicatat pada beban pokok pendapatan dan beban usaha (Catatan 21 dan 22).

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 are recorded to cost of revenues and operating expenses (Notes 21 and 22).

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp154.269 dan Rp83.635.

Acquisition cost of property and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp154,269 and Rp83,635, respectively.

Aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Asuransi FPG Indonesia dan PT Asuransi Asoka Mas, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.858.183 and Rp2.578.975 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Property and equipment of the Group have been insured against fire, thieves, damages and other risks to PT Asuransi FPG Indonesia and PT Asuransi Asoka Mas, all third parties, with sum insured amounted to Rp1,858,183 and Rp2,578,975 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Kerugian atas pelepasan aset tetap pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp164.094 dan Rp397.274. Pelepasan aset terutama merupakan pembongkaran menara dan sarana penunjang yang dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain – bersih (Catatan 24).

Loss on disposal of property and equipment for 2019 and 2018 amounted to Rp164,094 and Rp397,274, respectively. Disposal mainly dismantling of towers and supporting equipment that recorded as part of others expense – net (Note 24).

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan terkait menara dan sarana penunjang serta jaringan serat optik dan infrastrukturnya dengan persentase tingkat penyelesaian terhadap nilai kontrak sebesar lebih dari 50% dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2020.

As of December 31, 2019, construction in progress are related to tower and supporting equipment and also fiber optic network and infrastructure with percentage of completion to contract value of more than 50% and estimated to be completed in 2020.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai wajar menara dan sarana penunjang pada tanggal 31 Desember 2019 diestimasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dan pada 31 Desember 2018 oleh KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan, penilai independen. Nilai wajar menara dan sarana penunjang dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas untuk pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dan nilai wajar tanah dengan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Penilaian estimasi nilai wajar menggunakan input selain harga kuotasi dari pasar aktif yang dapat diobservasi. Berikut ini asumsi-asumsi signifikan yang dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas menara dan sarana penunjang:

The fair value of tower and supporting equipment for December 31, 2019 are estimated based on appraisal conducted by KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan and for December 31, 2018 by KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan, independent appraiser. Fair value of the towers and supporting equipment was calculated using Discounted Cash Flows method on income approach and cost approach, and fair value of land calculated using Market Data Approach method. Estimated fair value using inputs other than quoted prices in active market that are observable. Significant assumptions used by the appraiser to determine the fair value of towers and supporting equipment are as follows:

	2019	2018	
Tingkat Diskonto (Per Tahun) dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC)	11.30%	11.35%	Discount Rate (Per Annum) using Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Tingkat Inflasi (Per Tahun)	3.35%	3.51%	Inflation Rate (Per Annum)
Umur Manfaat Menara dan Sarana Penunjang	30 Tahun / Years	30 Tahun / Years	Useful Life of Towers and Supporting Equipments

Menara dan sarana penunjang dijamin untuk utang bank sindikasi jangka panjang yang diperoleh (Catatan 15.b).

Towers and supporting equipment are used as collateral for long-term syndicated bank loans (Note 15.b).

Pada 2019 dan 2018, uang muka yang direklasifikasi ke aset tetap adalah sebesar Rp1.151 dan Rp4.758.

In 2019 and 2018, advances which have been reclassified into property and equipment amounted to Rp1,151 and Rp4,758, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan nilai aset tetap mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2019 and 2018, management believes that there are no indications of changes in condition that might cause impairment of property and equipment.

10. Aset Takberwujud

10. Intangible Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Goodwill	89,029	89,029	Goodwill
Aset Takberwujud Lainnya	21,740	19,270	Other Intangible Assets
Jumlah Aset Takberwujud	110,769	108,299	Total Intangible Assets

Goodwill

Goodwill dan sebagian aset takberwujud lainnya berasal dari akuisisi entitas anak (Catatan 1.d).

Goodwill

Goodwill and part of other intangible assets occurred from acquisition of subsidiaries (Note 1.d).

Aset Takberwujud Lainnya

Other Intangible Assets

	2018 Rp	Penambahan/ Addition Rp	2019 Rp	
Biaya Perolehan	58,436	11,745	70,181	Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi	(39,166)	(9,275)	(48,441)	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	19,270		21,740	Carrying Value

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	Penambahan/ Addition Rp	2018 Rp	
Biaya Perolehan	58,436	--	58,436	Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi	(32,568)	(6,598)	(39,166)	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	25,868		19,270	Carrying Value

Pada 2019, penambahan aset takberwujud termasuk reklasifikasi dari uang muka sebesar Rp4.865.

On 2019, additional of intangible assets including reclassification from advance amounting to Rp4,865.

11. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

11. Other Non-Current Financial Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Piutang Usaha yang Direstrukturisasi			Restructured Trade Receivables
PT Internux (Catatan 30.b.2)	299,466	299,466	PT Internux (Note 30.b.2)
PT Bakrie Telecom Tbk (Catatan 30.b.1)	123,797	123,797	PT Bakrie Telecom Tbk (Note 30.b.1)
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			Allowance for Impairment Loss
atas Piutang Usaha yang Direstrukturisasi	(423,263)	(423,263)	of Restructured Trade Receivables
Subjumlah	--	--	Subtotal
Piutang Derivatif (Catatan 30.a)	43,353	348,909	Derivative Receivables (Note 30.a)
Lain-lain	3,531	3,457	Others
Subjumlah	46,884	352,366	Subtotal
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	46,884	352,366	Other Non-Current Financial Assets

12. Utang Usaha

12. Trade Payables

Akun ini merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur.

This account represents liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been billed through invoice.

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Party (Note 27)
PT Sekawan Abadi Prima	2,548	486	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak ketiga			Third Parties
PT Indah Pratama Abadi	2,920	5,133	PT Indah Pratama Abadi
PT Harapan Utama Prima	2,548	2,244	PT Harapan Utama Prima
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp2.000)	3,044	7,033	Others (below Rp2,000 each)
Subjumlah	8,512	14,410	Subtotal
Jumlah Utang Usaha	11,060	14,896	Total Trade Payables

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

All trade payables are denominated in Rupiah and there is no collateral given by the Group of these payables.

13. Akruai

13. Accruals

	2019 Rp	2018 Rp	
Estimasi Biaya Penyelesaian Pembangunan Aset Tetap	73,109	10,253	Estimated Completion Cost of Property and Equipment
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	20,212	15,520	Repairs and Maintenance Expenses
Beban Keuangan Lainnya	18,788	17,346	Other Financial Charges
Beban Sewa	11,871	9,332	Rental Expenses
Beban Bunga			Interest Expense
(termasuk 2019: USD311,894; 2018: USD185,888)	11,079	6,847	(including 2019: USD311,894; 2018: USD185,888)
Jasa Keamanan	10,227	3,612	Security Services
Bonus dan Tunjangan	6,198	3,911	Bonuses and Allowance Expenses
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp5.000)	20,257	10,642	Others (Below Rp5,000 each)
Jumlah Akruai	171,741	77,463	Total Accruals

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Beban bunga dan beban keuangan lainnya terkait fasilitas pinjaman bank sindikasi yang diperoleh Perusahaan (Catatan 15).

Interest expense and other financial charges are related to syndicated bank loan facilities obtained by the Company (Note 15).

14. Pendapatan Ditangguhkan

14. Deferred Income

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa menara dan lain-lain kepada pihak ketiga sebagai berikut:

This account represents deferred income from rental of towers and others to third parties are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
PT XL Axiata Tbk	553,733	601,126
PT Hutchison 3 Indonesia	113,168	229,623
PT Telekomunikasi Selular	14,473	14,239
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	6,809	7,132
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	688,183	852,120

*PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
Others (below Rp10,000 each)
Total Deferred Income*

15. Utang Bank Sindikasi

15. Syndicated Bank Loans

a. Utang Bank Jangka Pendek

a. Short-Term Bank Loan

	2019 Rp	2018 Rp
Fasilitas IDR Revolving Loan		
PT Bank BNP Paribas Indonesia	63,750	76,500
PT Bank Permata Tbk	63,750	22,500
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	43,125	33,750
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	41,250	76,500
PT Bank BTPN Tbk	28,125	22,500
Bank of China (Hongkong) Ltd., Cabang Jakarta	22,500	49,500
PT Bank CIMB Niaga Tbk	18,750	51,750
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,750	27,000
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	300,000	360,000

IDR Revolving Loan Facility
*PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Permata Tbk
Citibank, N.A., Jakarta Branch
MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch
PT Bank BTPN Tbk
Bank of China (Hongkong) Ltd.,
Jakarta Branch
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Short - Term Bank Loan*

b. Utang Bank Berjangka

b. Term Bank Loan

Rincian pinjaman bank sindikasi berdasarkan bank pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

The detail of syndication bank loan based on lenders is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	592,100	613,800	<i>Citibank, N.A., Jakarta Branch</i>
PT Bank BNP Paribas Indonesia	482,275	499,950	<i>PT Bank BNP Paribas Indonesia</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Hongkong	398,264	430,086	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hongkong Branch</i>
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	380,109	405,524	<i>PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	338,316	355,021	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
ING Bank N.V., Cabang Singapura	331,886	358,405	<i>ING Bank N.V., Singapore Branch</i>
PT Bank Shinhan Indonesia	298,331	—	<i>PT Bank Shinhan Indonesia</i>
Cathay United Bank, Cabang Singapura	288,741	311,812	<i>Cathay United Bank, Singapore Branch</i>
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	281,725	292,050	<i>MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch</i>
PT Bank BTPN Tbk	272,175	282,150	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	270,616	361,350	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura	240,618	259,843	<i>Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch</i>
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	219,236	311,812	<i>Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore</i>
Bank of China (Hongkong) Ltd., Cabang Jakarta	200,550	207,900	<i>Bank of China (Hongkong) Ltd., Jakarta Branch</i>
Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	199,132	215,043	<i>Standard Chartered Bank, Singapore Branch</i>
Aozora Asia Pacific Finance Limited, Hongkong	195,813	211,459	<i>Aozora Asia Pacific Finance Limited, Hongkong</i>
Bank of China Limited, Cabang Singapura	192,494	207,875	<i>Bank of China Limited, Singapore Branch</i>
Yuanta Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan	192,494	207,875	<i>Yuanta Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	191,000	198,000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank CTBC Indonesia	191,000	198,000	<i>PT Bank CTBC Indonesia</i>
Bank of Kaohsiung, Cabang Perbankan Offshore, Taiwan	144,371	155,906	<i>Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch, Taiwan</i>
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura	144,371	155,906	<i>National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapore Branch</i>
PT Bank Rabobank International Indonesia	132,755	143,362	<i>PT Bank Rabobank International Indonesia</i>

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor New York	132,754	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York Agency
Bank Sinopac, Cabang Perbankan <i>Offshore</i> , Taiwan	96,247	103,937	Bank Sinopac, Offshore Banking Branch, Taiwan
E.SUN Commercial Bank, Ltd., Taiwan	96,247	103,937	E.SUN Commercial Bank, Ltd., Taiwan
Eastspring Investments SICAV - FIS Asia Pacific			Eastspring Investments SICAV - FIS Asia Pacific
Dana Pinjaman, Singapura	96,247	103,937	Loan Fund, Singapore
KGI Bank, Taiwan	96,247	103,937	KGI Bank, Taiwan
Taishin International Bank Co., Ltd., Cabang Singapura	96,247	103,937	Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch
Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan	96,247	103,937	Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan
NEC Capital Solution Limited	69,505	--	NEC Capital Solution Limited
Far Eastern International Bank, Cabang Taiwan	66,377	71,681	Far Eastern International Bank, Taiwan Branch
Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd., Singapura	51,442	55,553	Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	45,137	48,743	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch
The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapura	--	237,981	The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	143,362	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Utang Bank Berjangka	7,121,069	7,564,071	Total Term Bank Loan
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(162,592)	(207,242)	Unamortized Transaction Costs
Bagian Lancar	(372,831)	(222,766)	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	6,585,646	7,134,063	Non-Current Portion

Pinjaman Bank Sindikasi 2018

Pada bulan Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman USD sebesar USD297,000,000 yang diatur oleh BNP Paribas Cabang Singapura, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT CIMB Niaga Tbk, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank Ltd. Cabang Jakarta (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd) (MUFG) (Arrangers) dan berupa fasilitas *Term Loan* dan *Revolving Loan IDR* sebesar Rp3.850.000 yang diatur oleh Arrangers.

Pada tanggal 18 Juni 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Bank Sindikasi dan menggunakan opsi *accordian* untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar USD20,000,000.

Fasilitas pinjaman USD dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 2,10%-2,25% per tahun berdasarkan jenis pihak pemberi pinjaman dan fasilitas pinjaman IDR dikenakan margin bunga di atas JIBOR sebesar 2,75% per tahun.

Pinjaman ini jatuh tempo pada bulan Februari 2023. Tujuan pinjaman ini terutama untuk melunasi (*refinancing*) seluruh sisa pinjaman bank sindikasi 2016 dan utang obligasi sebelumnya.

Pinjaman ini dijamin antara lain oleh:

- Pengalihan hak bersyarat atas *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan (Catatan 9);
- Fidusia atas tagihan milik perusahaan dari *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement* (Catatan 4);

Syndicated Bank Loan 2018

On February 2018, the Company signed Loan Facilities Agreement of USD amounted to USD297,000,000 arranged by BNP Paribas Singapore Branch, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT CIMB Niaga Tbk, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd) (MUFG) (The Arrangers) and Loan Facility Agreement consists of Term Loan and Revolving IDR Facilities amounted to Rp3,850,000 arranged by the Arrangers.

On June 18, 2018, the Company signed a Syndication Bank Agreement and exercised the *accordian* option to increase its term loan by USD20,000,000.

The USD loan facility bear interest margin above LIBOR of 2.10%-2.25% per annum based on the certain type of the lenders and the IDR loan facilities bear interest margin above JIBOR of 2.75% per annum.

The facilities have maturity date in February 2023. The purpose of the facilities is mainly to refinancing all outstanding syndicated bank loan 2016 and bond payable.

The loan is secured by, among others:

- Conditional assignment of rights on Master Lease Agreement and Land Lease Agreement;
- Fiduciary over the Company's insurance policies;
- Fiduciary over all towers and other moveable assets of the Company (Note 9);
- Fiduciary over all receivables of the Company in respect of Master Lease Agreement and Land Lease Agreement (Note 4);

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

- Gadai atas rekening bank milik Perusahaan (Catatan 3); dan
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara telekomunikasi milik Perusahaan.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, antara lain, *net debt to running EBITDA* dan *free cash flow to total debt costs*.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;
- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dan hak tagih piutang;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dalam bentuk apapun; dan
- Melakukan perubahan kendali atas Perusahaan

Pembayaran pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp106.750 dan USD11,095,000 dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp30.500 dan USD3,170,000.

Perusahaan memiliki saldo yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019 atas fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD302,735,000 dan fasilitas *Term Loan IDR* sebesar Rp2.912.750 dan *Revolving Loan* sebesar Rp300.000 dan pada tanggal 31 Desember 2018 atas fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD313,830,000 dan fasilitas *Term Loan IDR* sebesar Rp3.019.500 dan *Revolving Loan* sebesar Rp360.000

Pada tanggal 23 Maret 2020, Perusahaan melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman *Term Loan* sebesar Rp76.250 dan USD7,925,000.

Pada tanggal 9 April 2020, Perusahaan mencairkan fasilitas *Revolving Loan* sebesar Rp500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi kondisi dan persyaratan atas pinjaman bank sindikasi.

Pinjaman Bank Sindikasi 2016

Pada tanggal 19 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas Pinjaman yang

- *Pledge of current accounts of the Company (Note 3); and*
- *Mortgage deeds over the land registered under the Company's name on which the telecommunication towers located.*

The Company is required to meet certain financial ratios, among others, net debt to running EBITDA and free cash flow to total debt costs.

During the loan facility period, without prior written consent from the lenders, the Company is restricted to, among others:

- *Purchase, develop, acquire and invest in business unit, assets or in any type of business when certain criteria is not met;*
- *Pledge partially or whole author the Company's assets to other parties;*
- *Sell or transfer or otherwise dispose of any of the Company's assets and receivables on recourse term;*
- *Sell or transfer or rent out/submit the rights to use the Company's assets in any form; and*
- *Change the control of the Company.*

The payment of this loan for the year ended December 31, 2019 amounted to Rp106,750 and USD11,095,000 and December 31, 2018 amounted to Rp30,500 and USD3,170,000.

The Company has outstanding balance as of December 31, 2019 of Term Loan USD facility amounting to USD302,735,000 and Term Loan IDR amounting to Rp2,912,750 and Revolving Loan facilities amounting to Rp300,000 and as of December 31, 2018 of Term Loan USD facility amounting to USD313,830,000 and Term Loan IDR amounting to Rp3,019,500 and Revolving Loan facilities amounting to Rp360,000.

On March 23, 2020, the Company made a partial payment of the Term Loan principal amounted to Rp76,250 and USD7,925,000.

On April 9, 2020, the Company withdrawn Revolving Loan facility amounted to Rp500,000.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company is in compliance with the term and condition of this syndicated bank loan.

Syndicated Bank Loan 2016

On September 19, 2016, the Company signed Loan facilities agreement arranged by Standard Chartered

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

diatur oleh Standard Chartered Bank, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, PT Bank CTBC Indonesia, JP Morgan Chase Bank, N.A., dan ING Bank N.V. (*Arrangers*) berupa fasilitas Term Loan USD sebesar USD225,000,000 dan PT Bank BNP Paribas, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*Arrangers*) berupa fasilitas Term Loan IDR dan Revolving IDR masing-masing sebesar Rp1.050.000 and Rp580.000.

Pinjaman ini memiliki jatuh tempo pada bulan Desember 2019. Tujuan pinjaman ini, antara lain, untuk membayar (*refinancing*) pinjaman bank sindikasi 2015.

Term Loan USD dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 2,30%-2,50% per tahun berdasarkan jenis pihak pemberi pinjaman dan Term Loan IDR dikenakan margin bunga di atas JIBOR sebesar 2,50%-2,90% per tahun berdasarkan rasio *net debt to running EBITDA*.

Pinjaman ini dijamin antara lain oleh:

- Pengalihan hak bersyarat atas *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan (Catatan 9);
- Fidusia atas tagihan milik perusahaan dari *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement* (Catatan 4);
- Gadai atas rekening bank milik Perusahaan (Catatan 3); dan
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara telekomunikasi milik Perusahaan.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, antara lain, *net debt to running EBITDA*, *asset coverage ratio*, *free cash flow to total debt costs* dan *security coverage ratio*.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;
- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dan hak tagih piutang;

Bank, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, PT Bank CTBC Indonesia, JP Morgan Chase Bank, N.A., and ING Bank N.V. (*The Arrangers*) consist of Term Loan USD amounted to USD225,000,000 and PT Bank BNP Paribas, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multi Infrastruktur and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*the Arrangers*) consists of Term Loan IDR and Revolving IDR facilities amounted to Rp1,050,000 and Rp580,000, respectively.

The facilities have maturity date in December 2019. The purpose of the facilities among others, to refinancing syndicated bank loan 2015.

The Term Loan USD facility bear interest margin above LIBOR of 2.30%-2.50% per annum based on the certain type of the lenders and the Term Loan IDR facility bear interest margin above JIBOR of 2.50%-2.90% per annum based on net debt to running EBITDA ratio.

The loan is secured by, among others:

- Conditional assignment of rights on Master Lease Agreement and Land Lease Agreement;
- Fiduciary over the Company's insurance policies;
- Fiduciary over all towers and other moveable assets of the Company (Note 9);
- Fiduciary over all receivables of the Company in respect of Master Lease Agreement and Land Lease Agreement (Note 4);
- Pledge of current accounts of the Company (Note 3); and
- Mortgage deeds over the land registered under the Company's name on which the telecommunication towers located.

The Company is required to meet certain financial ratios, among others, *net debt to running EBITDA*, *asset coverage ratio*, *free cash flow to total debt costs* and *security coverage ratio*.

During the loan facility period, without prior written consent from the lenders, the Company is restricted to, among others:

- Purchase, develop, acquire and invest in business unit, assets or in any type of business when certain criteria is not met;
- Pledge partially or whole author the Company's assets to other parties;
- Sell or transfer or otherwise dispose of any of the Company's assets and receivables on recourse term;

- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dalam bentuk apapun; dan
- Melakukan perubahan kendali atas Perusahaan.

Pada tanggal 27 Maret 2018, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya dengan cara restrukturisasi menggunakan pinjaman bank sindikasi 2018.

Amortisasi biaya transaksi yang dibebankan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp44.650 dan Rp58.514.

Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan pihak ketiga atas risiko fluktuasi tingkat bunga dan selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi (Catatan 30.a).

Jika bagian pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya maka saldo pinjaman bank sindikasi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Jumlah Pinjaman	7,052,210	7,359,673
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(162,592)	(207,242)
Dikurangi: Utang Sindikasi Bank Jangka Pendek	(372,831)	(222,766)
Bagian Jangka Panjang	6,516,787	6,929,665

- Sell or transfer or rent out/submit the right to use the Company's assets in any form; and
- Change the control of the Company.

On March 27, 2018, this loan has been fully paid through restructuring using syndicated bank loan 2018.

The amortized transaction costs charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp44,650 and Rp58,514, respectively.

The Company entered hedge contracts with third parties to hedge interest rate and foreign exchange fluctuation risk of the syndicated bank loan (Note 30.a).

If the portion of foreign currency loan is valued using its hedging rate the balance of syndicated bank loans as of December 31, 2019 and December 31, 2018 are as follows:

Total Loan
Unamortized Transaction Costs
Less: Short-Term Syndicated Bank Loan
Non-Current Portion

16. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan Pascakerja – Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan

Saldo provisi imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia, yang laporannya bertanggal 10 Maret 2020 dan 22 Maret 2019.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Usia Pensiun Normal	57 tahun/ years	57 tahun/ years
Tingkat Diskonto (Per Tahun)	7.75% (PT Sarana Inti Persada: 8%)	8.25% (PT Sarana Inti Persada: 9%)
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji (Per Tahun)	6.5%	6.5%
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalitas/ 10% from mortality rate	
Tingkat Pengunduran Diri	10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 0,5% pada saat usia 45 tahun/ 10% up to 25 years old, then proportionally decline to 0.5% at 45 years old	
Tabel Mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 3/Indonesia Mortality Table 3	

16. Long-Term Employment Benefits Obligation

Post-Employment Benefits – Unfunded Defined Benefits Plan

The provision of post-employment benefits as of December 31, 2019 and 2018 were calculated by an independent actuary, PT Milliman Indonesia, with its report dated March 10, 2020 and March 22, 2019.

Actuarial assumptions used to determine post-employment benefits expenses and obligation are as follows:

Normal Pension Age
Discount Rate (Per Annum)
Salary Increase Projection Rate (Per Annum)
Permanent Disability Rate
Resignation Rate
Table of Mortality

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in the post-employment benefits liability in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas Awal Tahun	30,248	27,265	Liabilities at Beginning of Year
Beban Manfaat Karyawan Tahun Berjalan	9,325	10,313	Current Year Employee Benefits Expense
Pembayaran Imbalan Tahun Berjalan	(2,451)	(1,165)	Current Year Actual Benefits Payments
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	1,552	(6,165)	Actuarial Gain (Loss)
Liabilitas Akhir Tahun	38,674	30,248	Liabilities at End of Year

Rincian beban manfaat pascakerja karyawan yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses for the current year are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Jasa Kini	8,367	8,684	Current Service Cost
Beban Bunga	2,404	1,934	Interest Cost
Biaya Jasa Lalu	(1,446)	(305)	Past Service Cost
Jumlah Beban Manfaat Kerja Karyawan	9,325	10,313	Total Employee Benefits Expense

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang adalah sebagai berikut:

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of defined benefits obligation is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			Present Value of Defined Benefits Obligation
Awal Tahun	30,248	27,265	at Beginning of Year
Beban Jasa Kini	8,367	8,684	Current Service Cost
Beban Bunga	2,404	1,934	Interest Cost
Pembayaran Imbalan	(2,451)	(1,165)	Benefits Payment
Pengukuran Kembali:			Remeasurements:
Keuntungan (Kerugian) aktuarial dari			Actuarial Gain (Loss) from Change in
Perubahan Asumsi Keuangan	2,059	(3,389)	Financial Assumptions
Kerugian aktuarial dari			Actuarial Loss from Change in
Penyesuaian Pengalaman	(507)	(2,776)	Experience Adjustments
Biaya Jasa Lalu	(1,446)	(305)	Past Service Cost
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	38,674	30,248	Present Value of Defined Benefits Obligation
Akhir Tahun			at End of Year

Akumulasi keuntungan aktuarial atas program imbalan pasti yang dicatat di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The accumulated of actuarial gain of defined benefits plan which is recorded in other comprehensive income is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	9,086	3,123	Beginning Balance
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	(1,552)	6,165	Actuarial Loss (Gain)
Pajak Penghasilan Terkait	50	(202)	Related Income Tax
Akumulasi Program Imbalan Pasti yang Diakui	7,584	9,086	Akumulasi Program Imbalan Pasti yang Diakui
di Penghasilan Komprehensif Lainnya			di Penghasilan Komprehensif Lainnya

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan.

Analisis Sensitivitas

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, akan berakibat pada penurunan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp3.878.

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, akan berakibat pada peningkatan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp4.475.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2019, liabilitas imbalan pascakerja naik sebesar Rp5.069.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan turun 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2019, liabilitas imbalan pascakerja turun sebesar Rp4.429.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefits plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liabilities.

Salary Risk

The present value of the defined benefits plan liabilities is calculated by reference to the future salaries of plan participants.

Sensitivity analysis

Increasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2019, will impact to the decrease of defined benefits plan obligation amounted to Rp3,878.

Decreasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2019, will impact to the increase of defined benefits plan obligation amounted to Rp4,475.

If the expected salary growth increase 1% of that assumed on December 31, 2019, post-employment benefits liabilities will increase Rp5,069.

If the expected salary growth decrease 1% of that assumed on December 31, 2019, post-employment benefits liabilities will decrease Rp4,429.

17. Modal Saham

17. Share Capital

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders on December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah/ Total Rp
PT Kharisma Indah Ekaprima	491,384,554	43.20	49,138
Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Ltd	290,228,868	25.51	29,023
Juliawati Gunawan (Direktur / Director)	359,596	0.03	36
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) / Public (below 5% each)	355,606,680	31.26	35,561
Jumlah / Total	1,137,579,698	100.00	113,758

18. Tambahan Modal Disetor – Bersih

18. Additional Paid-in Capital – Net

	2019 Rp	2018 Rp	
Agio Nilai Nominal Saham	3,589,495	3,589,495	Premium of Par Value of Shares
Selisih Aset dan Liabilitas			Difference from Tax Amnesty
Pengampunan Pajak	276	276	Assets and Liabilities
Jumlah	3,589,771	3,589,771	Total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Agio Nilai Nominal Saham

Akun ini merupakan agio atas nilai nominal saham dari Penawaran Umum Saham Perdana, Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II Perusahaan setelah dikurangi biaya emisi saham, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	Rp	
Hasil Penawaran Umum Saham Perdana		Initial Public Offering
Agio Saham	330,000	Premium
Biaya Emisi	(9,476)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	320,524	Subtotal
Hasil Penawaran Umum Saham Terbatas I		Limited Public Offering I
Agio Saham	634,500	Premium
Biaya Emisi	(3,905)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	630,595	Subtotal
Hasil Penawaran Umum Saham Terbatas II		Limited Public Offering II
Agio Saham	2,367,839	Premium
Biaya Emisi	(8,639)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	2,359,200	Subtotal
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		Exercise of Warrant Serie I
Agio Saham	279,176	Premium
Bersih	3,589,495	Net

Premium of Par Value of Shares

This account represents premium of par value of shares issued pursuant to the Company's Initial Public Offering (IPO), Limited Public Offering I and Limited Public Offering II after deducting the share issuance costs as of December 31, 2019 and 2018, as follows:

Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, PT Rekajasa Akses, entitas anak, mengikuti pengampunan pajak ini dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET17578/PP/WPJ.30/2016 dari Kantor Wilayah Dewan Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Selisih antara aset dan kewajiban atas pengampunan pajak dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

Tax Amnesty

In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty PT Rekajasa Akses, a subsidiary, participated this tax amnesty and received Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET17578/PP/WPJ.30/2016 from Kantor Wilayah Dewan Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Difference from tax amnesty assets and liabilities recorded as a part of additional paid-in capital.

19. Penghasilan Komprehensif Lainnya

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas Perusahaan dan entitas anak yang terdiri dari:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang (Catatan 9)	229,399	333,932	Net Increase in Revaluation of Towers and Supporting Equipment (Note 9)
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	15,016	16,295	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currencies
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti (Catatan 16)	7,584	9,086	Remeasurement of Defined Benefits Plan (Notes 16)
Lindung Nilai Arus Kas (Catatan 11)	(499,199)	(373,458)	Cash Flow Hedge (Note 11)
Jumlah	(247,200)	(14,145)	Total

19. Other Comprehensive Income

This account represents differences arising from transactions resulting in changes in equity of the Company and its subsidiaries which consist of:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara

Net Increase in Revaluation of Tower

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal Tahun	333,932	123,497	Beginning Balance
Kenaikan (Penurunan) Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	(96,249)	205,271	Revaluation Increase (Decrease) of Towers and Supporting Equipment
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba	(8,284)	5,164	Reclassification Revaluation Reserve to Retained Earnings
Saldo Akhir Tahun	229,399	333,932	Ending Balance

20. Pendapatan

20. Revenues

Akun ini merupakan pendapatan atas sewa menara telekomunikasi dan lain-lain, sebagai berikut:

This account represents revenues from lease of telecommunication towers and others as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Party (Note 27)
PT Sekawan Abadi Prima	204	--	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak Ketiga			Third Parties
PT XL Axiata Tbk	648,207	750,989	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	379,401	373,936	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular	350,227	343,865	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	136,568	132,081	PT Indosat Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	124,609	107,893	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Internux	--	86,268	PT Internux
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	127,834	104,743	Others (below Rp50,000 each)
Subjumlah	1,766,846	1,899,775	Subtotal
Jumlah Pendapatan	1,767,050	1,899,775	Total Revenues

Pelanggan dengan nilai pendapatan di atas 10% dari pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler.

Customers with sales above 10% of revenues for the years ended December 31, 2019 and 2018 are PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia and PT Telekomunikasi Seluler.

21. Beban Pokok Pendapatan

21. Cost of Revenues

	2019 Rp	2018 Rp	
Penyusutan dan Amortisasi:			Depreciation and Amortization:
Sewa Lahan	189,244	184,804	Land Lease
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	152,637	150,684	Depreciation of Property and Equipment (Note 9)
Sewa Jaringan Serat Optik	7,000	8,002	Fiber Optic Lease
Perizinan	6,882	7,756	Permit
Lain-lain	12,404	8,372	Others
Subjumlah	368,167	359,618	Subtotal
Beban Pokok Pendapatan Lainnya:			Other Cost of Revenues:
Pemeliharaan dan Perbaikan	64,007	68,759	Repair and Maintenance
Jasa Keamanan dan Lain-lain	59,926	50,296	Security Services and Others
Subjumlah	123,933	119,055	Subtotal
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	492,100	478,673	Total Cost of Revenues

Tidak terdapat pembelian kepada pemasok di atas 10% dari pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

There are no purchases to suppliers above 10% of revenues for the years ended December 31, 2019 and 2018.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

22. Beban Usaha

22. Operating Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Penyusutan dan Amortisasi:			Depreciation and Amortization:
Amortisasi	19,933	16,752	Amortization
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	4,093	7,022	Depreciation of Property and Equipment (Note 9)
Subjumlah	24,026	23,774	Subtotal
Beban Usaha Lainnya:			Other Operating Expenses:
Gaji dan Tunjangan	124,059	105,113	Salaries and Allowances
Perjalanan dan Akomodasi	11,018	9,810	Travel and Accommodation
Imbalan Pascakerja (Catatan 16)	9,325	9,148	Post-employment Benefits (Note 16)
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	8,170	8,759	Office Supplies and Other Expenses
Pemasaran	6,390	4,519	Marketing
Jasa Profesional	6,115	5,640	Professional Fee
Subjumlah	165,077	142,989	Subtotal
Jumlah Beban Usaha	189,103	166,763	Total Operating Expenses

23. Penghasilan Bunga dan Beban Keuangan

23. Interest Income and Financial Charges

a. Penghasilan Bunga

a. Interest Income

Penghasilan bunga merupakan pendapatan atas bunga bank.

Interest income is income from bank interest.

b. Beban Keuangan

b. Financial Charges

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Bunga:			Interest Expense:
Pinjaman Bank Sindikasi	(523,919)	(449,913)	Syndicated Bank Loan
Utang Obligasi	--	(63,797)	Bond Payable
Subjumlah	(523,919)	(513,710)	Subtotal
Beban Keuangan Lainnya:			Other Financial Charges:
Biaya Lindung Nilai	(280,175)	(333,592)	Hedging Cost
Amortisasi Beban Keuangan	(44,650)	(100,812)	Amortization of Financial Charges
Lainnya	(7,141)	(6,489)	Others
Subjumlah	(331,966)	(440,893)	Subtotal
Jumlah Beban Keuangan	(855,885)	(954,603)	Total Financial Charges

24. Beban Lain-lain - Neto

24. Other Expenses - Net

	2019 Rp	2018 Rp	
Penghasilan (Beban) lain-lain:			Other Income (Expense):
Kerugian atas Pelepasan Aset Tetap (Catatan 9)	(164,094)	(397,274)	Loss on disposal of Property and Equipment (Note 9)
Beban Pajak	(10,145)	(6,023)	Tax Expense
Amortisasi Aset Takberwujud	(6,598)	(6,598)	Amortization of Intangible Assets
Beban Penalti	(5,260)	(5,708)	Penalty Expenses
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	(1,676)	18,523	Gain (Loss) on Foreign Exchange Difference - Net
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			Allowance for Impairment Loss
Piutang Usaha - Bersih (Catatan 4 dan 11)	(759)	(328,961)	Trade Receivable - Net (Notes 4 and 11)
Pendapatan Denda Keterlambatan	--	85,630	Late Fine Income
Bond Premium Call	--	(128,859)	Bond Premium Call
Lain-lain - Neto	(13,061)	178,467	Others - Net
Jumlah Beban Lain-lain - Neto	(201,593)	(590,803)	Total Other Expenses - Net

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

25. Perpajakan

25. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak Penghasilan			Income Tax
Pasal 28A			Article 28A
<u>Perusahaan</u>			<u>the Company</u>
Tahun 2019	26,350	--	Year 2019
Tahun 2018	24,837	24,853	Year 2018
Tahun 2017	--	22,767	Year 2017
Tahun 2012	--	3,828	Year 2012
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Tahun 2019	4,912	--	Year 2019
Tahun 2018	4,921	5,012	Year 2018
Tahun 2017	--	4,271	Year 2017
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih			Value Added Tax - net
Perusahaan	57,097	133,767	The Company
Entitas Anak	63,401	63,032	Subsidiaries
Klaim Restitusi Pajak	82,655	97,551	Claim For Tax Refund
Jumlah Pajak Dibayar di Muka	264,173	355,081	Total Prepaid Taxes

Tahun Pajak 2018

Perusahaan

Pada bulan Januari 2020, Perusahaan telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima Perusahaan.

Entitas Anak

Pada bulan Oktober 2019, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima BIT.

Pada bulan April 2020, PT Sarana Inti Persada (SIP), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima SIP.

Pada bulan Desember 2019, PT Rekajasa Akses (REJA), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima REJA.

Fiscal Year 2018

The Company

On January 2020, the Company received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by the Company.

Subsidiary

On October 2019, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), a subsidiary, received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, VAT, Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by BIT.

On April 2020, PT Sarana Inti Persada (SIP), a subsidiary, received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, VAT, Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by SIP.

On December 2019, PT Rekajasa Akses (REJA), a subsidiary, received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, VAT, Income Tax art 21, Income Tax art 23 and Income Tax art 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by REJA.

Tahun Pajak 2017

Perusahaan

Pada bulan April 2019, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh pasal 4 (2) dan PPN, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 sebesar Rp9.951, serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan sebesar Rp22.767 dan telah menerima pengembalian. Pada bulan Juni 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil keberatan belum diterima Perusahaan.

Entitas Anak

Pada bulan Agustus 2019, BIT telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN PPh Pasal 26 dan PPN, SKPKB PPh Pasal 21 sebesar Rp1, PPh Pasal 23 sebesar Rp1 dan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp8, serta SKPLB PPh Badan sebesar Rp2.201 dan telah menerima pengembalian.

Pada bulan April 2019, SIP telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPN, serta SKPLB untuk PPh Badan sebesar Rp1.234 dan telah menerima pengembalian.

Pada bulan Agustus 2019, REJA menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN PPh Pasal 4 (2) dan PPN, SKPKB PPh Pasal 21 sebesar Rp1 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp19, serta SKPLB PPh Badan sebesar Rp781 dan telah menerima pengembalian.

Tahun Pajak 2016

Perusahaan

Pada bulan Agustus 2018, Perusahaan menerima hasil atas pemeriksaan pajak tahun 2016 berupa SKPLB PPh Badan sebesar Rp21.431 dan sisanya sebesar Rp24 dicatat sebagai beban pajak. Perusahaan telah menerima pengembalian PPh Badan 2016 sebesar Rp16.788, setelah dipotong dengan Surat Taghan Paksa (STP) atas denda Pasal 74 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp4.594 dan sebagian SKPKB PPN Desember 2016 yang disetujui sebesar Rp49, dengan jumlah pemotongan sebesar Rp4.643 dan pada bulan November 2018, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas pemotongan tersebut. Perusahaan juga menerima SKPKB atas PPN Desember 2016 sebesar Rp50.538 (termasuk denda Rp27.566) dan SKPKB atas PPh 26 Desember 2016 sebesar Rp67.214

Fiscal Year 2017

The Company

On April 2019, the Company received the result of tax assessment in form of Nil Tax Assessment (SKPN) for Income Tax art 21, Income Tax art 23, Income Tax art 4 (2) and VAT, Tax Underpayment Assessment (SKPKB) for Income Tax art 26 amounting to Rp9,951, and Tax Overpayment Assessment (SKPLB) for Corporate Income Tax amounting to Rp22,767 and have received the refund. On June 2019, the Company has filed the objection of this SKPKB. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of objection is not yet received by the Company.

Subsidiaries

On August 2019, BIT received the result of tax assessment in form of SKPN for Income Tax art 26 and VAT, SKPKB for Income Tax art 21 amounting to Rp1, Income Tax art 23 amounting to Rp1 and Income Tax art 4 (2) amounting to Rp8, and SKPLB for Corporate Income Tax has amounting to Rp2,201 and have received the refund.

On April 2019, SIP received the result of tax assessment in form of SKPN for Income Tax art 21, Income Tax art 23, Income Tax art 4(2) and VAT, and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp1,234 and has received the refund.

On August 2019, REJA received the result of tax assessment in form of SKPN for Income Tax art 4 (2) and VAT, SKPKB for Income Tax art 21 amounting to Rp1, Income Tax art 23 amounting to Rp19, and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp781 and has received the refund.

Fiscal Year 2016

The Company

On August 2018, the Company received the result of tax assessment fiscal year 2016 in form of SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp21,431 and the difference Rp24 recorded as tax expense. The Company has received tax refund amounting to Rp16,788, after deducted by Tax Collection Notice (STP) on tax penalty art 74 Law on General Tax Provisions and Procedures amounting to Rp4,594 and partially approved SKPKB VAT December 2016 amounting to Rp49, with total deduction amounting to Rp4,643 and on November 2018, the Company has filed the objection of this deduction. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of objection is not yet received by the Company. The Company also received SKPKB for VAT for December 2016 amounting to Rp50,538 (including penalty of Rp27,566) and

(termasuk denda Rp19.204). Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk SKPKB PPN sebesar Rp45.895 dan pada bulan November 2018 Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 26 dan SKPKB PPN. Pada bulan November 2019, hasil keberatan menyatakan ditolak dan pada bulan Februari 2020, Perusahaan telah mengajukan banding atas hasil keberatan tersebut. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil banding belum diterima Perusahaan.

Entitas Anak

Pada bulan April 2018, BIT menerima hasil pemeriksaan atas pajak tahun 2016 berupa SKPLB Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.993 (Rp5 dicatat sebagai beban pajak) dan SKPKB atas pajak PPN, PPh 4 (2) dan PPh 21 dengan jumlah sebesar Rp641. BIT telah menerima pengembalian SKPLB Pajak Badan sebesar Rp1.856 dan atas selisih pengembalian, BIT mengajukan proses pemindahanbukuan sebesar Rp137.

Pada bulan Mei 2018, REJA menerima hasil pemeriksaan atas jenis Pajak tahun 2016 berupa SKPLB Pajak Badan. REJA telah menerima pengembalian sebesar Rp397 dan sisanya dicatat sebagai beban pajak.

Tahun Pajak 2015

Perusahaan

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2015, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Badan dan Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp37.289.

Entitas Anak

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2015, BIT menerima SKPLB Pajak Badan sebesar Rp1.891. BIT telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp1.085 dan BIT mengajukan keberatan atas selisih pengembalian sebesar Rp806. Pada September 2018, BIT menerima selisih pengembalian sebesar Rp593 dan sisanya sebesar Rp206 dicatat sebagai beban pajak dan dipindahbukukan sebesar Rp7 pada bulan November 2018.

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2015, SIP menerima SKPLB Pajak Badan dan SIP telah menerima sebesar pengembalian pajak sebesar Rp406.

Tahun Pajak 2014

Entitas Anak

Pada bulan Januari 2019, BIT menerima SKPKB PPN Tahun Pajak 2014 sebesar Rp2.158 dan dilunasi pada bulan Februari 2019. Pada bulan

SKPKB of Income Tax article 26 amounting to Rp67,214 (including penalty of Rp19,204). The Company has paid SKPKB VAT amounting to Rp45,895 and on November 2018 the Company has filed an objection of SKPKB Income Tax article 26 and SKPKB VAT. On November 2019, the result of objection was rejected and the Company has filled the appeal of this objection on February 2020. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of appeal is not yet received by the Company.

Subsidiaries

On April 2018, BIT received the result of tax assessment fiscal year 2016 in form of SKPLB Corporate Income Tax amounting to Rp1,993 (Rp5 recorded as tax expense) and SKPKB of VAT, Income Tax article 4 (2) and Income Tax article 21 amounting to Rp641. BIT has received SKPLB Corporate Income Tax refund amounting to Rp1,856 and BIT in the process of filling overbooking application amounting to Rp137.

On May 2018, REJA received the result of taxes assessment fiscal Year 2016 in form of SKPLB Corporate Income Tax. REJA has received tax refund amounting to Rp397 and the difference recorded as tax expense.

Fiscal Year 2015

The Company

The result of tax assessment fiscal year 2015, the Company received SKPLB Corporate Income Tax and the Company has received tax refund amounting to Rp37,289.

Subsidiaries

The result of tax assessment fiscal year 2015, BIT received SKPLB Corporate Income Tax amounting to Rp1,891. BIT has received tax refund amounting to Rp1,085 and BIT filed an objection for difference of tax refund amounting to Rp806. On September 2018, BIT received the difference of tax refund amounting to Rp593 and the difference amounting to Rp206 recorded as tax expense and overbooking amounting to Rp7 on November 2018.

The result of tax assessment fiscal year 2015, SIP received SKPLB Corporate Income Tax and SIP has received tax return amounting to Rp406.

Fiscal Year 2014

Subsidiaries

On January 2019, BIT received SKPKB VAT Fiscal Year 2014 amounting to Rp2,158 and paid on February 2019. On March 2020, BIT received

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Maret 2020 BIT menerima hasil keberatan yang mengembalikan sebagian Rp313 dan atas sisanya BIT akan mengajukan banding.

the result of objection to partially refund Rp313 and for the difference BIT will file tax appeal.

Tahun Pajak 2013

Entitas Anak

Pada bulan Maret 2018, BIT menerima SKPKB PPN tahun pajak 2013 sebesar Rp7.241 dan STP sebesar Rp138. Pada bulan Mei 2018, BIT telah melakukan pembayaran dan dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB dan STP. Pada bulan Mei 2019, BIT menerima hasil keberatan yang mengembalikan sebagian Rp3.715 dan atas sisanya BIT telah mengajukan banding. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil banding belum diterima BIT.

Fiscal Year 2013

Subsidiaries

On March 2018, BIT received SKPKB VAT fiscal year 2013 amounting to Rp7,241 and STP amounting to Rp138. On May 2018, BIT has paid and in the process of an objection of SKPKB and STP. On May 2019, BIT received the result of objection to partially refund Rp3,715 and for the difference BIT had filed tax appeal. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of appeal is not yet received by BIT.

Tahun Pajak 2012 dan 2011

Pada bulan April 2013 dan Juni 2014, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011 dan 2012 yang terdiri dari:

Fiscal Year 2012 and 2011

In April 2013 and June 2014, the Company received tax assessment result for fiscal year 2011 and 2012 which consists of:

Jenis Pajak/ Type of Tax	Tahun Pajak/ Fiscal Year	Jumlah/ Amount Rp	Keterangan/ Description
Pajak Penghasilan Badan/ Corporate Income Tax	2012	1,369	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Underpayment Tax Notice (SKPKB)
Pajak Penghasilan Pasal 21/ Tax Article 21	2011	32	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 23/ Tax Article 23	2011	3	SKPKB
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)/ Tax Article 4 (2)	2011	62	SKPKB
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa / Value Added Tax	2011	461	Surat Tagihan Pajak / Tax Collection Notice (STP)
Jumlah/ Total		1,927	

Pada tanggal Agustus 2015, Perusahaan menerima SKPKB Pajak Badan tahun 2012 dan hasilnya menolak pengajuan keberatan dan menambahkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp24.460 (sebelumnya Rp1.369). Atas surat keputusan tersebut, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp23.091 dan Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak pada bulan November 2015. Pada bulan Desember 2018, Perusahaan telah menerima putusan banding tersebut yang mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp12.352 pada bulan Februari 2019 dan sisanya menjadi beban pajak.

In August 2015, the Company received the decision letter for the objection filed on SKPKB for the year 2012 as mentioned above and the result was rejected the objection and added underpayment tax amounting to Rp24,460 (previously Rp1,369). For this decision letter, the Company has paid amounting to Rp23,091 and the Company has filled the appeal to tax court in November 2015. On December 2018, the Company received appeal decision that refund tax overpayment amounting to Rp12,352 on Februari 2019 and the difference recorded as tax expense.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pasal 4 (2)	729	1,508	Article 4 (2)
Pasal 21	1,607	2,149	Article 21
Pasal 23	79	4,536	Article 23
Pasal 26	4,173	--	Article 26
<u>Entitas Anak</u>	1,203	466	<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih			Value Added Tax - Net
Entitas Anak	--	204	Subsidiaries
Jumlah Utang Pajak	7,791	8,863	Total Taxes Payable

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	2019			2018			
	Perusahaan/ the Company Rp	Entitas Anak/ Subsidiaries Rp	Konsolidasian/ Consolidated Rp	Perusahaan/ the Company Rp	Entitas Anak/ Subsidiaries Rp	Konsolidasian/ Consolidated Rp	
Beban Pajak Kini	--	(1,675)	(1,675)	--	(21,696)	(21,696)	Current Tax Expense
Beban Pajak Koreksi							Tax Expense of Previous
Tahun Lalu	(12,107)	(55)	(12,162)	(24)	(505)	(529)	Year Correction
Beban Pajak Tangguhan:							Deferred Tax Expense
Tahun Berjalan	8	340	348	18	702	720	Current Year
Jumlah Beban Pajak	(12,099)	(1,390)	(13,489)	(6)	(21,499)	(21,505)	Total Tax Expense

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi rugi fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Current Tax

The reconciliation between profit (loss) before tax, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income to the estimated tax loss for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Menurut			Profit (Loss) before Tax as Presented in
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif			the Consolidated Statements of Profit or Loss
Lain Konsolidasian	241,870	(1,202,338)	and Other Comprehensive Income
Dikurangi: Rugi Entitas Anak	(52,633)	(131,811)	Deduct: Profit of Subsidiaries
Laba (Rugi) Komersial Perusahaan	294,503	(1,070,527)	Commercial Profit (Loss) of the Company
Perbedaan Waktu			Timing Differences:
Penyusutan	(894,949)	(998,558)	Depreciation
Beban Imbalan Kerja	2,374	--	Employee Benefits
Cadangan Piutang yang Direstrukturasikan	--	326,381	Allowance of Restructured Trade Receivables
Subjumlah	(892,575)	(672,177)	Subtotal
Beda Tetap:			Permanent Differences:
Pendapatan yang Telah Dikenakan Pajak			Income Subjected to
yang Bersifat Final	(34,368)	(9,757)	Final Tax
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	3,919	4,986	Salaries and Employee Benefits
Lain-lain	(77,105)	1,012,378	Others
Subjumlah	(107,554)	1,007,607	Subtotal
Estimasi Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(705,626)	(735,097)	Estimated Tax Loss for the Year
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	--	--	Estimated Current Tax - the Company
Dikurangi:			Less:
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka - Pasal 23	26,350	24,853	Prepaid Income Tax - Article 23
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	26,350	24,853	Estimated Corporate Income Tax
Lebih Bayar	26,350	24,853	Overpayment

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2018 ke Kantor Pelayanan Pajak. Terdapat selisih antara perhitungan Pajak Penghasilan Badan 2018 yang tercatat dan yang dilaporkan dalam SPT tahun 2018 sebesar Rp16. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai bukti potong PPh 23.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has reported its Annual Tax Return (SPT) year 2018 to the tax office. There are differences between the calculation of Corporate Income Tax 2018 recorded and reported in SPT year 2018 amounting to Rp16. The differences came from differences in withholding tax slip art 23.

Perhitungan rugi fiskal hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

The calculation of taxable loss above will be the basis in filling Annual Tax Return of Corporate Income Tax.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax benefit (expense) with the result of profit before tax with tax rate is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	241,870	(1,202,338)	Profit (Loss) before Tax as Presented in Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Dikurangi: Rugi Entitas Anak	(52,633)	(131,811)	Deduct: Loss of Subsidiaries
Laba (Rugi) Komersial Perusahaan	294,503	(1,070,527)	Commercial Profit (Loss) of the Company
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif Efektif	73,626	(267,632)	Income Tax Expense at Effective Tax Rate
Pengaruh Pajak atas Koreksi Fiskal	(73,626)	267,632	Tax Effect of Tax Adjustments
Pajak Kini	--	--	Current Tax
Pajak Tangguhan	8	18	Deferred Tax
Beban Pajak Koreksi Tahun Lalu	(12,107)	(24)	Tax Expense of Previous Correction
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Perusahaan	(12,099)	(6)	Income Tax Benefit (Expense) - the Company
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak:			Income Tax Expense - Subsidiaries:
Pajak Kini dan Koreksi Tahun Lalu	(1,730)	(22,201)	Tax Expense of Previous Year Correction
Pajak Tangguhan - Tahun Berjalan	340	702	Deferred Tax - Current Year
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Konsolidasian	(13,489)	(21,505)	Consolidated Income Tax Benefit (Expense)

d. Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

The deferred tax assets as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan pada Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Expense to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset
Perusahaan					The Company
Imbalan Pascakerja	32	8	1	41	Post-Employment Benefits
Entitas Anak - Bersih	715	340	49	1,104	Subsidiaries - Net
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	747	348	50	1,145	Deferred Tax Asset - Net
	31 Desember/ December 31, 2017	Dikreditkan pada Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset
Perusahaan					The Company
Imbalan Pascakerja	21	18	(7)	32	Post-Employment Benefits
Entitas Anak - Bersih	208	702	(195)	715	Subsidiaries - Net
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	229	720	(202)	747	Deferred Tax Asset - Net

26. Laba (Rugi) Per Saham

26. Earnings (Loss) Per Share

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba (Rugi) yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	228,382	(1,223,843)	Income (Loss) Attributable to Owners of the Company
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (Lembar)	1,137,579,698	1,137,579,698	Weighted Average of Outstanding Shares (Shares)
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	201	(1,076)	Basic Earnings (Loss) per Share (Full Rupiah)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

**27. Saldo dan Transaksi dengan
Pihak Berelasi**

**27. Balances and Transactions with
Related Parties**

Grup dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

In its normal activities, the Group has transactions with related parties with details as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Asset and Liabilities	
			2019 %	2018 %
Piutang Usaha / Trade Receivables (Catatan / Note 4)				
PT Sekawan Abadi Prima	19	--	0.00	--
Piutang Lain-Lain / Other Receivables (Catatan / Note 6)				
PT Sekawan Abadi Prima	--	18	--	0.00
Utang Usaha / Trade Payables (Catatan / Note 12)				
PT Sekawan Abadi Prima	2,548	486	0.03	0.01
	2019 Rp	2018 Rp	Persentase terhadap Jumlah Beban yang Bersangkutan dan Penghasilan Komprehensif Lain/ Percentage to Respective Total Expense and Other Comprehensive Income	
			2019 %	2018 %
Pendapatan / Revenue (Catatan / Note 20)				
PT Sekawan Abadi Prima	204	--	0.00	--
Beban Imbalan Kerja / Employee Benefits Expense Komisaris dan Direksi / Commissioners and Directors				
Imbalan Jangka Pendek - Komisaris / Short-Term Benefits - Commissioners	1,575	1,577	1.27	1.50
Imbalan Jangka Pendek - Direksi / Short-Term Benefits - Directors	17,029	13,544	13.73	12.89
Imbalan Kerja Jangka Panjang / Long-Term Employment Benefits	1,339	1,459	1.08	9.53

Hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The relationship and nature of account or transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan dengan Perusahaan/ Relationship	Transaksi/ Transaction
1.	PT Sekawan Abadi Prima	Di bawah Pengendalian Bersama/ Under the Same Control	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Usaha dan Pendapatan / Trade Receivables, Other Receivables, Trade Payables and Revenue
2.	Komisaris dan Direksi/ Commissioners and Directors	Manajemen Kunci/ Key Management	Beban Imbalan Kerja / Employee Benefits Expenses

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All transactions with related parties have been disclosed in the consolidated financial statements.

**28. Instrumen Keuangan
Manajemen Risiko Keuangan**

**28. Financial Instruments
Financial Risks Management**

a. Faktor-faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko-risiko keuangan dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas: Grup menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar terdiri dari:
 - (i) Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
 - (ii) Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
 - (iii) Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Grup memiliki beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini antara lain, adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *offsetting* alami antara penjualan dan biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

a. Factor and Policies of Financial Risk Management

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to financial risks and defines those risks as follows:

- *Credit risk: the possibility that a customer will not pay all or a portion of a receivable or will not pay in a timely manner and therefore will cause a loss to the Group.*
- *Liquidity risk: the Group defines collectibility risk of trade receivables as mentioned above, therefore, will have a difficulty in paying its obligations related to its financial liabilities.*
- *Market risk consist of:*
 - (i) *Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.*
 - (ii) *Interest rate risk is the risk of fluctuations in the fair value of financial instruments that caused the changes in market interest rates.*
 - (iii) *Price risk is risk of fluctuation in the value of financial instruments as a result of changes in market price.*

In order to manage those risks effectively, the Group has certain strategies of financial risks management, which are in line with the corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks exposed by the Group.

The major guidelines of this policy are as follows:

- *Minimize fluctuation risk of interest rate, currency and market risk for all type of transactions.*
- *Maximize the use of favorable the "natural hedge" as much as possible which allowed natural off-setting between revenue and costs and payables/loans and receivables denominated in the same currency. Similar strategy is also applied to interest rate risk.*
- *All financial risk management activities are carried out and monitored.*
- *All risk management activities are conducted wisely and consistently and follow the best market practice.*

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup memiliki instrumen derivatif berupa kontrak swap dalam opsi tingkat bunga dan selisih kurs untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

At the date of statement of financial position the Group has cross currency and interest rate swap and option contracts to anticipate possible risks that may occur.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers, clients or counterparties that fail to meet their contractual obligations. The Group's financial instruments that have the potential credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, other current financial assets and other non-current financial assets.

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Total maximum credit risk exposure of financial assets on December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019		2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	
Pinjaman yang diberikan dan Piutang					Loan and Receivables
Kas dan Bank	361,534	361,534	147,045	147,045	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	611,786	611,786	1,005,389	1,005,389	Trade Receivables
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	209,232	209,232	247,934	247,934	Accrued Income
Piutang Lain-lain	11,887	11,887	26,335	26,335	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	3,531	3,531	352,366	352,366	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,197,970	1,197,970	1,779,069	1,779,069	Total

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

The Group manages credit risk by setting limits on the amount of risk that is acceptable to each customer and to be more selective in choosing banks and financial institutions, only reputable and well-known banks and financial institutions are chosen.

Tabel berikut menganalisis aset yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang belum tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang ditentukan secara individu mengalami penurunan nilai:

The following tables analyze assets that have matured but not impaired and are not yet due and not impaired as well as financial assets that are individually determined to be impaired:

	2019						
	Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Overdue But not Impaired			Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Yet Due and Not Impaired		Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total
	0 - 30 hari/ days	31 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Perusahaan Perbankan/ Banking Company	Perusahaan Bukan Perbankan/ Non-Banking Company		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pinjaman yang diberikan dan Piutang							Loan and Receivables
Kas dan Bank	--	--	--	361,045	489	--	361,534
Piutang Usaha	3,424	2,513	4,499	--	601,350	29,559	641,345
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	--	--	--	--	209,232	--	209,232
Piutang Lain-lain	--	--	--	--	11,887	--	11,887
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	3,531	423,263	426,794
Jumlah	3,424	2,513	4,499	361,045	826,489	452,822	1,650,792
							Total

	2018						
	Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Overdue But not Impaired			Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Yet Due and Not Impaired		Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total
	0 - 30 hari/ days	31 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Perusahaan Perbankan/ Banking Company	Perusahaan Bukan Perbankan/ Non-Banking Company		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pinjaman yang diberikan dan Piutang							Loan and Receivables
Kas dan Bank	--	--	--	146,773	272	--	147,045
Piutang Usaha	4,674	6,403	3,029	--	991,283	29,495	1,034,884
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	--	--	--	--	247,934	--	247,934
Piutang Lain-lain	--	--	--	--	26,335	--	26,335
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	3,457	423,263	426,720
Jumlah	4,674	6,403	3,029	146,773	1,269,281	452,758	1,882,918
							Total

Atas saldo yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup mencatat cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha masing-masing sebesar Rp29.559 dan Rp29.495 (Catatan 4), serta piutang lain-lain yang direstrukturisasi Rp423.263 (Catatan 11).

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan. Jumlah liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan dalam satu tahun sejak 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp871.015 dan Rp675.282 serta liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan lebih dari satu tahun sejak 31 Desember 2019 dan 2018 (sebelum dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi) adalah masing-masing sebesar Rp6.748.238 dan Rp7.341.305.

Risiko Pasar

(i) Risiko Tingkat Bunga

Grup terekspos risiko perubahan tingkat bunga terutama menyangkut pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga mengambang. Grup mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi swap dan opsi tingkat bunga (Catatan 11).

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	2019 Rp	2018 Rp
Liabilitas Keuangan		
Tanpa Bunga	198,184	92,516
Bunga Mengambang	7,421,069	7,924,071
Jumlah Liabilitas Keuangan	7,619,253	8,016,587

Analisa sensitivitas:

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika suku bunga mengambang pada tanggal tersebut lebih tinggi sebanyak 10 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun berjalan akan lebih rendah sebesar Rp7.421.

For amount due in December 31, 2019 dan 2018 the Group has recorded allowance for impairment loss of trade receivable amounting to Rp29,559 and Rp29,495 (Note 4), respectively, and restructured other receivables amounted to Rp423,263 (Note 11).

Liquidity Risk

At present the Group expects to pay all liabilities at their contractual maturity. In order to meet such cash commitments, the Group expects its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group holds liquid financial assets and available to meet liquidity needs.

The Group manages liquidity risk by monitoring projections of actual cash flow continuously and supervises the maturity of its financial liabilities. Total financial liabilities with expected payments within one year are Rp871,015 and Rp675,282 as of December 31, 2019 and 2018, respectively, and those that are due for payments more than one year as of December 31, 2019 and 2018 (before deduction of unamortized transaction costs) are Rp6,748,238 and Rp7,341,305, respectively.

Market Risk

(i) Interest Rate Risk

The Group is exposed to interest rate risk which mainly related to its long-term loans that bears floating interest rate. The Group managed the interest rate risk by entered into interest rate swap and option transactions (Note 11).

The following table presents an analysis of financial liabilities by type of interest:

Financial Liabilities
Non-Interest Bearing
Floating Interest Bearing
Total Financial Liabilities

Sensitivity analysis:

As of December 31, 2019, if the floating interest rate at that date were to be higher by 10 basis point, with all variable remain constant, the consolidated income before tax would be lower by Rp7,421.

Sebaliknya, jika pada tanggal 31 Desember 2019, jika suku bunga mengambang pada tanggal tersebut lebih rendah sebanyak 10 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp7.421.

As of December 31, 2019, if the floating interest rate at that date were to be lower by 10 basis point, with all variable remain constant, the consolidated income before tax would be higher by Rp7,421.

(ii) Risiko Valuta Asing

Grup terekspos risiko valuta asing terutama menyangkut pinjaman jangka panjang dan bunganya. Grup mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi swap dan opsi selisih kurs (Catatan 11).

(ii) Foreign Currency Risks

The Group is exposed to foreign currency risk which mainly related to its long-term loans and its interest. The Group managed the foreign currency risk by entered into cross currency swap and option transactions (Note 11).

(iii) Risiko Harga

Grup tidak memiliki risiko harga pasar karena tidak memiliki aset atau liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar.

(iii) Price Risks

The Group has no price risk as it has no financial assets or liabilities which are traded at the market.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Jumlah tercatat untuk kelompok aset dan liabilitas keuangan jangka pendek, instrumen derivatif maupun yang tidak ditentukan jatuh temponya, telah mencerminkan nilai wajarnya. Sedangkan jumlah tercatat untuk pengukuran nilai wajar tagihan dan utang derivatif diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian dengan input porsi yang dapat diobservasi (Tingkat 2).

b. Fair Value of Financial Instruments

The carrying amount for group of short-term financial assets and liabilities, derivative instrument or with indefinite period, have reflected their fair value. Whereas the carrying amount for measurement of derivative receivable and payable is estimated by using valuation techniques with observable input portions (Level 2).

Investasi dalam instrumen ekuitas, yaitu obligasi wajib konversi, yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments, i.e. mandatory convertible bonds, that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

29. Segmen Operasi

29. Operating Segment

Segmen Operasi:

Grup hanya menghasilkan satu jenis jasa yang signifikan, yang tidak memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses, klasifikasi pelanggan dan distribusi jasa (Catatan 20).

Operating Segment:

The Group only produces one type of service significantly, which does not have different characteristics in the process, customer classification and distribution services (Note 20).

Wilayah Geografis:

Seluruh menara dan sarana penunjang Grup berlokasi dan beroperasi di Indonesia.

Geographical Areas:

All of the Group's towers and supporting equipment are located and operating in Indonesia.

Pelanggan Utama:

Terdapat beberapa pelanggan eksternal tunggal dengan nilai transaksi pendapatan melebihi 10% pendapatan konsolidasian. Pelanggan-pelanggan tersebut telah diungkapkan secara rinci pada Catatan 20.

Major Customer:

There are some single external customer revenue transactions with a value exceeding 10% of consolidated revenues. Those customers have been disclosed in detail in Note 20.

30. Perjanjian dan Perikatan Signifikan

a. Piutang dan Utang Derivatif

Pada bulan Maret 2018, Perusahaan melakukan restrukturisasi atas keseluruhan perjanjian lindung nilai dan juga menandatangani kontrak yang baru yang bertujuan untuk melakukan lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sehubungan dengan penarikan pinjaman bank sindikasi baru dalam rangka *refinancing* atas utang bank sindikasi dan pelunasan utang obligasi yang dilakukan pada bulan Maret 2018.

Restrukturisasi dan perjanjian lindung nilai baru yang dilakukan di bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut:

- Melakukan terminasi atas keseluruhan perjanjian tanggal 16 Februari 2015 untuk *swap* tingkat bunga dan selisih kurs dengan Standard Chartered Bank.
- Pada tanggal 29 Maret dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* tingkat bunga dengan Standard Chartered Bank, dengan nilai kontrak sebesar Rp225.000 dan Rp150.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga JIBOR dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018 dan 22 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- Standard Chartered Bank adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.
- Melakukan penyelesaian ("*settlement*") atas perjanjian tanggal 23 Januari 2015 yang sebelumnya telah direstrukturisasi pada tanggal 22 September 2016 untuk *swap* tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank, N.A.

30. Significant Agreements and Commitments

a. *Derivative Receivables and Payables*

On March 2018, the Company has restructured all its hedging agreements and signed new agreement in order to hedge the payment of loan principal and loan interest of new syndicated bank loan and to refinance the previous syndicated bank loan and bonds repayment on March 2018.

The restructuring and new hedging agreement that have been done in March 2018 are as follow:

- *Termination of full contract of interest rate and foreign exchange swap contracts dated February 16, 2015 with Standard Chartered Bank.*
- *On March 29 and July 24, 2018, the Company signed new interest rate swap contract with Standard Chartered Bank, with contract amount at Rp225,000 and Rp150,000. This derivative instrument is used to mitigate the risk of JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 15).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is March 29, 2018 and July 24, 2018.*
- *Effective date is March 27, 2018 and September 22, 2018.*
- *Closing date is February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *Standard Chartered Bank is the payer of floating interest rate based on JIBOR.*
- *Settlement of interest rate and foreign exchange swap contract dated January 23, 2015 that previously restructured on September 22, 2016 with JP Morgan Chase Bank, N.A.*

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

- Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. dengan total nilai pertukaran sebesar USD276,210,000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dan tingkat bunga dari fasilitas pinjaman bank sindikasi USD (Catatan 15).

Ketentuan transaksi *swap* tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret 2018.
- Tanggal efektif adalah 22 dan 23 Maret 2020.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- JP Morgan Chase Bank, N.A. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

- Melakukan penyelesaian sebagian ("*partial settlement*") dari perjanjian tertanggal 23 Maret 2015 untuk *swap* selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. Nilai pertukaran setelah penyelesaian sebagian adalah USD7,796,250.
- Melakukan restrukturisasi atas perjanjian tanggal 26 Januari 2015 yang sebelumnya telah direstrukturisasi di tanggal 15 April 2015 untuk *swap* tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. Tidak ada perubahan terhadap nilai kontrak setelah restrukturisasi.
- Melakukan penyelesaian ("*settlement*") atas perjanjian tanggal 13 Februari 2015 yang terakhir kali direstrukturisasi pada tanggal 10 April 2015 untuk selisih kurs dan restrukturisasi untuk *swap* tingkat bunga dengan BNP Paribas.
- Melakukan restrukturisasi atas kontrak perjanjian tanggal 13 Februari 2015 untuk *swap* tingkat bunga dengan BNP Paribas. Tidak ada perubahan terhadap nilai kontrak setelah restrukturisasi.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan

- On March 28, 2018, the Company has signed new contract on interest swap and options with JP Morgan Chase Bank N.A. amounted at USD276,210,000. This derivatives instrument is entered to mitigate the risk of foreign exchange and interest rate fluctuation related to the USD syndicated bank loan facilities (Note 15).

The term of the swap transactions entered above are as follows:

- Trading date is March 28, 2018.
- Effective dates are March 22 and 23, 2020.
- Closing date is February 27, 2023.
- The Company is the payer of fixed interest rate per annum.
- JP Morgan Chase Bank, N.A. is the payer of floating interest rate based on LIBOR.

- Partial settlement of foreign exchange swap dated March 23, 2015 with JP Morgan Chase Bank N.A. The foreign exchange contract value after this partial settlement become USD7,796,250.
- Restructured the interest rate and foreign exchange swap contracts dated January 26, 2015 which have been restructured on April 15, 2015 with JP Morgan Chase Bank, N.A. There is no changes on the contract value after restructuring.
- Settled the foreign exchange swap contract dated February 13, 2015 which has been previously resctructured on April 10, 2015 and restructured the interest swap contract with BNP Paribas.
- Restructured the interest swap contract dated February 13, 2015 with BNP Paribas. There is no changes on the contract value after restructuring.
- On March 28, 2018, the Company has signed interest rate swap and option agreement with BNP Paribas with the total contract amounted

BNP Paribas dengan nilai pertukaran sebesar USD7,796,250. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dan tingkat bunga dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

at USD7,796,250. This derivatives instrument is entered to mitigate the risk of foreign exchange and interest rate fluctuation related to the new syndicated bank loan (Note 15).

Ketentuan transaksi swap tersebut diatas adalah sebagai berikut:

The term of the swap transactions entered above are as follows:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 22 Maret 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- BNP Paribas adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

- Trading date is March 28, 2018.

- Effective date March 27, 2018.
- Closing date March 22, 2020.
- The Company is the payer of fixed interest rate per annum.
- BNP Paribas is the payer of floating interest rate based on LIBOR.

- Pada tanggal 28 Maret, 29 Maret dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan MUFG Bank, Ltd. (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), dengan nilai kontrak sebesar USD5,197,500, Rp200.000 dan Rp609.750. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga LIBOR dan JIBOR dan selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

- On March 28, March 29 and July 24, 2018 the Company signed an interest rate and foreign exchange swap agreement with MUFG Bank, Ltd. (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), with contracts value amounted to USD5,197,500, Rp200,000 and Rp609,750. This derivative instrument is used to mitigate the risk of LIBOR and JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

The terms of this hedging transaction are as follows:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret, 29 Maret dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 29 Maret 2018, 3 April 2018 dan 24 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 23 Maret 2020 dan 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- MUFG Bank Ltd. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR dan JIBOR.

- Trading dates are March 28, March 29 and July 24, 2018.
- Effective dates are March 29, April 3 and September 24, 2018.
- Closing dates are March 23, 2020 and February 27, 2023.
- The Company is the payer of fixed interest rate per annum.
- MUFG Bank Ltd. is the payer of floating interest rate based on LIBOR and JIBOR.

- Pada tanggal 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap tingkat bunga dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.100.000 dan Rp750.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga JIBOR dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 15).

- On March 29, 2018 and July 24, 2018, the Company signed new interest rate swap contract with PT Bank CIMB Niaga Tbk, with contract amount at Rp1,100,000 Rp750,000. This derivative instrument is used to mitigate the risk of JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018 dan 22 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.

- Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian swap dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank, N.A., sebagaimana direstrukturisasi tanggal 10 April 2015, dan berbagai tanggal di bulan September 2016, dengan nilai kontrak sebesar USD361,353,125. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (Catatan 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah berbagai tanggal di bulan Januari 2015.
- Tanggal efektif adalah 22 Desember 2014 dan 22 September 2016.
- Tanggal pengakhiran adalah 8 Desember 2019 dan 21 Februari 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- JP Morgan Chase Bank, N.A. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

- Pada tanggal 13 Februari 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian swap dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan BNP Paribas, sebagaimana direstrukturisasi tanggal 10 April 2015 dan 26 September 2016, dengan nilai kontrak masing-masing sebesar USD88,647,875. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (Catatan 15).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 13 Februari 2015.

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is March 29, 2018 and July 24, 2018..*
- *Effective date is March 27, 2018 and September 22, 2018.*
- *Closing date is February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk is the payer of floating interest rate based on JIBOR.*

- *On several dates in January 2015, the Company entered interest rate and foreign exchange swap and option agreement with JP Morgan Chase Bank, N.A., as restructured on April 10, 2015 and several dates in September 2016, with contracts value amounting to USD361,353,125. This derivative instrument is used to mitigate the risk of foreign exchange fluctuation of syndicated bank loan and bond payable (Note 15).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is a number of dates in January 2015.*
- *Effective date is December 22, 2014 and September 22, 2016.*
- *Closing date is December 8, 2019 and February 21, 2020.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *JP Morgan Chase Bank, N.A. is the payer of floating interest rate based on LIBOR.*

- *On February 13, 2015, the Company entered into an interest rate and foreign exchange swap and option agreements with BNP Paribas, as restructured on April 10, 2015 and September 26, 2016, with contracts value amounted to USD88,646,875, respectively. This derivative instrument is used to mitigate the risk of foreign exchange fluctuation of syndicated bank loan and bond payable (Note 15).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is February 13, 2015.*

- Tanggal efektif adalah 22 Desember 2014 dan 24 Februari 2015.
- Tanggal pengakhiran adalah 8 Desember 2019 dan 24 Februari 2020.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- BNP Paribas adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.

Instrumen derivatif ini diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas dan memenuhi syarat kriteria akuntansi lindung nilai. Oleh karena itu, nilai wajar instrumen derivatif diakui dan dicatat pada aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 11) sebesar Rp43.353 dan Rp348.909 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Perubahan nilai wajar dicatat sebagai bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas dan diakui pada penghasilan komprehensif lain.

b. Perjanjian Sewa

Grup memiliki perjanjian sewa dengan para pelanggan sebagai berikut:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 dan 2013, Grup dan BTEL menandatangani perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa menara BTS milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan BTEL dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara BTEL dengan para kreditor terkait, termasuk Grup ("Perjanjian Perdamaian"), dimana utang sewa BTEL kepada Grup akan dibayarkan melalui mekanisme Cash Waterfall, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi wajib konversi (Catatan 11).

- *Effective dates are December 22, 2014 and February 24, 2015.*
- *Closing dates are December 8, 2019 and February 24, 2020.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *BNP Paribas is the payer of floating interest rate based on LIBOR.*

These derivative instrument is classified as cash flow hedge and qualified for the criteria of hedge accounting. Therefore, the fair value of derivative is recognized and recorded under other non-current financial assets (Note 11) amounted to Rp43,353 and Rp348,909 as of December 31, 2019 and 2018, respectively. The changes in fair value is recorded as effective portion of loss on hedging instrument in order of cash flow hedge and is recognized in other comprehensive income.

b. Lease Agreement

The Group has lease agreements with tenants as follows:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)

On a number of dates between 2007 and 2013, the Group and BTEL signed Agreements, as amended several times, regarding the lease of the Group's BTS tower. The agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted BTEL a Temporary Suspension of Payment (the "TSOP") based on TSOP case No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by BTEL and the respective creditors, including Group (the "Settlement Agreement"), which the lease liability of BTEL to Group will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds (Note 11).

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah mengalihkan sebagian Piutang BTEL sejumlah Rp97.500 kepada pihak ketiga.

In December 2015, the Company has transferred partly BTEL receivable of Rp97,500 to a third party.

Menindak lanjuti Perjanjian Perdamaian, BTEL telah mendapat persetujuan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Pada tanggal 20 September 2016, BTEL menyampaikan Sertifikat asli OWK atas nama PT Solusi Tunas Pratama Tbk / Grup sebagai pelaksanaan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Perjanjian Sewa Menara yang telah ada antara Grup dan BTEL.

Following the Temporary Suspension of Payment, BTEL obtained approval to provide the additional capital without right issue by issuance of Mandatary Conversion Bonds (OWK). In September 20, 2016, BTEL has issued original OWK Certificate for PT Solusi Tunas Pratama Tbk / the Group, as part of the Settlement Agreement in accordance with the Tower Leased Agreement between the Group and BTEL.

Pada tanggal 3 April 2017, BTEL dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembatalan OWK atas dasar bahwa Perusahaan tidak menuntut/tidak mengakui haknya atas sebagian OWK yang telah diterbitkan. Setelah dilakukannya Perjanjian Pembatalan Obligasi Wajib Konversi, pada bulan yang sama yaitu April 2017, BTEL kembali menerbitkan Sertifikat asli OWK atas nama Perusahaan dengan nilai OWK yang telah disepakati bersama pada Perjanjian Pembatalan Obligasi Wajib Konversi.

On April 3, 2017, BTEL and the Company signed the Cancellation Agreement of OWK. That Agreement clarified about the Company not recognize its right of OWK which has been issued. After the Cancellation Agreement of OWK was done, on the same month of April 2017, BTEL issued OWK Certificate in the name of the Company with balance of OWK that has been agree together on this Mandatary Conversion Bonds Cancellation Agreement.

Nilai wajar OWK diestimasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Rao, Yuhai & Rekan, penilai independen dengan hasil Nil. Nilai wajar dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas Bersih untuk pendekatan pendapatan.

The fair value of OWK estimated by KJPP Rao, Yuhai & Rekan, independent appraiser, with amounted to Nil. Fair value was calculated using Discounted Cash Flows method on income approach.

2. PT First Media Tbk (FM) dan PT Internux (INUX)

Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup dan FM pada tanggal 12 Juli 2010, sebagaimana diubah dengan amandemen terakhir tanggal 1 Oktober 2012, FM sepakat untuk menyewa BTS dari Grup dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu Perjanjian adalah 8 (delapan) tahun sejak penandatanganan Berita Acara Sewa. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan addendum tanggal 1 Oktober 2013, disepakati INUX menggantikan FM sebagai penyewa.

2. PT First Media Tbk (FM) and PT Internux (INUX)

Based on Lease Agreement of Telecommunication Infrastructure Facility between the Group and FM dated July 12, 2010, as the latest amended on October 1, 2012, FM agreed to lease BTS towers from the Group in accordance with the agreed lease price. The term of the agreement is 8 (eight) years starting from the lease start date (Berita Acara Sewa) and can be extended with consent of both parties. Based on amendment on October 1, 2013, it's agreed that INUX replaced FM as a tenant.

Pada bulan Juli 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), entitas anak, menandatangani Perjanjian Pembayaran Sebagian Hutang dengan INUX. Sebagian

In July 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), a subsidiary, signed a Payment Agreement for Part of Debt with INUX. Part of the debt from INUX to BIT is paid with the

hutang dari INUX kepada BIT dibayar dengan INUX mengalihkan seluruh Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan Intercity dan Kabel Laut Serat Optik senilai Rp70.000.

Right to Use Intercity Network Capacity and Fiber Optic Sea Cables amounted to Rp70,000.

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan INUX dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana utang sewa INUX kepada Grup akan dibayarkan dengan bertahap selama 10 (Sepuluh) tahun sehingga direklasifikasi dari piutang usaha ke aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 11).

On September 17, 2018, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted INUX a Temporary Suspension of Payment (PKPU) based on No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, which the lease liability of INUX to the Group will be paid by installment for 10 (ten) years, then reclassified from trade receivables to other non-current financial assets (Note 11).

Berdasarkan surat tertanggal 28 Desember 2018, masing-masing FM dan INUX memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri sewa lebih awal dari jangka waktunya, efektif terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018.

Based on the letter dated December 28, 2018, each FM and INUX notify their intention to early terminate the lease period, effective as of December 31, 2018.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2017, Grup dan Indosat menandatangani beberapa perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai penyewaan perangkat telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates between 2009 and 2017, the Group and Indosat signed agreements, as amended several times, regarding lease of telecommunication equipments owned by the Group. This agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

Pada tahun 2019, BIT dan Indosat menandatangani perjanjian untuk sewa jaringan kabel optik. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun.

On 2019, BIT and Indosat signed agreement for lease of fiber optic network. This agreement is valid for 10 (ten) years.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2016, Grup dan Telkomsel menandatangani perjanjian sewa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menara milik Grup. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates between 2009 and 2016, the Group and Telkomsel signed lease agreement, as amended several times, regarding the leasing of the Group's BTS towers. These agreements are valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smart)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2013, Perusahaan dan Smart menandatangani perjanjian induk, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amendemen, mengenai sewa

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smart)

On a number of dates between 2009 and 2013, the Company and Smart entered into master agreement, as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure facilities. The agreement is valid

menyewa fasilitas infrastruktur telekomunikasi. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyewaan menara terhitung sejak tanggal Berita Acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

for 5 (five) years for infrastructure in building coverage and 10 (ten) years for tower lease from the date of Agreed Minutes (Berita Acara) by both parties and can be extended with the consent of both parties.

6. PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Pada berbagai tanggal antara 2010 dan 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan HCPT, Perusahaan akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk kolokasi pengoperasian peralatan komunikasi HCPT. Perjanjian ini berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan 10-12 (sepuluh – dua belas) tahun untuk penyewaan menara dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

6. PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

On a number of dates between 2010 and 2013, the Company entered into agreement with HCPT whereas the Company shall provide locations and facilities to HCPT for the operations of its communication equipments. The agreement is valid for 10 (ten) years for in building coverage infrastructures and 10-12 (ten – twelve) years for tower lease and can be extended with the consent of both parties.

Pada bulan Juni 2018, BIT mengadakan perjanjian dengan HCPT mengenai penyewaan jaringan serat optik dengan skema Indefeasible Right to Use (IRU) dalam rangka fiberisasi site-site HCPT. Perjanjian ini memiliki jangka waktu sepuluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya dengan kesepakatan para pihak.

On June 2018, BIT entered an agreement with HCPT regarding lease of fiber optic with Indefeasible Right to Use (IRU) scheme for HCPT's sites. This agreement is valid for ten years since the agreement was signed and can be extended for the next five years with the consent of both parties.

7. PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Axis Telekom (Axis)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2014, Grup dan XL mengadakan perjanjian dalam rangka sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

7. PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Axis Telekom (Axis)

On a number of dates between 2009 and 2014, the Group and XL entered into lease agreements of telecommunication infrastructure owned by the Group. Validity of the agreement is 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

Efektif pada tanggal 8 April 2014 (tanggal efektif peleburan), penggabungan usaha Axis (dahulu PT Natrindo Telepon Selular) dan XL telah selesai dilakukan. Untuk itu pada tanggal efektif penggabungan usaha tersebut, XL mengambil alih semua hak, kepemilikan, dan kepentingan termasuk kewajiban-kewajiban perjanjian sehubungan dengan sites yang disewakan/ digunakan oleh Axis (Perjanjian Axis).

Effective as of April 8, 2014 (the effective date of merger), the merger of Axis (formerly PT Natrindo Telepon Seluler) and XL has been completed, therefore upon the effective date of merger, XL take over all rights, title, and interest including obligations and liabilities under any ongoing agreements that Axis has entered in relation to the Company's sites that are leased/used by Axis (Axis Agreements).

Efektif sejak tanggal 1 April 2014, Perusahaan dan XL menyetujui untuk mengalihkan semua Perjanjian Axis (termasuk perjanjian sewa menara antara Perusahaan dengan

Effective from April 1, 2014, the Company and XL have agreed to transfer the effectiveness of all Axis Agreements (including tower lease agreement between the Company and

PT Ericsson Indonesia dan PT Ericsson Indonesia dengan Axis) sehubungan dengan sites yang disewa oleh Axis; dan efektif pada tanggal 1 April 2014, semua kewajiban-kewajiban terkait Perjanjian Axis sebelum tanggal efektif merger akan ditanggung dan dibayar oleh XL.

PT Ericsson Indonesia and between PT Ericsson Indonesia and Axis) with respect to certain sites previously leased by Axis; and effective as of April 1, 2014, all Axis outstanding liability under Axis Agreement before the effective date of merger shall be borne and paid by XL.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 antara Perusahaan dan STI, STI akan menyewa menara BTS milik Perusahaan dengan kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu perjanjian adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal serah terima dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan kedua belah pihak.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Based on lease agreement No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 made between the Company and STI dated December 5, 2011, STI agreed to lease BTS towers from the Company with compensation as agreed. The term of the agreement is 5 (five) years starting from the lease commencement date and can be extended for 5 (five) years with the consent of both parties.

9. PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset pada tanggal 30 September 2014 antara Perusahaan dengan PT. XL Axiata, Tbk ("XL"), hak-hak XL berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk menyewakan space kepada Mitratel dialihkan kepada Perusahaan. Jangka Waktu Perjanjian Sewa Site adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk Jangka Waktu tambahan selama 5 tahun sesuai kesepakatan dan persetujuan Para Pihak.

9. PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)

Based on Asset Purchase Agreement dated September 30, 2014 by and between Company and PT. XL Axiata, Tbk. ("XL"), XL's rights based on Master Lease Agreement for Tower Infrastructure to lease the space to Mitratel was assigned to Company. The Site Lease Term is 10 (ten) years and can be extended for 5 (five) years additional term based on mutual consent of the Parties.

c. Perjanjian Penting Lainnya

1. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Menara BTS dengan PT Sekawan Abadi Prima (SAP)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 dan 2016, sebagaimana dilakukan amandemen terakhir pada Juli 2019, Perusahaan dan SAP, pihak berelasi, menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Pekerjaan *Site Acquisition* dan/ atau Pekerjaan Material *Civil Mechanical Electrical* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dimana Perusahaan menunjuk SAP sebagai kontraktor Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

c. Other Significant Agreements

1. BTS Tower Development Cooperation Agreement with PT Sekawan Abadi Prima (SAP)

On several dates between 2008 and 2016, as latest amended on July 2019, the Company and SAP, a related party, signed Master Agreement of Site Acquisition and/ or Material Civil Mechanical Electrical Work for Telecommunication Equipment Placement wherein the Company appointed SAP as a contractor of the Company. This agreement is valid for 1 year and can be extended with the consent of both parties.

2. Perjanjian Pengalihan Menara dengan PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Berdasarkan perjanjian tanggal 10 Januari 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan menara dengan HCPT untuk membeli sejumlah menara sampai dengan 300 menara yang berlaku efektif 31 Desember 2012.

3. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pemeliharaan dan Manajemen Akses beserta Keamanan Lahan Infrastruktur Telekomunikasi dengan PT Indah Pratama Abadi (IPA)

Pada tanggal 25 September 2018 telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pemeliharaan antara Perusahaan dan IPA, Perusahaan menunjuk IPA untuk melakukan jasa pemeliharaan sesuai dengan syarat ketentuan dan harga yang diatur dalam Perjanjian.

4. Perjanjian Pembelian Aset dengan PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada tanggal 30 September 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian aset dengan XL sebanyak 3.500 menara dengan harga pembelian Rp5.600 dan Perusahaan setuju untuk menyewakan kembali menara tersebut kepada XL sejak penutupan transaksi tanggal 23 Desember 2014.

5. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan PT Harapan Utama Prima (HUP)

Berdasarkan Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan HUP tanggal 29 September 2017. Perusahaan menunjuk HUP untuk melakukan jasa pemeliharaan infrastruktur menara telekomunikasi.

6. PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)

Pada bulan Maret 2017, Perusahaan dan ICON+ menandatangani kontrak payung mengenai kerjasama pemanfaatan sarana telekomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Selanjutnya bulan Agustus 2018, BIT dan ICON+ menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pembangunan Jaringan Fiber Optik dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disepakati bersama.

2. Tower Transfer Agreement with PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Based on agreement dated January 10, 2013, the Company entered into tower transfer agreement with HCPT to purchase certain towers up to 300 towers, which effective on December 31, 2012.

3. Cooperation Agreement of Maintenance, Access Management and Security Services of Telecommunication Infrastructure Work with PT Indah Pratama Abadi (IPA)

On September 25, 2018 a Maintenance Agreement was signed between the Company and IPA, the Company has appointed IPA to perform maintenance services with term and conditions, and certain prices as stipulated in the agreement.

4. Asset Purchase Agreement with PT XL Axiata Tbk (XL)

On September 30, 2014, the Company entered into asset purchase agreement with XL of 3,500 towers with purchase price of Rp5,600 and the Company agreed to lease back the towers to XL starting from the closing dated December 23, 2014.

5. Cooperation Agreement on Infrastructure Maintenance of Telecommunication Tower with PT Harapan Utama Prima (HUP)

Based on Cooperation Agreement on Infrastructure Maintenance of Telecommunication Tower with HUP dated September 29, 2017. The Company appoints HUP to maintain the service of telecommunication tower infrastructure.

6. PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)

On March 2017, the Company signed the Framework Contract with ICON+ regarding coordination of establishment the usage of telecommunication infrastructures that is owned by each parties

Subsequently on August 2018, BIT signed a Cooperation Agreement on Provision and Development of Optical Fiber Networks with terms and conditions as mutually agreed.

31. Komitmen Pendapatan Sewa Operasi

Pada akhir periode pelaporan, estimasi jumlah pendapatan sewa minimum di masa depan yang dilakukan dengan sewa operasi adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kurang dari Satu Tahun	1,733,497	1,727,147	Not Later than One Year
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	6,057,372	5,770,982	More than One Year and not Later than Five Years
Lebih dari Lima Tahun	610,066	386,770	Later than Five Years
Pendapatan Sewa Tahun Berjalan	1,767,050	1,899,775	Rental Income for the Year

32. Pengelolaan Permodalan

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Grup memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas. Rasio dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pinjaman bersih dihitung dengan mengurangi jumlah pokok pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (bagian pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya (Catatan 15)) dengan kas dan bank.

Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pokok Pinjaman Diukur dengan Kurs Lindung Nilai	7,052,210	7,924,071	Principal Loan Using with Hedging Rate
Dikurangi:			Less:
Kas dan Bank	(361,534)	(147,045)	Cash on Hand and in Banks
Pinjaman Bersih	6,690,676	7,777,026	Net Borrowings
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2,973,516	2,969,905	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Rasio Pinjaman Bersih terhadap Ekuitas	2.25	2.62	Net Debt to Equity

31. Operating Income Lease Commitment

At the end of the reporting period, the estimate of total future minimum lease income committed under operating leases are as follows:

32. Capital Management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Group, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Group monitors capital on the basis of the Group's net debt to equity ratio. The ratio is calculated as net debt divided by total equity attributable to owners of the parent. Net debt is calculated as total principal of syndicated bank loan and bond payable (the portion of foreign currency loan is valued using its hedging rate (Notes 15)) less cash on hand and in banks.

The net debt to equity ratio as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

33. Transaksi Nonkas

33. Non-Cash Transactions

a. Transaksi Non-Kas

Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

	2019 Rp	2018 Rp	
Penambahan aset tetap yang masih terutang	81,068	11,150	Addition of property and equipment unpaid
Penambahan aset tetap yang berasal dari uang muka	1,151	4,758	Addition of property and equipment from advance
Pembayaran sewa lahan	4,999	--	Payments For Land Lease
Penambahan aset takberwujud yang berasal dari uang muka	4,865	--	Addition of intangible assets from advance

a. Non-Cash Transactions

The followings are investing and financing activities not affecting cash flows:

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

	Saldo Awal / Beginning	Arus kas / Cash Flows	Pergerakan Valuta Asing / Foreign Exchange Movement	Perubahan Non-Kas / Non-Cash Movement		Saldo Akhir / Ending
	Rp	Rp	Rp	Saling Hapus dengan Beban Bunga / Net Off with Interest Expense	Amortisasi / Amortization	Rp
31 Desember / December 31, 2019						
Utang Bank Jangka Pendek / Short-Term Bank Loans	360,000	(60,000)	--	--	--	300,000
Utang Bank Sindikasi Berjangka / Syndicated Term Bank Loans	7,356,829	(263,188)	(179,814)	--	44,650	6,958,477
Jumlah / Total	7,716,829	(323,188)	(179,814)	--	44,650	7,258,477
31 Desember / December 31, 2018						
Utang Bank Jangka Pendek / Short-Term Bank Loans	--	360,000	--	--	--	360,000
Utang Obligasi / Bond Payable	4,019,204	(4,123,500)	59,100	--	45,196	--
Utang Bank Sindikasi Berjangka / Syndicated Term Bank Loans	3,649,029	3,111,473	270,211	59,317	266,799	7,356,829
Jumlah / Total	7,668,233	(652,027)	329,311	59,317	311,995	7,716,829

34. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

34. Event After Reporting Period

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (Covid-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal. Manajemen Grup menyatakan bahwa Grup tidak mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan karena tidak signifikannya exposure kedua hal tersebut.

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "the Specific Emergency Disasters Corona Virus Outbreak Status" after the discovery of several people who were identified as being affected by the corona virus (Covid-19). This emergency condition, together with the global economic situation affected by the Covid-19 pandemic, caused a downturn in the domestic economy in early 2020, which was characterized by a weakening of the rupiah exchange rate and a decline in the prices of securities on the capital market. The Group's management states that the Group did not experience a significant impact as of the financial position date due to the insignificant exposure of these matters.

Manajemen berkeyakinan bahwa pandemic Covid-19 saat ini memiliki dampak yang tidak material terhadap kinerja usaha Grup meskipun terdapat ketidakpastian signifikan mengenai dampak kondisi ini terhadap kegiatan usaha Grup dimasa mendatang.

The management believes that the pandemic Covid-19 at this time has an immaterial impact on the Group's business performance, however there is significant uncertainty about the impact of the current conditions on the Group's business in the future.

35. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

35. Standard and Interpretations Issued not Yet Adopted

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the current period.

The following are new standard and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption is permitted:

- PSAK 71: "Financial Instrument";
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";
- PSAK 73: "Lease";
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
- PSAK 112: "Accounting for Endowments";
- PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- PSAK 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";
- ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";
- PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors";
- PSAK 102 (Amendment 2019): "Murabahah Accounting";
- ISAK 101: "Recognition of Resilient Murabahah Revenues without Significant Risk Related to Ownership of Inventory";
- ISAK 102: "Impairment of Murabahah Receivables".

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 112: "Accounting for Endowments";*
- *PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business".*

Until the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments these standards.

36. Informasi Tambahan

36. Supplementary Information

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity, and statement of cash flows for the year then ended, and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

37. Tanggung Jawab dan Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

37. Responsibility and Authorisation of Consolidated Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 6 Mei 2020.

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements. The consolidated financial statements has been authorised for issuance by the Directors on May 6, 2020.

Lampiran I

Appendix I

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)**

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2019 and 2018

(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	331,265	86,246	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	594,176	960,468	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	134,761	193,019	Accrued Income
Piutang Lain-lain	202,913	216,188	Other Receivables
Persediaan	1,191	1,191	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	185,360	275,393	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	242,734	239,361	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	1,692,400	1,971,866	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	721,604	756,218	Advances and Prepaid Expenses - Net of Current Portion
Investasi pada Entitas Anak	1,211,188	1,211,188	Investment in Subsidiaries
Aset Tetap	7,413,495	7,130,337	Property and Equipment
Aset Takberwujud	9,067	—	Intangible Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	46,719	352,199	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	42	32	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	9,402,115	9,449,974	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	11,094,515	11,421,840	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Trade Payables
Pihak Berelasi	6,794	453	Related Party
Pihak Ketiga	2,409	7,368	Third Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	30,527	107	Other Current Financial Liabilities
Utang Pajak	6,588	6,684	Taxes Payable
Akrual	143,338	61,801	Accruals
Pendapatan Ditangguhkan	662,378	803,845	Deferred Income
Utang Bank Jangka Pendek	300,000	360,000	Short-Term Bank Loan
Bagian Lancar atas Utang Bank Sindikasi Jangka Panjang	372,831	222,766	Current Portion of Long-Term Syndicated Bank Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,524,865	1,463,024	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Sindikasi Jangka Panjang	6,585,646	7,134,063	Long-Term Syndicated Bank Loans
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27,834	24,516	Long-Term Employment Benefits Obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6,613,480	7,158,579	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	8,138,345	8,621,603	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per Saham			Share Capital - Rp100 Par Value per Share
- Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham			- Authorized Capital - 2,000,000,000 Shares
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.137.579.698 Saham	113,758	113,758	- Issued and Paid-Up Capital - 1,137,579,698 Shares
Tambahan Modal Disetor - Bersih	3,589,495	3,589,495	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(493,709)	(367,238)	Other Comprehensive Income
Defisit	(253,374)	(535,778)	Deficits
Jumlah Ekuitas	2,956,170	2,800,237	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11,094,515	11,421,840	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran II

Appendix II

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)
STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2019 and 2018
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN	1,561,037	1,667,768	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN			COST OF REVENUES
Penyusutan dan Amortisasi	(277,752)	(267,622)	Depreciation and Amortization
Beban Pokok Pendapatan Lainnya	(67,743)	(74,199)	Other Cost of Revenues
Jumlah	(345,495)	(341,821)	Total
LABA BRUTO	1,215,542	1,325,947	GROSS PROFIT
Beban Usaha			Operating Expenses
Penyusutan dan Amortisasi	(20,993)	(20,263)	Depreciation and Amortization
Beban Usaha Lainnya	(113,255)	(114,994)	Other Operating Expenses
Jumlah	(134,248)	(135,257)	Total
LABA USAHA	1,081,294	1,190,690	OPERATING PROFIT
Penghasilan Bunga	12,628	7,751	Interest Income
Beban Keuangan			Financial Charges
Beban Bunga	(523,919)	(534,334)	Interest Expense
Beban Keuangan Lainnya	(331,966)	(407,194)	Other Financial Charges
Kenaikan (Penurunan) Nilai dari Revaluasi			Incline (Decline) in Value of Revaluation of
Aset Tetap	200,444	(919,255)	Property and Equipment
Beban Lain-lain - Neto	(143,978)	(408,185)	Other Expense - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	294,503	(1,070,527)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	(12,099)	(6)	Income Tax Expense
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	282,404	(1,070,533)	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(731)	5,104	Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	1	(6)	Income Tax of Remeasurement of Defined Benefits Plan
Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	—	156,222	Net Increase of Revaluation of Towers and Supporting Equipment
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen			Effective Portion of Loss on Hedging
Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas	(125,741)	(126,066)	Instrument Related with Cash Flow Hedge
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(126,471)	35,254	Total Other Comprehensive Income for the Year Net Off Tax
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	155,933	(1,035,279)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

For the Years Ended

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

December 31, 2019 and 2018

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company												
Modal Saham/ Share Capital		Tambahan Modal Disetor - Bersih/ Additional Paid-in Capital - Net		Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income			Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficits)			Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
		Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung Nilai dalam rangka Arus Kas/ Effective Portion of Loss on Hedging Instrument Related with Cash Flow Hedge	Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang/ Net Increase in Revaluation of Towers and Supporting Equipment	Salah Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing/ Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefits Plan	Jumlah/ Total	Yang Telah Ditetapkan Penggunaan/ Appropriated	Yang Belum Ditetapkan Penggunaan/ Unappropriated	Jumlah/ Total			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
113,758	3,589,495	(247,392)	(156,222)	--	1,122	(402,492)	22,900	511,855	534,755	3,835,516		
BALANCE AS OF JANUARY 1, 2018												
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2018												
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan												
--	--	(126,066)	156,222	--	5,098	35,254	--	(1,070,533)	(1,070,533)	(1,035,279)		
113,758	3,589,495	(373,458)	--	--	6,220	(367,238)	22,900	(558,678)	(535,778)	2,800,237		
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018												
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2019												
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan												
--	--	(125,741)	--	--	(730)	(126,471)	--	282,404	282,404	155,933		
113,758	3,589,495	(499,199)	--	--	5,490	(493,709)	22,900	(276,274)	(253,374)	2,956,170		
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019												

SALDO PADA TANGGAL 1 JANUARI 2018

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2018

Perubahan Ekuitas pada Tahun 2018

Movements in Equity in 2018

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018

Perubahan Ekuitas pada Tahun 2019

Movements in Equity in 2019

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

Lampiran IV

Appendix IV

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)**

STATEMENTS OF CASHFLOWS

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1,952,136	1,596,184	Cash Received from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya	(77,582)	(83,937)	Payment to Suppliers and Others
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan	(85,824)	(90,745)	Payments for Management and Employees
Penerimaan Bunga	31,924	7,751	Interest Received
Penerimaan Restitusi Pajak	35,119	16,788	Receipts from Tax Refund
Pembayaran Pajak Penghasilan	(37,089)	(24,828)	Cash Paid For Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>1,818,684</u>	<u>1,421,213</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan Aset Tetap	(255,295)	(101,778)	Addition of Property and Equipment
Penambahan Aset Takberwujud	(6,880)	--	Addition of Intangible Assets
Pembayaran Sewa Lahan	(214,305)	(200,047)	Payments For Land Lease
Uang Muka Konstruksi	(2,220)	(3,082)	Advances for Construction
Penambahan Investasi di Entitas Anak	--	(185,558)	Additional of Investment in Subsidiary
Penerimaan Dividen	--	41	Proceeds of Dividend
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(478,700)</u>	<u>(490,424)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Transaksi Utang Sindikasi			Syndicated Loan Transactions
Penerimaan	400,000	3,979,763	Proceeds
Pembayaran	(723,188)	(508,290)	Payments
Pembayaran Beban Keuangan	(805,560)	(367,976)	Payment of Financial Charges
Penerimaan dari (Pembayaran ke) Entitas anak	33,207	(4,156,127)	Receipt from (Payment to) Subsidiaries
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(1,095,541)</u>	<u>(1,052,630)</u>	Net Cash Flows Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	244,443	(121,841)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK	576	(10,049)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ON CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	86,246	218,136	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>331,265</u>	<u>86,246</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah Penuh)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)

OTHER DISCLOSURES

For the Years Ended
 December 31, 2019 and 2018
 (In Full Rupiah)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

1. Separate Financial Statements

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

Statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung

2. Schedule of Investment in Subsidiaries with Direct Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Sarana Inti Persada	Bandung	99.87%
PT Platinum Teknologi	Jakarta	99.99%
Pratama Agung Pte. Ltd.	Singapura	100%

3. Metode Pencatatan Investasi

3. Method of Investment Recording

Investasi pada entitas anak dengan kepemilikan langsung sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Investment in subsidiaries with direct ownership as mentioned in the financial statements of parent entity is recorded using cost method.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Perkantoran Permata Senayan
Blok C1, Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210

Telp. +62 21 5794 0688
Faks. +62 21 5795 0077

www.stptower.com